



JURNAL RISET DAERAH KABUPATEN BANTUL

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Provinsi DIY



Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul

(Muhammad Farkhan Fadhlurokhman, Ryan Fathurrahman, Hendy Fauzi, Arifa Farhani, Adinda Salshabilla Zhauzha Huda, Dewa Anggara, Latifatul Isyarah, Sisilia Dorcelina Sapranim)

Analisis Peluang Pengembangan Connecting Tourism di Goa Selarong dan Kasongan Kabupaten Bantul

(Ilyas Cahaya Mardiyanto, Ratna Wulandari, Rias Listiawati, Muhammad Rahmi Mu'tashim, Noraulifiyah Mazda Surury, Octi Larasati Wachidyannisa)

Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul

(Shaula Rizky Sarlita, Hafifuddin, Fikran Hadi Azryan, Firdausa Kumala Sari, Joevana Putri, Ilfa Fauzia Asra, Wina Nurfaidah)

Komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa Sebagai Souvenir: Studi Kasus Ghriya Ukir Kulit Sagio

(Abimanyu Putra Pratama)

Strategi Mix Level melalui Peer Assistant di Kelas Bahasa Inggris SMP Islam Terpadu LHI

(Fourzia Yunisa Dewi)

JURNAL RISET DAERAH

Diterbitkan oleh:

Pemerintah Kabupaten Bantul
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

PENANGGUNG JAWAB

Ari Budi Nugroho, ST., M.Sc
(Kepala BAPPEDA)

REDAKTUR

Liana Indiaty, ST
(Kepala Bidang Riset, Inovasi
Daerah dan Pengendalian)

ANGGOTA

Eni Kriswandari, SE, M.Ec.Dev
(Kepala Bidang Perencanaan Bappeda)
Kusnanto, S.Si, M.IP
(Unsur Bagian Organisasi Setda)
Zanita Sri Andanawati, SE., ME
(Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

REVIEWER

Prof. Dr. Sri Rum Giyarsih, S.Si., M.Si
(Universitas Gadjah Mada)
Ir. Syamsul Ma'arif, ST, M.Eng
(Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa)

REDAKTUR PELAKSANA

Agus Riyanti, S.Si., M.Ec.Dev
Putri Anindyajati, SE

SEKRETARIAT

Yulyana Purwaningsih, SE., M.Si
Desi Ari Kianingsih, S.Pd
Ferinta Amartya Putri, A.Md.AK

PENGELOLA OJS

Bhakti Kurnianto Nur Prasetyo, A.Md
Joanna Avila N.B, A.Md
Heru Susanto, S.Kom

DAFTAR ISI

***Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan
Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten
Bantul***

Muhammad Farkhan Fadhlurokhman
Ryan Fathurrahman

Hendy Fauzi

Arifa Farhani

Adinda Salshabilla Zhauzha Huda

Dewa Anggara

Latifatul Isyarah

Sisilia Dorcelina Sapranim

139-150

***Analisis Peluang Pengembangan
Connecting Tourism di Goa Selarong dan
Kasongan Kabupaten Bantul***

Ilyas Cahaya Mardiyanto

Ratna Wulandari

Rias Listiawati

Muhammad Rahmi Mu'tashim

Noraulifiyah Mazda Surury

Octi Larasati Wachidyannisa

151-161

***Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan
Melayani Perizinan Langsung) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Bantul***

Shaula Rizky Sarlita

Hafifuddin

Fikran Hadi Azryan

Firdausa Kumala Sari

Joevana Putri

Ilfa Fauzia Asra

Wina Nurfaidah

162-176

***Komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa
Sebagai Souvenir: Studi Kasus Ghriya Ukir
Kulit Sagio***

Abimanyu Putra Pratama

177-195

***Strategi Mix Level melalui Peer Assistant di
Kelas Bahasa Inggris SMP Islam Terpadu
LHI***

Fourzia Yunisa Dewi

196-207

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menerbitkan Jurnal Riset Daerah Volume XXVI No. 3 Tahun 2026. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada para penulis yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dari hasil penelitiannya sehingga dapat dipublikasikan untuk diakses oleh *stakeholders* yang berkepentingan.

Berdasarkan surat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 12.567/JL.3.02/SK.ISSN/2002 tertanggal 31 Desember 2002 Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul telah mendapatkan International Standard Serial Number (ISSN) 1412-8519 dan pada 13 April 2022 Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul telah mendapatkan International Standard Serial Number (ISSN) 2829-2227 untuk media online berdasarkan surat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 0005.28292227/K.4/SK.ISSN/2022.04, sehingga secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai sebuah media penerbitan ilmiah. Sejak penerbitan pertama pada bulan Desember 2002, Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul telah mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat umum maupun dari kalangan peneliti dan akademisi

Hasil-hasil penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul dapat diakses melalui www.ojs.bantulkab.go.id. Edisi kali ini memuat hasil-hasil riset yang cukup bervariasi sebagai berikut:

1. **Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul**
2. **Analisis Peluang Pengembangan Connecting Tourism di Goa Selarong dan Kasongan Kabupaten Bantul**
3. **Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul**
4. **Komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa Sebagai Souvenir: Studi Kasus Ghriya Ukir Kulit Sagio**
5. **Strategi Mix Level melalui Peer Assistant di Kelas Bahasa Inggris SMP Islam Terpadu LHI**

Di dalam penyusunan Jurnal Riset Daerah, tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangsempurnaan. Oleh karena itu kami memerlukan saran dan masukan yang sifatnya membangun. Atas perhatian dan peran serta semua pihak yang membantu terbitnya jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda

ARI BUDI NUGROHO, ST., M.Sc.

NIP. 197103231999031002

Bantul

Jurnal Riset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Bantul

ISSN : 1412-8519 (media cetak)

ISSN : 2829-2227 (media online)

JRD

Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul

Muhammad Farkhan Fadhlurokhman^{1✉}, Ryan Fathurrahman², Hendy Fauzi³, Arifa Farhani⁴, Adinda Salshabilla Zhauzha Huda⁵, Dewa Anggara⁵, Latifatul Isyarah⁶, Sisilia Dorcelina Sapranim⁷

Program Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

✉ fadhlurokhmanmf@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Submitted : July 2026

Revised : Augst 2026

Published : Sept 2026

KEYWORDS

Kelayakan Indikatif Mal
 Ekonomi Lokal
 Tata Ruang
 Koridor Lokasi
 Kabupaten Bantul

ABSTRAK

Perluasan aktivitas ekonomi metropolitan di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan relevansi penyediaan fasilitas ritel modern di kawasan periurban. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan indikatif pengembangan mal di Kabupaten Bantul melalui pembacaan potensi permintaan, koridor lokasi, pagar regulasi, serta desain ekonomi lokal yang inklusif. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif eksploratif berbasis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telaah dokumen, dan *scorecard* kebijakan. Data bersumber dari statistik ekonomi daerah, indikator kependudukan dan pengeluaran, data fiskal, regulasi daerah, serta literatur empiris mengenai lokasi mal, perilaku konsumen, *catchment area*, *tenant mix*, dan dampak perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantul memiliki basis pasar yang kuat, ditandai oleh pertumbuhan PDRB riil dari Rp18.839,3 miliar pada 2020 menjadi Rp24.094,68 miliar pada 2025, jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa, serta proporsi belanja nonmakanan sebesar 56,44 persen. Bantul bagian utara, terutama koridor Banguntapan–Ring Road Selatan–Wonosari/Imogiri Timur, muncul sebagai lokasi makro paling kuat karena memadukan basis penduduk yang besar, arus komuter, dan kedekatan dengan Kota Yogyakarta. Namun, kelayakan tersebut tetap bersyarat pada kesesuaian tata ruang, status lahan, Andalalin, persetujuan lingkungan, kelayakan finansial, serta perlindungan pasar rakyat dan UMKM. Penelitian menyimpulkan bahwa Bantul layak secara indikatif untuk masuk ke tahap studi teknis-finansial lanjutan, bukan pembangunan langsung, dengan model *community-lifestyle mall* sebagai arah kebijakan yang disarankan.

ABSTRACT

The expansion of metropolitan economic activity in the Special Region of Yogyakarta has increased the relevance of modern retail facilities in peri-urban areas. This study assesses the indicative feasibility of shopping mall development in Bantul Regency by examining demand potential, spatial corridors,

regulatory safeguards, and inclusive local-economic design. The study applies a descriptive exploratory design using secondary data, document review, and a policy scorecard. Data were drawn from regional economic statistics, population and expenditure indicators, fiscal data, local regulations, and empirical literature on mall location, consumer behavior, catchment areas, tenant mix, and urban impacts. The findings show that Bantul has a strong market base, indicated by consistent real gross regional domestic product growth from Rp18,839.3 billion in 2020 to Rp24,094.68 billion in 2025, a population of around one million residents, and a non-food expenditure share of 56.44 percent. The northern part of Bantul, particularly the Banguntapan-Ring Road Selatan-Wonosari/Imogiri Timur corridor, emerges as the strongest macro-location because it combines a large local population, commuter flows, and proximity to Yogyakarta City. However, feasibility remains conditional on detailed spatial planning, land status, traffic-impact analysis, environmental approval, financial appraisal, and protection of traditional markets and micro-enterprises. The study concludes that Bantul is indicatively feasible for a further technical-financial feasibility study, not for immediate construction, with a community-lifestyle mall model as the preferred policy direction.

1. PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, pusat perbelanjaan modern tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat transaksi ritel, tetapi berkembang menjadi ruang pengalaman yang menggabungkan belanja, kuliner, hiburan, jasa, dan interaksi komunitas. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa keberlangsungan mal semakin ditentukan oleh kemampuan pengelola membentuk pengalaman pengunjung, komposisi penyewa, serta keterhubungan antara layanan fisik dan perubahan perilaku konsumen [10][14]. Pada saat yang sama, pemilihan lokasi mal memerlukan penilaian multikriteria yang mencakup ukuran pasar, aksesibilitas, transportasi, kepadatan penduduk, kedekatan dengan pusat aktivitas, dan persaingan dengan pusat belanja yang telah ada [9][29]. Mal juga dapat membentuk *urban core* baru yang memengaruhi pola perjalanan, penggunaan lahan, dan perkembangan kawasan sekitarnya [13]. *Status quo* tersebut menunjukkan bahwa kajian pengembangan mal perlu ditempatkan sebagai kajian pembangunan wilayah yang menggabungkan dimensi pasar, ruang, pengalaman pengunjung, regulasi, dan dampak lokal, bukan sekadar penilaian atas ketersediaan lahan.

Kebutuhan pembacaan semacam itu relevan bagi Kabupaten Bantul sebagai wilayah *periurban* yang berbatasan langsung dan memiliki hubungan mobilitas kuat dengan Kota Yogyakarta. PDRB atas dasar harga konstan Bantul meningkat dari Rp18.839,3 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp22.964,6 miliar pada tahun 2024 dan menempatkan Bantul sebagai kontributor ekonomi terbesar ketiga di DIY [3]. Kabupaten ini juga memiliki penduduk sekitar satu juta jiwa, kepadatan yang relatif tinggi, pengeluaran per kapita Rp1.730.515 per bulan, serta proporsi belanja nonmakanan sebesar 56,44 persen [3]. Data fiskal daerah turut menunjukkan aktivitas retribusi jasa umum dan jasa usaha yang relatif kuat dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY [5]. Kombinasi pertumbuhan ekonomi, basis penduduk, dan pola konsumsi tersebut memberikan alasan awal untuk menilai potensi penyediaan pusat perdagangan, jasa, kuliner, rekreasi, dan ruang komunitas di dalam wilayah Bantul. Namun, indikator makro tersebut baru menunjukkan potensi pasar dan belum dapat dianggap sebagai bukti kelayakan pembangunan pada lokasi tertentu.

Persoalan kebijakan yang dihadapi Bantul karena itu bukan hanya belum adanya bangunan mal berskala besar. Kedekatan dengan Kota Yogyakarta dan Sleman memungkinkan sebagian kebutuhan ritel modern, hiburan, dan rekreasi masyarakat dipenuhi di luar wilayah, sehingga terdapat potensi *economic leakage* berupa tidak tertahannya sebagian belanja, kesempatan usaha, dan aktivitas pendukung di daerah asal. Akan tetapi, upaya menahan arus belanja tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan pasar rakyat, usaha mikro dan kecil, tata ruang, aksesibilitas, serta daya dukung lingkungan. Peraturan daerah dan peraturan bupati di Kabupaten Bantul menempatkan perlindungan pasar rakyat, kemitraan dengan usaha mikro dan kecil, kesesuaian lokasi, ketersediaan parkir, dan infrastruktur sebagai prasyarat penyelenggaraan pusat perbelanjaan [17][18][19][20]. Oleh sebab itu, keputusan pengembangan mal

harus menjawab dua kepentingan sekaligus, yaitu memperkuat retensi belanja dan simpul ekonomi lokal, serta mencegah *crowding-out*, kemacetan, dan manfaat ekonomi yang hanya terkonsentrasi pada pengelola atau penyewa besar.

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting, tetapi masih tersebar pada fokus yang berbeda. Khosravian *et al.* (2024) dan Zhou *et al.* (2024) menekankan pemilihan lokasi melalui pendekatan multikriteria dan perubahan perilaku konsumen. Sugema *et al.* (2018) membahas optimalisasi aset komersial pemerintah berbasis analisis pasar, sedangkan Lontoc *et al.* (2023) menunjukkan peran mal sebagai pusat perkotaan baru. Kajian lain lebih banyak membahas perkembangan riset mal, pengalaman pengunjung, pengelolaan *tenant*, atau kelayakan proyek pada lokasi yang telah lebih dahulu ditentukan [1][10][14][25]. *Scientific gap* penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian *pre-feasibility* yang secara terpadu menilai kabupaten periurban yang belum memiliki mal berskala besar melalui pembacaan permintaan, perbandingan koridor lokasi makro, pagar regulasi, risiko terhadap pasar rakyat, dan desain integrasi ekonomi lokal. Kesenjangan tersebut penting bagi pemerintah daerah karena keputusan awal tidak hanya memerlukan jawaban “layak atau tidak”, tetapi juga memerlukan penjelasan mengenai koridor yang paling rasional, syarat yang harus dipenuhi, risiko yang perlu dikendalikan, dan model pengembangan yang paling sesuai dengan karakter wilayah. Inovasi penelitian terletak pada penggabungan empat lapisan analisis basis pasar, struktur mobilitas dan koridor periurban, pagar regulasi daerah, dan desain *community-lifestyle mall* berbasis ekonomi lokal ke dalam *scorecard* kebijakan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menilai kelayakan indikatif pengembangan mal di Kabupaten Bantul dengan menganalisis potensi permintaan, membandingkan koridor lokasi, mengidentifikasi persyaratan regulasi dan risiko, serta merumuskan konsep pengembangan inklusif. Secara akademik, penelitian ini menawarkan kerangka *pre-feasibility* terintegrasi untuk membaca pengembangan pusat perbelanjaan pada wilayah penyangga kota besar. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan membantu Pemerintah Kabupaten Bantul menyaring koridor prioritas, menentukan kebutuhan studi lanjutan, merancang perlindungan pasar rakyat dan UMKM, serta menyusun persyaratan bagi calon investor. Karena bersifat indikatif, penelitian ini tidak menetapkan keputusan investasi atau tapak final, tetapi menyediakan dasar awal bagi studi permintaan, studi teknis-finansial, penapisan RDTR, Andalalin, kajian lingkungan, dan konsultasi publik.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif eksploratif dengan pendekatan studi kasus wilayah. Desain tersebut dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan menyusun pembacaan awal mengenai potensi, risiko, dan prasyarat kebijakan pengembangan mal di Kabupaten Bantul. Pendekatan ini sesuai untuk studi indikatif yang membutuhkan penggabungan data kuantitatif sekunder, telaah regulasi, dan sintesis literatur.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perhatian khusus pada koridor utara yang berbatasan dan terhubung kuat dengan Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakter Bantul sebagai wilayah periurban, basis penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi yang konsisten, serta potensi kebocoran konsumsi ke pusat ekonomi yang lebih mapan di Kota Yogyakarta dan Sleman.

2.2 Objek, Data, dan Instrumen Penelitian

Objek penelitian adalah potensi pengembangan pusat perbelanjaan modern atau mal di Kabupaten Bantul. Subjek analisis bukan individu responden, melainkan indikator wilayah, pasar, regulasi, dan risiko pembangunan. Unit pembacaan lokasi meliputi koridor Banguntapan, Sewon, Kasihan, kawasan pusat Bantul, dan kawasan selatan atau wisata pantai.

Data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan dokumen kebijakan. Data ekonomi dan sosial meliputi PDRB, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pengeluaran per kapita, komposisi belanja makanan dan nonmakanan, dan indikator PPN indikatif bersumber dari BPS serta data fiskal daerah berupa retribusi daerah bersumber dari Kemenkeu. Dokumen kebijakan mencakup Perda Bantul Nomor 21 Tahun 2018, Perbup Bantul Nomor 98 Tahun 2019, Perbup Bantul Nomor 131 Tahun 2020, dan Perda Bantul Nomor 9 Tahun 2021. Instrumen analisis berupa matriks indikator, matriks lokasi, dan *scorecard* kebijakan.

2.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahap. Pertama, pengumpulan data sekunder dari statistik resmi, data fiskal, regulasi daerah, dan literatur ilmiah. Kedua, pemilihan indikator kunci yang relevan dengan pengembangan mal, meliputi permintaan pasar, aksesibilitas, struktur lokasi, risiko lalu lintas, keberadaan pasar rakyat, dan peluang integrasi UMKM. Ketiga, penyusunan matriks perbandingan antarkoridor lokasi. Keempat, penyusunan sintesis kelayakan indikatif dan roadmap tindak lanjut.

Penelitian tidak melakukan survei primer, wawancara mendalam, uji preferensi tenant, pengukuran lalu lintas lapangan, ataupun perhitungan finansial investor. Oleh karena itu, hasil penelitian dibatasi sebagai pre-feasibility atau kelayakan indikatif yang dapat menjadi dasar penyusunan studi kelayakan teknis-finansial pada tahap berikutnya.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dan sintetis. Data ekonomi dan kependudukan digunakan untuk membaca potensi permintaan, sedangkan data lokasi dan regulasi digunakan untuk menilai prasyarat pengembangan. Analisis koridor dipahami sebagai penilaian terhadap jalur pergerakan utama sebagai kesatuan tiga lapis, yakni infrastruktur, aliran orang dan barang, serta urbanisasi dan kegiatan ekonomi di sepanjangnya, sehingga kelayakan suatu lokasi dinilai dari keterkaitan ketiga lapis tersebut, bukan dari batas administratif wilayah. Dalam penelitian ini, analisis koridor dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran pasar, kedekatan dengan Kota Yogyakarta, akses jalan utama, fungsi komuter, potensi kompetisi, dan risiko terhadap pasar rakyat. Pembahasan hasil kemudian dihubungkan dengan literatur mengenai pemilihan lokasi mal, perilaku konsumen, *catchment area*, *tenant mix*, dan dampak spasial kota [1][9][10][26][13][14][29].

Sintesis akhir disusun dalam bentuk scorecard kebijakan yang mengelompokkan aspek permintaan pasar, lokasi, regulasi, UMKM dan pasar rakyat, lingkungan dan lalu lintas, serta finansial investor. Setiap aspek diberi status indikatif, bersyarat, atau belum final untuk menghindari *overclaim* terhadap hasil kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi pasar yang cukup kuat, tetapi keputusan pengembangan mal perlu ditempatkan dalam kerangka bersyarat. Indikator makro memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, sedangkan indikator demografis dan konsumsi menunjukkan basis pengunjung yang cukup luas. Namun, kekuatan permintaan tidak otomatis berarti lokasi langsung layak, karena pusat perbelanjaan modern membutuhkan kecocokan tata ruang, akses, daya dukung jalan, skema kemitraan UMKM, serta kajian teknis dan finansial lanjutan.

Tabel 1. PDRB ADHK Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kulonprogo	8.468,2	8.838,1	9.419,3	9.951,9	10.426,2	10.881,10
Bantul	18.839,3	19.781,8	20.809,2	21.861,7	22.964,6	24.094,68
Gunung Kidul	13.512,4	14.230,1	14.994,2	15.749,2	16.506,4	17.409,68
Sleman	33.857,3	35.755,9	37.596,4	39.508,6	41.560,0	44.274,03
Kota Yogyakarta	27.016,5	28.409,7	29.863,0	31.378,8	32.964,3	34.595,51

Sumber: Diolah dari bahan kajian PLPKM dan BPS DIY.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa PDRB riil Bantul tumbuh konsisten sepanjang 2020-2024 dan berada pada posisi ketiga di DIY. Posisi ini penting karena pusat perbelanjaan modern membutuhkan basis ekonomi lokal yang cukup kuat untuk mendukung permintaan ritel, jasa, kuliner, hiburan, dan aktivitas rekreasi. Namun, posisi ekonomi tersebut perlu dibaca bersama struktur konsumsi dan persebaran penduduk agar tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu cepat.

Tabel 2. Indikator Permintaan dan Basis Pasar Kabupaten Bantul

Indikator	Temuan Kunci	Makna untuk Pengembangan Mal
Jumlah penduduk	Sekitar satu juta jiwa	Basis pengunjung lokal yang luas
Kepadatan penduduk	Peringkat 2 di DIY	Potensi interaksi dan mobilitas harian tinggi
Total pengeluaran per kapita per bulan	Rp1.730.515	Daya konsumsi cukup relevan untuk ritel dan jasa
Belanja nonmakanan	Rp976.665 atau 56,44%	Ruang konsumsi untuk fashion, hiburan, jasa, dan pengalaman
Share estimasi PPN DIY	26,39%	Proksi indikatif basis konsumsi formal
Retribusi jasa umum dan jasa usaha	Relatif tertinggi di DIY	Sinyal aktivitas layanan dan aset publik yang hidup

Sumber: Diolah dari BPS, DJPK, dan bahan paparan PLPKM.

Indikator permintaan menunjukkan bahwa Bantul bukan pasar kecil. Struktur belanja nonmakanan yang mencapai 56,44 persen memberi sinyal bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan konsumsi dasar, tetapi juga barang tahan lama, jasa, hiburan, dan pengalaman.

Tabel 3. Matriks Rekomendasi Koridor Lokasi

Peringkat	Koridor Lokasi	Alasan Utama	Catatan Syarat
1	Banguntapan-Ring Road Selatan-Jalan Wonosari/Imogiri Timur	Penduduk terbesar, dekat Kota Yogyakarta, dan simpul komuter harian	Cek RDTR, status lahan, jarak pasar rakyat, Andalalin, parkir
2	Sewon-Ring Road Selatan-Jalan Parangtritis/Jalan Bantul	Akses tinggi dan dekat pusat permukiman	Hindari zona sensitif Sumbu Filosofi/Panggung Krapyak; kendali visual dan lalu lintas
3	Kasihan-perbatasan Kota Yogyakarta/Sleman	Penduduk besar, kawasan pendidikan, dan permukiman	Analisis kompetisi dengan pusat belanja Yogyakarta dan Sleman
4	Kawasan pusat Bantul	Pemerataan layanan lokal	Lebih sesuai untuk retail plaza atau neighborhood center
5	Selatan/kawasan wisata pantai	Potensi wisata dan rekreasi musiman	Tidak menjadi prioritas mal reguler karena demand harian lebih rendah

Sumber: Diolah dari Tabel 4.6-4.7 Laporan PLPKM dan bahan paparan.

Tabel 3 menempatkan Banguntapan-Ring Road Selatan sebagai koridor prioritas makro. Kawasan ini memiliki jumlah penduduk terbesar di antara koridor yang dikaji, yakni 117.875 jiwa, diikuti Kasihan 108.779 jiwa dan Sewon 103.238 jiwa. Keunggulan Banguntapan tidak hanya terletak pada jumlah penduduk, tetapi juga pada kedekatannya dengan Kota Yogyakarta, koneksi Ring Road Selatan, Jalan Wonosari, dan Jalan Imogiri Timur, serta fungsinya sebagai koridor komuter harian. Koridor ini berpotensi menangkap konsumsi harian, bukan hanya kunjungan rekreasi musiman. Sewon dan Kasihan tetap memiliki potensi yang kuat, tetapi dengan catatan yang berbeda. Sewon unggul dalam akses ke Jalan Parangtritis, Jalan Bantul, dan Ring Road Selatan, tetapi sensitif terhadap tata ruang dan visual kawasan budaya, termasuk kedekatan dengan Panggung Krapyak. Kasihan unggul karena basis pendidikan dan permukiman, tetapi menghadapi kompetisi dari pusat belanja yang mapan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Dengan demikian, keputusan lokasi tidak cukup hanya didasarkan pada kepadatan penduduk, tetapi perlu menggabungkan akses, pasar, kompetisi, regulasi, serta dampaknya terhadap kawasan sekitar.

Tabel 4. Scorecard Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal di Kabupaten Bantul

Aspek	Temuan Utama	Status	Syarat Utama
Permintaan pasar	Penduduk dan konsumsi non makanan cukup besar	Layak indikatif	Survei demand, willingness to visit, dan segmentasi pasar
Lokasi	Koridor Banguntapan/utara-timur paling kuat	Layak bersyarat	RDTR, akses, parkir, Andalalin, dan status lahan
Regulasi	Dimungkinkan tetapi dibatasi perlindungan pasar rakyat dan UMKM	Bersyarat	Kepatuhan pada Perda 21/2018, Perbup 98/2019, dan Perbup 131/2020
UMKM/pasar rakyat	Ada peluang spillover sekaligus risiko crowding-out	Bersyarat	Tenant lokal, kemitraan UMK, event lokal, dan zona strategis UMKM
Lingkungan/lalu lintas	Beban pergerakan berpotensi meningkat	Belum final	AMDAL/UKL-UPL, Andalalin, manajemen parkir, dan transportasi
Finansial investor	Belum dihitung dalam kajian ini	Belum diputuskan	NPV, IRR, payback period, sewa, dan okupansi tenant

Sumber: Sintesis penulis dari bahan kajian PLPKM.

Scorecard pada Tabel 4 menegaskan bahwa hasil penelitian berada pada status layak indikatif dan bersyarat. Kelayakan tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi keputusan pembangunan karena aspek finansial investor, lalu lintas, lingkungan, status lahan, dan konsultasi publik belum diuji secara teknis. Dengan demikian, keputusan yang paling aman bagi pemerintah daerah adalah membuka tahap studi lanjutan, bukan langsung mendorong pembangunan fisik.

3.2 Pembahasan

Temuan mengenai kuatnya permintaan pasar sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa pusat perbelanjaan membutuhkan basis pengunjung yang besar, arus pergerakan yang stabil, dan kedekatan dengan konsentrasi permukiman [9][29]. Akan tetapi, literatur tersebut juga menekankan bahwa kepadatan penduduk tidak cukup sebagai dasar tunggal. Lokasi harus diuji melalui multi-kriteria, termasuk akses transportasi, hubungan dengan pusat aktivitas, jarak terhadap pusat belanja eksisting, serta risiko terhadap jaringan jalan. Oleh karena itu, peringkat koridor dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penetapan titik koordinat, melainkan sebagai prioritas makro untuk kajian tapak lanjutan.

Banguntapan menjadi prioritas karena memenuhi tiga logika utama. Pertama, logika demand, yaitu basis penduduk besar dan kedekatan dengan Kota Yogyakarta. Kedua, logika aksesibilitas, yaitu koneksi Ring Road Selatan, Jalan Wonosari, dan Jalan Imogiri Timur. Ketiga, logika retensi belanja, yaitu peluang menahan sebagian konsumsi masyarakat Bantul agar tidak seluruhnya terserap oleh pusat belanja di wilayah lain. Namun, prioritas ini harus tetap diuji melalui RDTR, status lahan, kapasitas jalan, pola keluar-masuk kendaraan, dan jarak terhadap pasar rakyat. Dalam konteks konsep pengembangan, model mal yang lebih tepat untuk Bantul bukan mal premium konvensional yang berdiri sebagai enclave komersial. Model yang lebih sesuai adalah mall lifestyle berbasis ekonomi lokal. Konsep ini menempatkan mal sebagai ruang keluarga, kuliner, komunitas, ekonomi kreatif, dan etalase produk lokal. Tenant modern tetap diperlukan untuk menarik pengunjung, tetapi harus dikombinasikan dengan UMKM, kriya, fashion lokal, kuliner Bantul, event komunitas, dan ruang publik. Dengan pendekatan ini, pusat perbelanjaan tidak hanya menjadi ruang konsumsi, tetapi menjadi platform ekonomi lokal.

Pagar regulasi daerah memperkuat kebutuhan akan konsep yang inklusif. Perda Bantul Nomor 21 Tahun 2018 menegaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas, infrastruktur, permukiman, serta keberadaan pasar rakyat dan usaha kecil di sekitarnya. Perbup Bantul Nomor 131 Tahun 2020 juga menekankan rencana kemitraan dengan usaha mikro dan kecil serta penempatan merek lokal di lokasi strategis. Dengan demikian, ruang UMKM tidak boleh hanya menjadi formalitas perizinan atau ditempatkan di area yang sepi. UMKM perlu ditempatkan di area strategis seperti lobi, atrium, pintu masuk, dan koridor utama agar memperoleh traffic yang nyata. Risiko utama yang harus diantisipasi adalah crowding-out terhadap pasar rakyat dan toko kecil,

kemacetan, beban parkir, oversupply ritel, ketidaksesuaian tata ruang, dan rendahnya manfaat lokal apabila mal menjadi enclave komersial. Risiko tersebut dapat dimitigasi melalui tenant mix yang berpihak pada ekonomi lokal, kewajiban kemitraan UMK, kurasi produk, event lokal, Andalalin, manajemen parkir, screening RDTR, AMDAL atau UKL-UPL, serta konsultasi publik. Dengan demikian, pengembangan mal perlu ditempatkan sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar proyek properti.

RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang menjadi instrumen pertama yang harus diuji karena menentukan apakah zona lahan dapat digunakan untuk pusat perdagangan dan jasa. Andalalin atau Analisis Dampak Lalu Lintas diperlukan untuk mengukur tambahan kendaraan, kebutuhan parkir, akses masuk-keluar, dan rekayasa lalu lintas. AMDAL atau UKL-UPL diperlukan untuk memastikan dampak lingkungan seperti sampah, air limbah, drainase, kebisingan, dan perubahan kawasan dapat dikelola. Ketiga instrumen ini menunjukkan bahwa pasar yang kuat harus tetap dikunci dengan kehati-hatian tata ruang, lalu lintas, dan lingkungan.

Penekanan pada Banguntapan sebagai koridor prioritas juga konsisten dengan berbagai penelitian mengenai pemilihan lokasi pusat perbelanjaan yang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah mal merupakan hasil interaksi antara karakteristik pasar, aksesibilitas, dan lingkungan perkotaan. Teller & Reutterer (2008) menjelaskan bahwa daya tarik pusat perbelanjaan tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran pasar, tetapi juga oleh kemudahan akses, keragaman tenant (*tenant mix*), serta kemampuan pusat perbelanjaan menciptakan pengalaman berbelanja yang berbeda dibandingkan kompetitornya. Bagi industri mal, indikator ini penting karena model bisnis pusat perbelanjaan kontemporer tidak hanya bertumpu pada transaksi ritel, tetapi juga pada kuliner, rekreasi keluarga, komunitas, dan pengalaman ruang [10][14]. Sementara itu, Anselmsson (2006) menemukan bahwa kenyamanan akses, kualitas lingkungan belanja, dan kelengkapan fasilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih pusat perbelanjaan. Dengan demikian, posisi Banguntapan yang memiliki konektivitas tinggi menuju Kota Yogyakarta dan didukung jaringan jalan utama memberikan keunggulan kompetitif yang tidak hanya berasal dari jumlah penduduk, tetapi juga dari kemudahan mobilitas konsumen.

Di sisi lain, literatur mengenai *retail agglomeration* menunjukkan bahwa keberadaan pusat perbelanjaan modern tidak selalu menimbulkan dampak negatif terhadap usaha lokal apabila dirancang secara komplementer. Guy (1998) menjelaskan bahwa pusat ritel modern dapat meningkatkan aktivitas ekonomi kawasan melalui efek aglomerasi, yaitu meningkatnya arus pengunjung yang pada akhirnya menciptakan peluang pasar bagi usaha di sekitarnya. Temuan tersebut diperkuat oleh Wrigley & Lowe (2014) yang menyatakan bahwa hubungan antara ritel modern dan usaha kecil lebih ditentukan oleh pola integrasi dibandingkan sekadar keberadaan pusat perbelanjaan itu sendiri. Oleh karena itu, konsep *lifestyle mall* berbasis ekonomi lokal yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat karena mengintegrasikan tenant modern dengan UMKM, ruang komunitas, dan produk lokal sehingga hubungan yang tercipta bersifat saling melengkapi (*complementary*) daripada saling menggantikan (*substitutive*).

Lebih lanjut, pendekatan tersebut juga sejalan dengan paradigma pembangunan ekonomi lokal (*local economic development*) yang menempatkan investasi swasta sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah. Menurut Leigh & Blakely (2013), keberhasilan suatu proyek komersial tidak hanya diukur dari nilai investasi maupun peningkatan konsumsi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keterkaitan (*local linkages*) dengan pelaku usaha lokal, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi wilayah. Dengan demikian, rekomendasi agar tenant modern dikombinasikan dengan UMKM, produk kriya, kuliner khas Bantul, dan ruang komunitas tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi daerah, tetapi juga mencerminkan strategi pembangunan yang mampu memperluas manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

3.3 Implikasi Penelitian

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar awal bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyusun tahapan kebijakan yang lebih aman. Tahap pertama adalah *screening* koridor prioritas, terutama Banguntapan-Ring Road Selatan, dengan menilai RDTR, pasar rakyat sekitar, status lahan, akses, dan risiko awal. Tahap kedua adalah studi demand dan tapak melalui survei pengunjung, *catchment area*, kompetisi pusat belanja, dan preferensi tenant. Tahap ketiga adalah studi teknis-finansial yang mencakup NPV, IRR, okupansi, proyeksi sewa, Andalalin, dan kajian lingkungan. Tahap keempat adalah desain kemitraan UMKM, konsultasi publik, dan persyaratan investor.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pembacaan kelayakan mal dari sekadar properti komersial menjadi instrumen tata kelola ekonomi wilayah. Kontribusi utama penelitian adalah menyusun kerangka *pre-feasibility* yang menghubungkan permintaan pasar, lokasi, regulasi, risiko, dan ekonomi lokal pada wilayah periurban yang belum memiliki mal berskala besar. Kerangka ini dapat digunakan pada daerah lain yang menghadapi persoalan serupa, terutama daerah penyangga kota besar yang mengalami kebocoran konsumsi tetapi tetap perlu menjaga pasar rakyat dan UMKM.

Keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang indikatif. Penelitian ini belum melakukan survei primer terhadap masyarakat dan calon tenant, belum menghitung kelayakan finansial investor, belum melakukan pemodelan lalu lintas, serta belum menguji lokasi pada level bidang tanah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan melakukan survei *willingness to visit*, analisis catchment area dengan model spasial, studi kelayakan finansial, pemetaan jarak pasar rakyat, Andalalin, serta AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi indikatif untuk masuk ke tahap studi lanjutan pengembangan mal. Indikator utama yang mendukung kesimpulan tersebut adalah pertumbuhan PDRB riil yang konsisten, jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa, proporsi belanja non makanan sebesar 56,44 persen, serta konsentrasi penduduk di koridor utara yang terhubung dengan Kota Yogyakarta. Koridor Banguntapan-Ring Road Selatan-Jalan Wonosari/Imogiri Timur menjadi prioritas makro paling kuat, diikuti Sewon dan Kasihan. Namun, rekomendasi tersebut masih berada pada level koridor, bukan pada titik tapak akhir. Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Status akhir kajian adalah layak indikatif dan bersyarat, sehingga tindak lanjut yang disarankan adalah penyusunan studi teknis-finansial, RDTR screening, kajian status lahan, Andalalin, AMDAL atau UKL-UPL, konsultasi publik, serta desain kemitraan UMKM. Model yang paling sesuai untuk Bantul adalah *community-lifestyle mall* berbasis ekonomi lokal, yaitu pusat aktivitas keluarga, kuliner, UMKM, kreativitas, komunitas, serta retensi belanja lokal. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan mal dapat diarahkan sebagai simpul komplementer yang memperkuat, bukan menggantikan, ekonomi lokal Bantul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta seluruh pihak yang telah memberikan ruang pembelajaran, masukan, dan dukungan akademik dalam penyusunan kajian Program Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PLPKM) ini.

REFERENSI

- [1] Acacia, R., Tjung, L. J., & Wirawati, S. (2020). STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN MALL BARU DI KOTA HARAPAN INDAH. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(2), 2841. <https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8851>
- [2] Anselmsson, J. (2006). Sources of customer satisfaction with shopping malls: A comparative study of different customer segments. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 16(1), 115–138. <https://doi.org/10.1080/09593960500453641>
- [3] Bantul, B. P. S. K. (n.d.). *Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul, 2024—Tabel Statistik*. Retrieved August 6, 2026, from <https://bantulkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NzkwIzE=/jumlah-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk--menurut-kecamatan-di-kabupaten-bantul--2024---.html>
- [4] Christaller, W., & Baskin, C. W. (1966). *Central places in Southern Germany*. Prentice-Hall.
- [5] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). Portal Data APBD: Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- [6] Firman, T. (2009). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of Jakarta–Bandung Region (JBR) development. *Habitat International*, 33(4), 327–339. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.005>
- [7] Guy, C. M. (1998). Controlling New Retail Spaces: The Impress of Planning Policies in Western Europe. *Urban Studies*, 35(5–6), 953–979. <https://doi.org/10.1080/0042098984637>

- [8] Huff, D. L. (1964). Defining and estimating a trading area. *Journal of Marketing*, 28, 34–38.
- [9] Khosravian, J., Qureshi, S., Rostamzadeh, S., Moradi, B., Derakhshesh, P., Yousefi, S., Jamali, K., Ahmadi, R., & Nickraves, F. (2024). Evaluating the feasibility of constructing shopping centers on urban vacant land through a spatial multi-criteria decision-making model. *Frontiers in Sustainable Cities*, 6, 1373331. <https://doi.org/10.3389/frsc.2024.1373331>
- [10] Krey, N., Picot-Coupey, K., & Cliquet, G. (2022). Shopping mall retailing: A bibliometric analysis and systematic assessment of Chebat's contributions. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 64, 102702. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102702>
- [11] Krugman, P. (1992). *Geography and trade*. (Original work published MIT Press)
- [12] Leigh, N. G., & Blakely, E. J. (2013). *Planning local economic development: Theory and practice* (5. ed). Sage Publ.
- [13] Lontoc, D. J., Arellano, A., & Baquiran, R. (2023). SHOPPING MALL AS NEW URBAN CORE? A MORPHOLOGICAL STUDY OF CONTEMPORARY URBAN FABRIC INFLUENCED BY SHOPPING MALLS. *JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBANISM*, 47(2), 114–124. <https://doi.org/10.3846/jau.2023.17677>
- [14] Mahmud, I., Ahmed, S., Sobhani, F. A., Islam, M. A., & Sahel, S. (2023). The Influence of Mall Management Dimensions on Perceived Experience and Patronage Intentions in an Emerging Economy. *Sustainability*, 15(4), 3258. <https://doi.org/10.3390/su15043258>
- [15] Marshall, A., & Guillebaud, C. W. (1961). *Principles of economics* (Vol. 1). (Original work published Macmillan)
- [16] Nelson, R. L., & Curtis, A. (1958). *The selection of retail locations*. (Original work published FW Dodge Corporation)
- [17] *Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 98*. (n.d.). JDIH Kabupaten Bantul. Retrieved August 6, 2026, from <https://jdih.bantulkab.go.id/produkhukum/detail.html/2349/peraturan-bupati-tahun-2019-nomor-98>
- [18] *PERBUP Kab. Bantul No. 131 Tahun 2020*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved August 6, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/265099/perbup-kab-bantul-no-131-tahun-2020>
- [19] *PERDA Kab. Bantul No. 9 Tahun 2021*. (n.d.). Retrieved August 6, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/197777/perda-kab-bantul-no-9-tahun-2021>
- [20] *Perda Kab. Bantul No. 21 Tahun 2018*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved August 6, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/317019/perda-kab-bantul-no-21-tahun-2018>
- [21] *Portal Data SIKD*. (n.d.). Retrieved August 7, 2026, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=8&tahun=2026&provinsi=12&pemda=01>
- [22] Priemus, H., & Zonneveld, W. (2003). What are corridors and what are the issues? Introduction to special issue: the governance of corridors. *Journal of Transport Geography*, 11(3), 167–177. [https://doi.org/10.1016/S0966-6923\(03\)00028-0](https://doi.org/10.1016/S0966-6923(03)00028-0)
- [23] *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Provinsi D.I. Yogyakarta—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta*. (2025). <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTUwIzI=/produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-kabupaten-kota-atas-dasar-harga-konstan-provinsi-d-i--yogyakarta.html>
- [24] Reilly, W. J. (1953). *The law of retail gravitation*.
- [25] Sutika, I. K., Wiksuana, I. G. B., & Artini, L. G. S. (2017). *STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN COKROAMINOTO*.
- [26] Sugema, V., & Erie, F. (2018). Alternative Determination Of Government Commercial Asset Optimization Based On Market Analysis: A Case Study On Shopping Center Properties In Cilegon City–Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*.
- [27] Teller, C., & Reutterer, T. (2008). The evolving concept of retail attractiveness: What makes retail agglomerations attractive when customers shop at them? *Journal of Retailing and Consumer Services*, 15(3), 127–143. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2007.03.003>
- [28] Wrigley, N., & Lowe, M. (2014). *Reading retail: A geographical perspective on retailing and consumption spaces*. Routledge.
- [29] Zhou, R., Wang, C., Bao, D., & Xu, X. (2024). Shopping Mall Site Selection Based on Consumer Behavior Changes in the New Retail Era. *Land*, 13(6), 855. <https://doi.org/10.3390/land13060855>

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Farkhan Faddlurokhman, S.Tr.IP., M.Ec.Dev
 Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 4 Maret 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Wonosobo, Jawa Tengah
 HP/WA : -
 Email : muhammadfarkhanfadhluokhman2000@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul



Nama : Dewa Anggara, S.Tr.IP., M.Ec.Dev
 Tempat, Tanggal Lahir : Marau, 13 Maret 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Ketapang, Kalimantan Barat
 HP/WA : -
 Email : dewaanggara1998@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul



Nama : Ryan Faturrahman, S.IP., M.Ec.Dev
 Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 30 Desember 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Batam, Kepulauan Riau
 HP/WA : 081364416581
 Email : ryanfaturrahman@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul



Nama : Hendy Fauzi, S.Tr.IP., M.Ec.Dev
 Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Kota Tangerang, Banten
 HP/WA : -
 Email : hendyfauzi@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul



Nama : Sisilia Dorcelina Sapranim, S.IP., M.Ec.Dev
 Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 10 Desember 1989
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Jayapura, Papua
 HP/WA : -
 Email : sisiliadorcelinasapranim@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul



Nama : Latifatul Isyarah, S.E., M.Ec.Dev
 Tempat, Tanggal Lahir : Datara, 4 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Gowa, Sulawesi Selatan
 HP/WA : -
 Email : latifatulisyarah@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal Berbasis Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul



Nama : Adinda Salshabilla Zhauzha Huda, S.E., M.Ec.Dev
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 8 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas
Gadjah Mada
Instansi : Universitas Gadjah Mada
Alamat : Indramayu, Jawa Barat
HP/WA : -
Email : adindasalshabillazha@mail.ugm.ac.id
Judul Artikel : Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal
Berdasarkan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul



Nama : Arifa Farhani, S.Tr.IP., M.Ec.Dev
Tempat, Tanggal Lahir : Takengon, 5 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas
Gadjah Mada
Instansi : Universitas Gadjah Mada
Alamat : Aceh Tengah, Aceh
HP/WA : -
Email : arifafarhani@mail.ugm.ac.id
Judul Artikel : Analisis Kelayakan Indikatif Pengembangan Mal
Berdasarkan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bantul



Bantul

Jurnal Riset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Bantul

ISSN : 1412-8519 (media cetak)

ISSN : 2829-2227 (media online)

JRD

Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul

Shaula Rizky Sarlita^{1✉}, Hafifuddin², Fikran Hadi Azryan³, Firdausa Kumala Sari⁴, Juevana Putri⁵, Ilfa Fauzia Asra⁶, Wina Nurfaidah⁷

¹Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

✉shaularizkysarlita@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Submitted : July 2026

Revised : Augst 2026

Published : Sept 2026

KEYWORDS

GAMPIL

Perizinan Usaha

UMKM

Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bantul

ABSTRAK

Digitalisasi pelayanan perizinan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas formalisasi usaha dan memperkuat kapasitas penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL) dalam mendukung formalisasi usaha dan optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan. Objek kajian meliputi implementasi layanan perizinan, karakteristik pelaku usaha, struktur usaha, dan kontribusi retribusi perizinan terhadap penerimaan daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Satu Data Bantul, *Dashboard Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), serta regulasi nasional yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Data dianalisis melalui telaah dokumen (*document anaylsis*) dan interpretasi data sekunder. Analisis tersebut diperkaya dengan observasi lapangan terbatas, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan selama satu hari dalam kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh gambaran konstektual mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan dan bukan sumber data utama dalam penelitian. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa GAMPIL berkontribusi dalam memperluas akses perizinan dan mendorong peningkatan pelaku usaha formal, dari 2.774 unit pada 2021 menjadi 24.594 unit pada 2023. Namun, peningkatan jumlah usaha yang memiliki izin belum diikuti dengan penerimaan daerah yang proporsional. Struktur usaha mikro masih mendominasi di Kabupaten Bantul dengan jumlah 79.898 unit atau 97 persen dari total usaha yang tercatat, sehingga kapasitas kontribusi fiskal masih terbatas. Retribusi perizinan masih berada pada kisaran Rp 1,9 miliar hingga Rp 2,3 miliar per tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan perlu diikuti integrasi data, pembinaan pasca-izin, dan monitoring kepatuhan agar legalitas usaha menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.

Dengan demikian, GAMPIL perlu dikembangkan sebagai tata kelola ekonomi daerah yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

ABSTRACT

The digitalization of licensing services plays a crucial role for local governments in expanding business formalization and strengthening local revenue capacity. This study aims to evaluate the Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL—Direct Licensing Service Movement) innovation in supporting business formalization and optimizing local revenue in Bantul Regency. The study employs a descriptive quantitative approach combined with policy analysis methods. The scope of the study covers the implementation of licensing services, business operator characteristics, business structure, and the contribution of licensing fees to local revenue. Secondary data were obtained from official documents provided by Statistics Indonesia (BPS) of Bantul Regency, the Bantul Regency Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP), the Regional Budget (APBD) documents, the "Satu Data Bantul" (Bantul One Data) portal, the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dashboard, and national regulations concerning licensing services and fiscal relations between central and local governments. Data analysis was conducted through document review and the interpretation of secondary data. This analysis was further enriched by limited field observation—specifically, a one-day direct observation conducted during the Field Learning and Community Service (PLPKM) program within the Bantul Regency Government. Field observations served to provide a contextual overview of licensing service implementation rather than acting as the primary data source for the study. The findings indicate that GAMPIL has contributed to expanding access to licensing and driving an increase in formal business operators, rising from 2,774 units in 2021 to 24,594 units in 2023. However, the increase in the number of licensed businesses has not been matched by a proportional rise in local revenue. Micro-enterprises continue to dominate the business landscape in Bantul Regency, accounting for 79,898 units—or 97 percent of all registered businesses—thereby limiting fiscal contribution capacity. Licensing fee revenue remains within the range of IDR 1.9 billion to IDR 2.3 billion per year. These findings indicate that the digitalization of licensing must be accompanied by data integration, post-licensing support, and compliance monitoring to ensure that business legalization serves as an instrument for strengthening the local economy. Consequently, GAMPIL needs to be developed into a more integrated and data-driven system of local economic governance.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah penggerak ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I Yogyakarta). Secara geografis, Kabupaten Bantul berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, yang membuat Bantul menjadi bagian integral dari dinamika sosial dan ekonomi Yogyakarta secara keseluruhan. Selama beberapa tahun terakhir, sektor pertanian merupakan salah satu lapangan usaha yang menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul. Meskipun sektor pertanian masih secara konsisten menjadi penyumbang utama PDRB, terjadi pergeseran struktur ekonomi yang cukup signifikan ke arah kelompok nonpertanian. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu penggerak utama dalam aktivitas ekonomi daerah, seperti perdagangan, industri rumah tangga, kuliner, pariwisata, dan jasa, yang menunjukkan peran yang semakin besar terhadap perekonomian. UMKM di Kabupaten Bantul yang

tersebar di berbagai bidang usaha, terutama sejumlah sentra industri kreatif seperti Kasongan serta destinasi pariwisata seperti Parangtritis dan Pantai Pandansimo, mendorong pertumbuhan usaha akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, serta jasa lainnya. Keberadaan para pelaku usaha UMKM ini tidak hanya membuka kesempatan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendukung penerimaan daerah apabila kegiatan usaha tersebut tercatat dan terintegrasi dalam sistem formal.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bantul, struktur pelaku usaha di Kabupaten Bantul didominasi oleh usaha mikro. Tercatat sebesar 97,02 persen atau sebanyak 78.898 pelaku usaha yang tercatat merupakan usaha mikro dari keseluruhan basis usaha formal. Sementara itu, usaha kecil berjumlah 1.868 pelaku usaha atau 2,27 persen, usaha besar sebanyak 389 pelaku usaha atau 0,47 persen, dan usaha menengah sebanyak 190 pelaku usaha atau 0,23 persen. Besarnya proporsi pelaku usaha mikro yang mendominasi struktur usaha di Kabupaten Bantul ini menunjukkan dominasi dari sisi jumlah, akan tetapi, kondisi ini belum selalu diikuti oleh kapasitas usaha yang memadai. Pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, kapasitas produksi, jaringan pasar, serta legalitas usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan agar usaha mikro dapat berkembang dan terhubung dengan sistem ekonomi formal. Dukungan tersebut umumnya diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan intervensi strategis, yang mencakup formalisasi usaha, perbaikan lingkungan usaha, pelatihan dan pendampingan, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan dan inovasi [1].

Mengingat besarnya jumlah pelaku usaha, penyediaan layanan perizinan yang mudah, cepat dan terjangkau menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman maupun kemampuan yang sama dalam memanfaatkan layanan digital. Masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala, seperti kurangnya informasi, keterbatasan sarana pendukung, hingga kesulitan memahami prosedur perizinan yang berlaku. Oleh karena itu, transformasi digital dalam pelayanan perizinan ini tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem elektronik. Tetapi juga diperlukan intervensi berupa inovasi layanan proaktif yang dapat memberikan pendampingan secara langsung dan menjangkau para pelaku usaha secara lebih luas.

Berbagai studi terdahulu telah dilakukan untuk menemukan solusi guna mendorong usaha mikro untuk dapat berkembang. Diketahui sebagian besar usaha mikro di beberapa negara berkembang masih beroperasi secara informal, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi untuk menyederhanakan dan menurunkan biaya proses formalisasi usaha [2]. Pendekatan yang paling sering digunakan yaitu strategi formalisasi melalui kemudahan perizinan usaha. Pemerintah di berbagai negara mendorong formalisasi usaha melalui berbagai intervensi, dimulai dari penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha hingga penguatan penegakan hukum [3]. Surat izin usaha sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM karena dapat mempermudah pengajuan kredit, memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, hingga mendapatkan jaminan hukum karena sudah memiliki legalitas resmi yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan usaha [4]. Di Indonesia, proses perizinan usaha telah diintegrasikan melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha. Kehadiran sistem OSS ini menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya cukup panjang karena para pelaku usaha tidak lagi mendatangi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terpisah untuk mengurus berbagai jenis perizinan. Sehingga kegiatan usaha dapat segera dilakukan, sementara para pelaku usaha tetap dapat melengkapi persyaratan teknis lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dokumen terkait izin lingkungan, maupun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) [5]. Selain memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, layanan perizinan ini juga dapat membantu pemerintah daerah. Data yang diperoleh melalui proses perizinan dapat memberikan gambaran terkait jumlah, skala, dan sektor usaha yang berkembang di suatu daerah. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, pemetaan aktivitas ekonomi serta identifikasi potensi penerimaan daerah. Dalam konteks ini, penerimaan retribusi perizinan merupakan salah satu bentuk kontribusi kegiatan layanan perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun demikian, peningkatan jumlah pelaku usaha yang terdaftar belum dapat dijadikan indikator bahwa inovasi pelayanan telah berjalan secara optimal. Pelaksanaan inovasi perlu dilihat dari kemampuannya dalam memperluas jangkauan pelayanan, mempermudah proses perizinan, dan meningkatkan keteraturan data usaha. Kajian terkait formalisasi usaha sejauh ini cenderung berfokus pada penyederhanaan prosedur dan manfaat perolehan legalitas usaha. Namun demikian, efektivitas kebijakan perizinan di tingkat daerah perlu ditinjau untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu

menjangkau pelaku usaha dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membahas pelaksanaan inovasi pelayanan tetapi juga mengaitkannya dengan karakteristik pelaku usaha serta dampaknya terhadap penerimaan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran pelayanan perizinan dalam mendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) dalam kerangka kegiatan PLPKM dalam mendukung digitalisasi layanan perizinan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan struktur pelaku usaha berdasarkan skala dan sektor serta membandingkan penerimaan retribusi perizinan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah diskursus terkait inovasi pelayanan publik, digitalisasi perizinan dan tata kelola penerimaan daerah. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif dalam memperluas jangkauan serta kualitas layanan perizinan, menyempurnakan basis data pelaku usaha, dan mengoptimalkan kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam merancang pengembangan inovasi pelayanan perizinan di masa mendatang.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif melalui metode analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi Program GAMPIL, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta merumuskan alternatif kebijakan guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Analisis dilakukan melalui telaah dokumen (*document analysis*) terhadap berbagai data sekunder yang diperkaya dengan observasi lapangan terbatas, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan selama satu hari kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, guna memperoleh gambaran awal mengenai pelaksanaan Program GAMPIL di lapangan. Observasi ini turut dilengkapi dengan diskusi bersama pihak terkait selama kegiatan PLPKM tersebut. Kombinasi kedua sumber data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi empiris daerah. Pendekatan analisis kebijakan banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik karena mampu menjelaskan proses implementasi kebijakan dalam konteks organisasi pemerintahan serta mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti [6], [7], [8], [9], [10].

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kasus di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Bantul merupakan pencetus dan pengembang tunggal inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL) yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul [11]. Inovasi ini merupakan transformasi dari program "Paket Sari" yang dikembangkan sejak tahun 2021 untuk mengintegrasikan pendampingan perizinan berbasis OSS-RBA sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 [12]. Selain itu, struktur perekonomian Kabupaten Bantul didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga menjadikan daerah ini relevan untuk mengkaji hubungan antara digitalisasi layanan perizinan, formalisasi usaha, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian memanfaatkan data periode 2021–2026, yaitu sejak implementasi OSS-RBA hingga perkembangan terkini Program GAMPIL, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan dan implikasinya terhadap pengelolaan fiskal daerah [13].

2.2 Subjek atau Objek dan Instrumen Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Program GAMPIL sebagai inovasi pelayanan perizinan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta keterkaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis penelitian difokuskan pada mekanisme pelayanan perizinan, karakteristik pelaku usaha, perkembangan legalitas usaha, struktur penerimaan daerah, serta keterkaitan antara layanan perizinan dengan potensi peningkatan penerimaan daerah. Data penelitian diperoleh dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, dokumen APBD, Satu Data Bantul, *Dashboard OSS-*

RBA, serta regulasi nasional terkait pelayanan perizinan dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman telaah dokumen dan lembar pencatatan data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan implementasi Program GAMPIL. Selain itu, informasi pendukung diperoleh melalui observasi dan diskusi dalam kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) bersama perangkat daerah terkait. Validitas data dijaga melalui proses triangulasi teknik (metode), yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui telaah dokumen, observasi lapangan, dan diskusi, guna memastikan konsistensi temuan antar metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, triangulasi sumber juga dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi dan data statistik untuk memperkuat keakuratan data sekunder yang digunakan.

2.3 Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan implementasi Program GAMPIL dan keterkaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul melalui studi literatur dan telaah dokumen kebijakan. Tahap kedua dilakukan melalui kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan digital melalui observasi, pemaparan program, dan diskusi dengan perangkat daerah terkait. Tahap ketiga dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti publikasi BPS, *Dashboard* OSS-RBA, laporan DPMPTSP Kabupaten Bantul, dokumen APBD, Satu Data Bantul, regulasi, dan literatur ilmiah. Selain itu, peneliti melakukan permintaan data pendukung kepada DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk melengkapi informasi terkait implementasi Program GAMPIL. Tahap akhir mencakup proses analisis data, penyusunan *policy paper*, serta validasi hasil kajian melalui seminar bersama Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan rekomendasi kebijakan.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*) dan analisis isi (*content analysis*). Data statistik mengenai Pendapatan Asli Daerah dan retribusi daerah bersumber dari Satu Data Bantul, sedangkan data jumlah pelaku usaha dan distribusi sektor usaha bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul serta *dashboard Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 4 Agustus 2021-9 Maret 2026. Data implementasi OSS-RBA turut diperoleh dari sumber yang sama. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi empiris Kabupaten Bantul. Selanjutnya dilakukan identifikasi kesenjangan implementasi kebijakan, faktor penyebab permasalahan, serta alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan karakteristik daerah. Untuk memilih alternatif kebijakan yang direkomendasikan, peneliti melakukan evaluasi pada setiap alternatif kebijakan menggunakan lima kriteria penilaian; efektivitas fiskal, kelayakan implementasi, keberlanjutan, inklusivitas dan konsistensi regulasi.

Proses pengolahan data dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* untuk tabulasi data, penghitungan sederhana, dan visualisasi grafik, sedangkan *Microsoft Word* digunakan untuk penyusunan naskah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kajian mengenai evaluasi inovasi GAMPIL dalam mendukung digitalisasi layanan perizinan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Hasil kajian disajikan melalui uraian naratif, tabel, serta interpretasi terhadap data pelaku usaha, struktur usaha, dan kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Pembahasan diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara peningkatan layanan perizinan, formalisasi usaha, kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan penguatan integrasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

3.1 Hasil

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa GAMPIL telah berkontribusi dalam memperluas akses layanan perizinan dan mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha formal di Kabupaten Bantul. Data pelaku usaha menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha terdaftar, khususnya pada periode awal implementasi sistem perizinan digital. Namun demikian, peningkatan jumlah pelaku usaha berizin belum diikuti oleh peningkatan kontribusi fiskal dari sektor perizinan secara proporsional. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *output* administratif berupa jumlah izin yang diterbitkan dan *outcome* fiskal berupa peningkatan penerimaan daerah. Dengan demikian, keberhasilan GAMPIL tidak dapat hanya dinilai dari banyaknya izin yang diterbitkan, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana data perizinan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis ekonomi dan penerimaan daerah.

Data pelaku usaha menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha tercatat sebanyak 2.774 unit dan meningkat menjadi 10.318 unit pada tahun 2022. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 24.594 unit. Setelah itu, jumlah pelaku usaha menunjukkan penurunan menjadi 20.728 unit pada tahun 2024, 14.154 unit pada tahun 2025, dan 2.863 unit pada awal tahun 2026. Penurunan pada tahun 2026 perlu ditafsirkan secara hati-hati karena data tersebut belum mencakup satu tahun penuh.

Tabel 1. Tren Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Pelaku Usaha
1	2021	2.774
2	2022	10.318
3	2023	24.594
4	2024	20.728
5	2025	14.154
6	2026*	2.863

Keterangan: Data tahun 2026 merupakan data sementara hingga Maret 2026.

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah.

Selain tren jumlah pelaku usaha, hasil kajian juga menunjukkan bahwa struktur usaha di Kabupaten Bantul sangat didominasi oleh usaha mikro. Dari total 82.352 unit usaha, sebanyak 79.898 unit atau sekitar 97% merupakan usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil hanya berjumlah 1.868 unit, usaha menengah sebanyak 190 unit, dan usaha besar sebanyak 389 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem formal cukup besar, sebagian besar di antaranya memiliki kapasitas ekonomi dan kontribusi fiskal yang relatif terbatas.

Tabel 2. Distribusi Pelaku Usaha Berdasarkan Skala Usaha di Kabupaten Bantul

No	Skala Usaha	Jumlah Usaha
1	Usaha Mikro	79.898
2	Usaha Kecil	1.868
3	Usaha Menengah	190
4	Usaha Besar	389
	Total	82.352

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah.

Dari sisi fiskal, hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi perizinan terhadap PAD masih relatif terbatas. Pada periode 2021–2023, total retribusi daerah berada pada kisaran Rp27,7 miliar hingga Rp42,3 miliar, sedangkan retribusi perizinan tertentu hanya berada pada kisaran Rp1,9–2,0 miliar per tahun [14]. Pada tahun 2024, total retribusi daerah meningkat tajam menjadi sekitar Rp307,0 miliar. Namun, peningkatan tersebut terutama berasal dari retribusi jasa umum, bukan dari retribusi perizinan. Retribusi perizinan pada tahun 2024 tetap relatif kecil, yaitu sekitar Rp2,3 miliar. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah izin belum secara otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan daerah dari sektor perizinan [15].

Tabel 3. Ringkasan Retribusi Daerah dan Retribusi Perizinan Kabupaten Bantul

No	Tahun	Total Retribusi Daerah	Retribusi Perizinan
1	2021	Rp27,7 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
2	2022	Rp42,1 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
3	2023	Rp42,3 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
4	2024	Rp307,0 miliar	Rp2,3 miliar

Sumber: Data BPS Kabupaten Bantul, diolah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan data atau rendahnya jumlah usaha yang terdaftar, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan data perizinan sebagai dasar penguatan basis penerimaan daerah. Data pelaku usaha sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara terintegrasi lintas OPD. Oleh karena itu, perizinan belum berfungsi secara optimal sebagai pintu masuk untuk pembinaan usaha, pemetaan potensi fiskal, monitoring kepatuhan, dan penguatan PAD.

3.2 Pembahasan

Peningkatan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul sejak 2021 hingga mencapai puncaknya pada 2023 menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perizinan melalui GAMPIL dan sistem OSS telah berperan dalam memperluas akses pelaku usaha terhadap legalitas formal. Secara administratif, pola tersebut dapat dimaknai sebagai capaian positif karena semakin banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem perizinan daerah. Dalam kerangka teori formalisasi usaha, legalitas formal merupakan tahap awal yang memungkinkan pelaku usaha tercatat dalam sistem administrasi pemerintah. Namun, legalitas tersebut tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kontribusi ekonomi maupun fiskal apabila tidak diikuti oleh kapasitas usaha yang memadai, insentif kepatuhan, integrasi data, dan pengawasan pasca-izin. Hal ini sejalan dengan penelitian [16] yang menunjukkan bahwa intervensi pemerintah untuk mendorong formalisasi usaha kecil tidak selalu efektif apabila hanya bertumpu pada penyediaan informasi atau pengurangan biaya administratif. Dengan demikian, peningkatan jumlah usaha berizin melalui GAMPIL perlu dipahami sebagai capaian administratif yang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin peningkatan PAD secara langsung. Keterbatasan dampak fiskal tersebut juga terlihat dari rendahnya kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Meskipun jumlah pelaku usaha berizin meningkat, data retribusi menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perizinan masih relatif kecil dibandingkan total PAD maupun total retribusi daerah. Bahkan ketika total retribusi daerah meningkat secara signifikan pada tahun 2024, peningkatan tersebut lebih banyak berasal dari retribusi jasa umum, bukan dari retribusi perizinan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara output kebijakan berupa peningkatan jumlah izin dan *outcome* fiskal berupa peningkatan penerimaan daerah. Hasil ini sejalan dengan [17], yang menemukan bahwa peningkatan status formal usaha tidak otomatis meningkatkan pendapatan, keuntungan, maupun penerimaan pajak. Dalam konteks Kabupaten Bantul, data pelaku usaha memang telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai basis aktif untuk pemetaan potensi pajak, retribusi, dan kepatuhan fiskal. Oleh karena itu, perizinan baru akan memberikan kontribusi fiskal yang lebih kuat apabila data yang dihasilkan dapat dihubungkan dengan sistem penerimaan daerah secara lebih sistematis.

Hubungan antara formalisasi dan penerimaan daerah dalam kasus GAMPIL memperlihatkan bahwa dampak fiskal dari perizinan bersifat tidak langsung. Perizinan dapat memperluas jumlah usaha yang tercatat secara administratif, tetapi kontribusinya terhadap PAD bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti data tersebut ke dalam sistem fiskal dan pembinaan usaha. Hal ini sejalan dengan [18] yang menunjukkan bahwa penurunan biaya formalitas dapat mendorong sebagian

usaha informal masuk ke sektor formal, tetapi dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak selalu positif. Artinya, keberhasilan perizinan tidak cukup diukur dari peningkatan jumlah pelaku usaha berizin, tetapi juga dari sejauh mana data perizinan digunakan untuk monitoring kepatuhan, pemetaan potensi fiskal, dan koordinasi lintas OPD. Dalam konteks GAMPIL, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan perlu dilengkapi dengan mekanisme lanjutan agar data yang dihasilkan tidak berhenti pada proses penerbitan izin. Struktur pelaku usaha di Kabupaten Bantul yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil turut menjelaskan mengapa peningkatan jumlah izin belum menghasilkan peningkatan PAD yang proporsional. Dalam teori heterogenitas sektor informal dan usaha kecil, setiap pelaku usaha memiliki kapasitas yang berbeda dalam hal produktivitas, omzet, kemampuan tumbuh, serta kesanggupan memenuhi kewajiban administratif dan fiskal. [19] menegaskan bahwa sektor informal dan usaha mikro bersifat heterogen, sehingga dampak formalisasi sangat bergantung pada karakteristik dan kapasitas masing-masing unit usaha. Dengan dominasi usaha mikro, peningkatan jumlah izin di Bantul lebih banyak mencerminkan perluasan cakupan administrasi dibandingkan dengan perluasan basis fiskal yang kuat. Oleh sebab itu, keterbatasan kontribusi retribusi perizinan tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan kinerja layanan perizinan, tetapi juga sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh unit usaha berskala kecil.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh [20], yang menunjukkan bahwa manfaat formalisasi cenderung lebih besar pada usaha yang relatif lebih mapan, sedangkan dampaknya terhadap usaha yang sangat kecil lebih terbatas. Dalam konteks Kabupaten Bantul, sebagian besar pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem perizinan berada pada skala mikro, sehingga kontribusi langsungnya terhadap PAD relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD tidak cukup dilakukan melalui perluasan jumlah izin atau peningkatan pungutan retribusi. Strategi tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas, produktivitas, dan skala usaha. Dengan kata lain, GAMPIL perlu ditempatkan bukan hanya sebagai instrumen penerbitan izin, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi kebijakan pembinaan usaha yang lebih terarah. Kebutuhan untuk menghubungkan perizinan dengan pembinaan usaha juga didukung oleh penelitian [21], yang menunjukkan bahwa intervensi untuk mengurangi informalitas memiliki hasil yang beragam, bergantung pada desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan konteks kelembagaan. Sejalan dengan itu, [22], menekankan bahwa manfaat formalisasi cenderung lebih kuat apabila didukung oleh kebijakan pendamping, seperti pelatihan, layanan pengembangan usaha, dan dukungan peningkatan kapasitas. Dalam konteks GAMPIL, hal ini menunjukkan bahwa perizinan tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen peningkatan PAD. Legalitas formal perlu ditindaklanjuti melalui pembinaan pasca izin, akses pembiayaan, sertifikasi produk, perluasan pasar, dan monitoring kepatuhan agar formalisasi dapat berkembang menjadi peningkatan kapasitas ekonomi dan kontribusi fiskal.

Selain berkaitan dengan formalisasi usaha, hasil kajian ini juga dapat dipahami melalui teori transformasi digital sektor publik. Digitalisasi layanan perizinan melalui GAMPIL telah membantu memperluas akses pelayanan dan mempercepat proses administrasi perizinan. Namun, efektivitas digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya platform layanan, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut untuk mengubah proses kerja, memperkuat koordinasi, dan menghubungkan data antarlembaga. [23], menjelaskan bahwa transformasi digital sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses organisasi, pola kerja birokrasi, dan hubungan antaraktor dalam pelayanan publik. Dengan demikian, GAMPIL tidak cukup hanya dinilai sebagai inovasi teknologi, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari perubahan tata kelola perizinan daerah. Dalam konteks Kabupaten Bantul, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan data perizinan sebagai dasar koordinasi kebijakan lintas OPD. Data yang dihasilkan melalui proses perizinan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan layanan perizinan, pembinaan usaha, dan pengelolaan penerimaan daerah. Hal ini sejalan dengan [24], yang menunjukkan bahwa hambatan dalam *digital government* sering kali bersifat struktural dan kultural, bukan semata-mata teknis. Artinya, tantangan GAMPIL tidak hanya terletak pada sistem digitalnya, tetapi juga pada pola koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme pemanfaatan data antarinstansi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pelaku usaha berizin belum secara otomatis bertransformasi menjadi perluasan basis fiskal apabila tidak didukung oleh integrasi proses dan koordinasi kelembagaan yang kuat.

Pengembangan GAMPIL juga perlu diarahkan pada penciptaan nilai publik yang lebih luas. [25], menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik dapat menghasilkan nilai publik apabila melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian layanan. Dalam konteks Bantul, nilai publik dari GAMPIL tidak hanya terletak pada

percepatan penerbitan izin, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjadi basis data bagi pembinaan usaha, monitoring kepatuhan, dan penguatan sistem penerimaan daerah. Dengan demikian, digitalisasi perizinan perlu diarahkan melampaui efisiensi administratif menuju penciptaan manfaat kebijakan yang lebih luas, terutama dalam mendukung formalisasi usaha, pengembangan UMKM, dan penguatan basis penerimaan daerah. Kesenjangan antara peningkatan jumlah pelaku usaha berizin dan rendahnya kontribusi retribusi perizinan juga perlu dibaca dalam konteks regulasi fiskal daerah. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), ruang optimalisasi retribusi perizinan menjadi semakin terbatas [26]. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor perizinan tidak lagi dapat diperluas secara bebas dan lebih banyak berkaitan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak cukup ditempuh melalui optimalisasi retribusi perizinan semata. Pemerintah daerah perlu mengarahkan pemanfaatan data perizinan untuk memperluas basis penerimaan secara tidak langsung, misalnya melalui pemetaan sektor usaha potensial, penguatan kepatuhan, dan pembinaan usaha agar skala ekonomi pelaku usaha meningkat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, rendahnya kontribusi retribusi perizinan tidak semata-mata mencerminkan lemahnya kinerja GAMPIL. Kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi bahwa formalisasi usaha melalui perizinan perlu diikuti oleh integrasi data, pembinaan pasca-izin, serta penguatan monitoring kepatuhan secara lebih sistematis. Peran GAMPIL tidak hanya dapat dibatasi pada penyediaan layanan administrasi perizinan, tetapi perlu diperluas sebagai instrumen yang mendukung keterhubungan antara formalisasi usaha, pemanfaatan data perizinan, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan basis penerimaan daerah. Dalam konteks tersebut, pengembangan GAMPIL ke arah sistem yang lebih integratif menjadi penting agar data dan proses perizinan tidak berhenti pada tahap penerbitan izin, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui monitoring kepatuhan, koordinasi lintas OPD, dan perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih terarah.

3.3 Implikasi Penelitian

Secara praktis, temuan kajian ini memberikan implikasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan tata kelola perizinan yang lebih terintegrasi. GAMPIL tidak hanya dapat diposisikan sebagai instrumen pelayanan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kebijakan yang mendukung pembinaan pelaku usaha dan penguatan basis penerimaan daerah. Dalam konteks tersebut, data perizinan yang dihasilkan melalui GAMPIL perlu dimanfaatkan secara lebih strategis, antara lain untuk memetakan karakteristik pelaku usaha, mengidentifikasi sektor ekonomi prioritas, memantau kepatuhan pasca-izin, serta menghubungkan pelaku usaha dengan program pembinaan, akses pembiayaan, sertifikasi produk, dan perluasan pasar. Implikasi tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan GAMPIL. Optimalisasi dampak ekonomi dan fiskal dari perizinan tidak dapat hanya bertumpu pada DPMPTSP sebagai penyelenggara layanan perizinan. DPMPTSP dapat berperan sebagai pengelola data dan simpul awal formalisasi usaha, sementara Bapenda berperan dalam pemanfaatan data untuk penguatan basis pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM dapat mengarahkan data tersebut untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha, sedangkan Dinas Kominfo mendukung integrasi sistem digital dan interoperabilitas data. Dengan demikian, integrasi yang dimaksud tidak selalu harus dimaknai sebagai penyatuan anggaran, tetapi dapat diwujudkan melalui integrasi data, koordinasi program, pembagian peran kelembagaan, serta penyusunan indikator kinerja bersama.

Namun demikian, pengembangan pendekatan integratif perlu dirancang secara bertahap dan realistis. Tantangan koordinasi kelembagaan, kapasitas fiskal, ketersediaan anggaran, serta kesiapan sumber daya manusia perlu menjadi bagian dari pertimbangan agar rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks transformasi digital sektor publik, [23], menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga menuntut perubahan proses organisasi, pola kerja birokrasi, serta mekanisme koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, penguatan GAMPIL sebagai sistem integratif perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanfaatan data yang telah tersedia, pemetaan potensi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), identifikasi sektor usaha prioritas, serta pembentukan forum koordinasi lintas OPD. Tahap berikutnya dapat diarahkan pada pengembangan sistem integrasi data, penguatan mekanisme monitoring kepatuhan, dan pelaksanaan program pembinaan usaha berbasis data perizinan. Pendekatan bertahap tersebut sejalan dengan [27], yang menekankan pentingnya kapasitas dinamis sektor publik dalam merancang, menyesuaikan, dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. [28] juga menunjukkan bahwa kapasitas

sektor publik mencakup kemampuan untuk beradaptasi, belajar, mengelola data dan platform digital, serta menyelaraskan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan integratif tidak hanya menjadi gagasan normatif, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam agenda kebijakan yang lebih operasional dan sesuai dengan kapasitas daerah. Secara teoretis, kajian ini memperkuat literatur mengenai digitalisasi pelayanan publik, formalisasi usaha, dan desentralisasi fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan daerah apabila tidak didukung oleh integrasi kelembagaan dan keterhubungan dengan sistem fiskal. [24] menunjukkan bahwa hambatan *digital government* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur organisasi, budaya birokrasi, dan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks fiskal, [29] menunjukkan bahwa inovasi teknologi dalam administrasi pajak dapat meningkatkan penerimaan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada respons wajib pajak dan kapasitas administrasi. [30] juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat mengurangi biaya kepatuhan dan peluang korupsi, tetapi dampaknya sangat bergantung pada desain implementasi dan kesiapan institusi. Oleh karena itu, kontribusi GAMPIL terhadap penguatan PAD perlu dipahami sebagai proses kelembagaan yang membutuhkan integrasi data, monitoring kepatuhan, dan koordinasi lintas OPD secara berkelanjutan.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis yang digunakan masih bersifat deskriptif sehingga belum dapat mengukur dampak kausal GAMPIL terhadap peningkatan PAD. Kedua, data tahun 2026 belum mencakup satu tahun penuh, sehingga interpretasi terhadap perubahan jumlah pelaku usaha pada tahun tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, kajian ini belum menganalisis data pada level pelaku usaha secara lebih rinci, seperti omzet, status kepatuhan pajak, pembaruan izin, keterlibatan dalam program pembinaan, serta kontribusi masing-masing usaha terhadap penerimaan daerah. Keempat, analisis fiskal masih berfokus pada hubungan antara perizinan, retribusi, dan PAD, sehingga belum sepenuhnya menangkap dampak tidak langsung dari formalisasi usaha terhadap sumber penerimaan daerah lainnya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, kajian lanjutan disarankan untuk menggunakan data mikro pelaku usaha agar hubungan antara status perizinan, skala usaha, kepatuhan fiskal, dan kontribusi terhadap PAD dapat dianalisis secara lebih mendalam. Kajian berikutnya juga dapat mengembangkan evaluasi berbasis wilayah dengan membandingkan kapanewon yang memiliki konsentrasi usaha tinggi, seperti Banguntapan, Kasihan, dan Sewon, dengan wilayah yang memiliki tingkat formalisasi lebih rendah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas *pilot project* integrasi data dan pembinaan usaha pasca izin untuk menilai sejauh mana pendekatan integratif mampu meningkatkan kepatuhan, produktivitas usaha, dan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan GAMPIL berkontribusi untuk memperluas akses pelayanan perizinan dan mendorong formalisasi usaha di Kabupaten Bantul. Jumlah pelaku usaha meningkat dari 2.774 unit pada 2021 hingga 2023 menjadi 24.594 unit. Namun, kenaikan jumlah usaha tersebut belum diikuti oleh kenaikan penerimaan daerah secara proporsional. Struktur usaha di Bantul didominasi oleh kelompok usaha mikro, yakni 79.898 unit dari 89.352 unit usaha atau sekitar 97 persen. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa jumlah izin yang meningkat belum secara langsung meningkatkan PAD secara signifikan. Retribusi perizinan masih relatif kecil, yaitu kisaran Rp 1,9 sampai 2,3 miliar per tahun. Setelah berlakunya UU HKPD, ruang optimalisasi retribusi perizinan juga semakin terbatas, sehingga potensi penerimaan perlu diarahkan pada PBG dan pemanfaatan data perizinan untuk memperkuat basis penerimaan daerah.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa GAMPIL perlu dikembangkan sebagai tata kelola ekonomi daerah, bukan hanya sebagai layanan administrasi perizinan. Data perizinan dapat dimanfaatkan untuk pemetaan potensi usaha, pembinaan pascaizin usaha, monitoring kepatuhan, dan koordinasi OPD dalam memperkuat basis penerimaan daerah. Namun, pendekatan integratif perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kelembagaan, prioritas pembangunan daerah, kapasitas fiskal, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini masih terbatas pada analisis dan belum mengukur dampak kausal GAMPIL terhadap PAD karena data tidak tersedia lengkap dan konsisten. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan menggunakan data mikro pelaku usaha agar hubungan antar perizinan, skala usaha, kepatuhan fiskal, dan kontribusi terhadap PAD dapat dianalisis lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan dan dukungan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) dalam penelitian ini melalui kunjungan lapangan ke pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul atas kerja sama dan izin akses data yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.

REFERENSI

- [1] C. Piza *dkk.*, “The impact of business support services for small and medium enterprises on firm performance in low-and middle-income countries.” [Daring]. Tersedia pada: www.campbellcollaboration.org/lib/
- [2] M. Bruhn dan D. McKenzie, “Entry Regulation and the Formalization of Microenterprises in Developing Countries,” *World Bank Res. Obs.*, vol. 29, no. 2, hlm. 186–201, Agu 2014, doi: 10.1093/wbro/lku002.
- [3] A. Floridi, B. A. Demena, dan N. Wagner, “Shedding light on the shadows of informality: A meta-analysis of formalization interventions targeted at informal firms,” *Labour Econ.*, vol. 67, Des 2020, doi: 10.1016/j.labeco.2020.101925.
- [4] Ika Wulandari dan Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 2, hlm. 386–394, Apr 2022, doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205.
- [5] C. Yasmin, F. Gunawan, P. E. Purnamaningsih, dan K. Winaya, “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Badung,” Online. [Daring]. Tersedia pada: <https://lgdpublishing.org/index.php/birev>
- [6] A. Omar, V. Weerakkody, dan A. Daowd, “Studying Transformational Government: A review of the existing methodological approaches and future outlook,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 37, no. 2, hlm. 101458, Apr 2020, doi: 10.1016/j.giq.2020.101458.
- [7] N. K. Kayesa dan M. Shung-King, “The role of document analysis in health policy analysis studies in low and middle-income countries: Lessons for HPA researchers from a qualitative systematic review,” *Health Policy Open*, vol. 2, hlm. 100024, Des 2021, doi: 10.1016/j.hopen.2020.100024.
- [8] B. Van Haelter, D. Vos, dan J. Voets, “Drivers of reform implementation in local government: a qualitative comparative analysis,” *Public Money & Management*, vol. 43, no. 2, hlm. 174–182, Feb 2023, doi: 10.1080/09540962.2021.1959714.
- [9] D. Polman dan G. Alons, “Reap what you sow: implementing agencies as strategic actors in policy feedback dynamics,” *Policy Sci.*, vol. 54, no. 4, hlm. 823–848, Des 2021, doi: 10.1007/s11077-021-09436-0.
- [10] H. L. Bullock, J. N. Lavis, M. G. Wilson, G. Mulvale, dan A. Miatello, “Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis,” *Implementation Science*, vol. 16, no. 1, hlm. 18, Des 2021, doi: 10.1186/s13012-021-01082-7.
- [11] D. P. M. dan P. T. S. P. K. Bantul, “Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bantul Tahun 2023,” DPMPTSP Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, 2023.
- [12] P. R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021.

- [13] D. P. M. dan P. T. S. P. K. Bantul, “Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029,” DPMPTSP Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, 2025.
- [14] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, “Data pelaku usaha Kabupaten Bantul tahun 2021–2026,” Bantul, 2026.
- [15] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bantul menurut jenis pendapatan (ribu rupiah), 2021–2024,” Bantul, 2024.
- [16] G. H. de Andrade, M. Bruhn, dan D. McKenzie, “A Helping Hand or the Long Arm of the Law? Experimental Evidence on What Governments Can Do to Formalize Firms,” *World Bank Econ. Rev.*, hlm. lhu008, Okt 2014, doi: 10.1093/wber/lhu008.
- [17] N. Benhassine, D. McKenzie, V. Pouliquen, dan M. Santini, “Does inducing informal firms to formalize make sense? Experimental evidence from Benin,” *J. Public Econ.*, vol. 157, hlm. 1–14, Jan 2018, doi: 10.1016/j.jpubeco.2017.11.004.
- [18] R. Rocha, G. Ulyssea, dan L. Rachter, “Do lower taxes reduce informality? Evidence from Brazil,” *J. Dev. Econ.*, vol. 134, hlm. 28–49, Sep 2018, doi: 10.1016/j.jdeveco.2018.04.003.
- [19] G. Ulyssea, “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil,” *American Economic Review*, vol. 108, no. 8, hlm. 2015–2047, Agu 2018, doi: 10.1257/aer.20141745.
- [20] A. Demenet, M. Razafindrakoto, dan F. Roubaud, “Do Informal Businesses Gain From Registration and How? Panel Data Evidence from Vietnam,” *World Dev.*, vol. 84, hlm. 326–341, Agu 2016, doi: 10.1016/j.worlddev.2015.09.002.
- [21] J. Jessen dan J. Kluve, “The effectiveness of interventions to reduce informality in low- and middle-income countries,” *World Dev.*, vol. 138, hlm. 105256, Feb 2021, doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105256.
- [22] A. Floridi, B. A. Demena, dan N. Wagner, “The bright side of formalization policies! Meta-analysis of the benefits of policy-induced versus self-induced formalization,” *Appl. Econ. Lett.*, vol. 28, no. 20, hlm. 1807–1812, Nov 2021, doi: 10.1080/13504851.2020.1870919.
- [23] I. Mergel, N. Edelmann, dan N. Haug, “Defining digital transformation: Results from expert interviews,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 36, no. 4, hlm. 101385, Okt 2019, doi: 10.1016/j.giq.2019.06.002.
- [24] C. Wilson dan I. Mergel, “Overcoming barriers to digital government: mapping the strategies of digital champions,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 2, hlm. 101681, Apr 2022, doi: 10.1016/j.giq.2022.101681.
- [25] A. Scupola dan I. Mergel, “Co-production in digital transformation of public administration and public value creation: The case of Denmark,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 1, hlm. 101650, Jan 2022, doi: 10.1016/j.giq.2021.101650.
- [26] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2022.
- [27] R. Kattel dan M. Mazzucato, “Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities in the public sector,” *Industrial and Corporate Change*, vol. 27, no. 5, hlm. 787–801, Okt 2018, doi: 10.1093/icc/dty032.
- [28] M. Mazzucato dan R. Kattel, “COVID-19 and public-sector capacity,” *Oxf. Rev. Econ. Policy*, vol. 36, no. Supplement_1, hlm. S256–S269, Sep 2020, doi: 10.1093/oxrep/graa031.
- [29] G. Mascagni, A. T. Mengistu, dan F. B. Woldeyes, “Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia,” *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 189, hlm. 172–193, Sep 2021, doi: 10.1016/j.jebo.2021.06.007.
- [30] O. Okunogbe dan V. Pouliquen, “Technology, Taxation, and Corruption: Evidence from the Introduction of Electronic Tax Filing,” *Am. Econ. J. Econ. Policy*, vol. 14, no. 1, hlm. 341–372, Feb 2022, doi: 10.1257/pol.20200123.

BIODATA PENULIS

Nama : Shaula Rizky Sarlita
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 28 Oktober 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Kementerian Perhubungan
 Alamat : Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung
 HP/WA : 081379345460
 Email : shaularizkysarlita@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Hafifuddin
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 02 April 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gajah Mada
 Alamat : Sumenep, Jawa Timur
 HP/WA : 085142521348
 Email : hafifuddin@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Fikran Hadi Azryan
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 9 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : MEP FEB UGM
 Alamat : Jl Pogung Lor
 HP/WA : 08126739444
 Email : fikranhadiarzryan@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Firdausa Kumala Sari
 Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 25 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : S1 Ekonomi Syariah UIN Suka
 Instansi : -
 Alamat : Nulisan, Sumberagung, Moyudan, Sleman, DIY
 HP/WA : 089668619832
 Email : firdausakumalasari@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Joevana Putri
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : -
 Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Gorontalo
 HP/WA : 085242611315
 Email : joevanaputri@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Ilfa Fauzia Asra
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Bonai Aur, 20 Januari 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Jetis RT003 RW035 Tirtomartani, Kalasan, Sleman, DIY
 HP/WA : 082284731271
 Email : ilfafauziaasra@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Wina Nurfaidah
Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 10 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah
Mada
Instansi : -
Alamat : Padang Guci Hulu, Kaur, Bengkulu
HP/WA : 082377408076
Email : winanurfaidah551972@mail.ugm.ac.id
Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani
Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Bantul



Bantul

Jurnal Riset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Bantul

ISSN : 1412-8519 (media cetak)

ISSN : 2829-2227 (media online)

JRD

Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul

Shaula Rizky Sarlita^{1✉}, Hafifuddin², Fikran Hadi Azryan³, Firdausa Kumala Sari⁴, Jevana Putri⁵, Ilfa Fauzia Asra⁶, Wina Nurfaidah⁷

¹Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

✉shaularizkysarlita@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Submitted : July 2026

Revised : Augst 2026

Published : Sept 2026

KEYWORDS

GAMPIL

Perizinan Usaha

UMKM

Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bantul

ABSTRAK

Digitalisasi pelayanan perizinan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas formalisasi usaha dan memperkuat kapasitas penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL) dalam mendukung formalisasi usaha dan optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan. Objek kajian meliputi implementasi layanan perizinan, karakteristik pelaku usaha, struktur usaha, dan kontribusi retribusi perizinan terhadap penerimaan daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Satu Data Bantul, *Dashboard Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), serta regulasi nasional yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Data dianalisis melalui telaah dokumen (*document anaylsis*) dan interpretasi data sekunder. Analisis tersebut diperkaya dengan observasi lapangan terbatas, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan selama satu hari dalam kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh gambaran konstektual mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan dan bukan sumber data utama dalam penelitian. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa GAMPIL berkontribusi dalam memperluas akses perizinan dan mendorong peningkatan pelaku usaha formal, dari 2.774 unit pada 2021 menjadi 24.594 unit pada 2023. Namun, peningkatan jumlah usaha yang memiliki izin belum diikuti dengan penerimaan daerah yang proporsional. Struktur usaha mikro masih mendominasi di Kabupaten Bantul dengan jumlah 79.898 unit atau 97 persen dari total usaha yang tercatat, sehingga kapasitas kontribusi fiskal masih terbatas. Retribusi perizinan masih berada pada kisaran Rp 1,9 miliar hingga Rp 2,3 miliar per tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan perlu diikuti integrasi data, pembinaan pasca-izin, dan monitoring kepatuhan agar legalitas usaha menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.

Dengan demikian, GAMPIL perlu dikembangkan sebagai tata kelola ekonomi daerah yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

ABSTRACT

The digitalization of licensing services plays a crucial role for local governments in expanding business formalization and strengthening local revenue capacity. This study aims to evaluate the Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL—Direct Licensing Service Movement) innovation in supporting business formalization and optimizing local revenue in Bantul Regency. The study employs a descriptive quantitative approach combined with policy analysis methods. The scope of the study covers the implementation of licensing services, business operator characteristics, business structure, and the contribution of licensing fees to local revenue. Secondary data were obtained from official documents provided by Statistics Indonesia (BPS) of Bantul Regency, the Bantul Regency Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP), the Regional Budget (APBD) documents, the "Satu Data Bantul" (Bantul One Data) portal, the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dashboard, and national regulations concerning licensing services and fiscal relations between central and local governments. Data analysis was conducted through document review and the interpretation of secondary data. This analysis was further enriched by limited field observation—specifically, a one-day direct observation conducted during the Field Learning and Community Service (PLPKM) program within the Bantul Regency Government. Field observations served to provide a contextual overview of licensing service implementation rather than acting as the primary data source for the study. The findings indicate that GAMPIL has contributed to expanding access to licensing and driving an increase in formal business operators, rising from 2,774 units in 2021 to 24,594 units in 2023. However, the increase in the number of licensed businesses has not been matched by a proportional rise in local revenue. Micro-enterprises continue to dominate the business landscape in Bantul Regency, accounting for 79,898 units—or 97 percent of all registered businesses—thereby limiting fiscal contribution capacity. Licensing fee revenue remains within the range of IDR 1.9 billion to IDR 2.3 billion per year. These findings indicate that the digitalization of licensing must be accompanied by data integration, post-licensing support, and compliance monitoring to ensure that business legalization serves as an instrument for strengthening the local economy. Consequently, GAMPIL needs to be developed into a more integrated and data-driven system of local economic governance.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah penggerak ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I Yogyakarta). Secara geografis, Kabupaten Bantul berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, yang membuat Bantul menjadi bagian integral dari dinamika sosial dan ekonomi Yogyakarta secara keseluruhan. Selama beberapa tahun terakhir, sektor pertanian merupakan salah satu lapangan usaha yang menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul. Meskipun sektor pertanian masih secara konsisten menjadi penyumbang utama PDRB, terjadi pergeseran struktur ekonomi yang cukup signifikan ke arah kelompok nonpertanian. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu penggerak utama dalam aktivitas ekonomi daerah, seperti perdagangan, industri rumah tangga, kuliner, pariwisata, dan jasa, yang menunjukkan peran yang semakin besar terhadap perekonomian. UMKM di Kabupaten Bantul yang

tersebar di berbagai bidang usaha, terutama sejumlah sentra industri kreatif seperti Kasongan serta destinasi pariwisata seperti Parangtritis dan Pantai Pandansimo, mendorong pertumbuhan usaha akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, serta jasa lainnya. Keberadaan para pelaku usaha UMKM ini tidak hanya membuka kesempatan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendukung penerimaan daerah apabila kegiatan usaha tersebut tercatat dan terintegrasi dalam sistem formal.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bantul, struktur pelaku usaha di Kabupaten Bantul didominasi oleh usaha mikro. Tercatat sebesar 97,02 persen atau sebanyak 78.898 pelaku usaha yang tercatat merupakan usaha mikro dari keseluruhan basis usaha formal. Sementara itu, usaha kecil berjumlah 1.868 pelaku usaha atau 2,27 persen, usaha besar sebanyak 389 pelaku usaha atau 0,47 persen, dan usaha menengah sebanyak 190 pelaku usaha atau 0,23 persen. Besarnya proporsi pelaku usaha mikro yang mendominasi struktur usaha di Kabupaten Bantul ini menunjukkan dominasi dari sisi jumlah, akan tetapi, kondisi ini belum selalu diikuti oleh kapasitas usaha yang memadai. Pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, kapasitas produksi, jaringan pasar, serta legalitas usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan agar usaha mikro dapat berkembang dan terhubung dengan sistem ekonomi formal. Dukungan tersebut umumnya diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan intervensi strategis, yang mencakup formalisasi usaha, perbaikan lingkungan usaha, pelatihan dan pendampingan, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan dan inovasi [1].

Mengingat besarnya jumlah pelaku usaha, penyediaan layanan perizinan yang mudah, cepat dan terjangkau menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman maupun kemampuan yang sama dalam memanfaatkan layanan digital. Masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala, seperti kurangnya informasi, keterbatasan sarana pendukung, hingga kesulitan memahami prosedur perizinan yang berlaku. Oleh karena itu, transformasi digital dalam pelayanan perizinan ini tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem elektronik. Tetapi juga diperlukan intervensi berupa inovasi layanan proaktif yang dapat memberikan pendampingan secara langsung dan menjangkau para pelaku usaha secara lebih luas.

Berbagai studi terdahulu telah dilakukan untuk menemukan solusi guna mendorong usaha mikro untuk dapat berkembang. Diketahui sebagian besar usaha mikro di beberapa negara berkembang masih beroperasi secara informal, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi untuk menyederhanakan dan menurunkan biaya proses formalisasi usaha [2]. Pendekatan yang paling sering digunakan yaitu strategi formalisasi melalui kemudahan perizinan usaha. Pemerintah di berbagai negara mendorong formalisasi usaha melalui berbagai intervensi, dimulai dari penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha hingga penguatan penegakan hukum [3]. Surat izin usaha sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM karena dapat mempermudah pengajuan kredit, memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, hingga mendapatkan jaminan hukum karena sudah memiliki legalitas resmi yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan usaha [4]. Di Indonesia, proses perizinan usaha telah diintegrasikan melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha. Kehadiran sistem OSS ini menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya cukup panjang karena para pelaku usaha tidak lagi mendatangi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terpisah untuk mengurus berbagai jenis perizinan. Sehingga kegiatan usaha dapat segera dilakukan, sementara para pelaku usaha tetap dapat melengkapi persyaratan teknis lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dokumen terkait izin lingkungan, maupun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) [5]. Selain memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, layanan perizinan ini juga dapat membantu pemerintah daerah. Data yang diperoleh melalui proses perizinan dapat memberikan gambaran terkait jumlah, skala, dan sektor usaha yang berkembang di suatu daerah. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, pemetaan aktivitas ekonomi serta identifikasi potensi penerimaan daerah. Dalam konteks ini, penerimaan retribusi perizinan merupakan salah satu bentuk kontribusi kegiatan layanan perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun demikian, peningkatan jumlah pelaku usaha yang terdaftar belum dapat dijadikan indikator bahwa inovasi pelayanan telah berjalan secara optimal. Pelaksanaan inovasi perlu dilihat dari kemampuannya dalam memperluas jangkauan pelayanan, mempermudah proses perizinan, dan meningkatkan keteraturan data usaha. Kajian terkait formalisasi usaha sejauh ini cenderung berfokus pada penyederhanaan prosedur dan manfaat perolehan legalitas usaha. Namun demikian, efektivitas kebijakan perizinan di tingkat daerah perlu ditinjau untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu

menjangkau pelaku usaha dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membahas pelaksanaan inovasi pelayanan tetapi juga mengaitkannya dengan karakteristik pelaku usaha serta dampaknya terhadap penerimaan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran pelayanan perizinan dalam mendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) dalam kerangka kegiatan PLPKM dalam mendukung digitalisasi layanan perizinan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan struktur pelaku usaha berdasarkan skala dan sektor serta membandingkan penerimaan retribusi perizinan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah diskursus terkait inovasi pelayanan publik, digitalisasi perizinan dan tata kelola penerimaan daerah. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif dalam memperluas jangkauan serta kualitas layanan perizinan, menyempurnakan basis data pelaku usaha, dan mengoptimalkan kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam merancang pengembangan inovasi pelayanan perizinan di masa mendatang.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif melalui metode analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi Program GAMPIL, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta merumuskan alternatif kebijakan guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Analisis dilakukan melalui telaah dokumen (*document analysis*) terhadap berbagai data sekunder yang diperkaya dengan observasi lapangan terbatas, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan selama satu hari kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, guna memperoleh gambaran awal mengenai pelaksanaan Program GAMPIL di lapangan. Observasi ini turut dilengkapi dengan diskusi bersama pihak terkait selama kegiatan PLPKM tersebut. Kombinasi kedua sumber data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi empiris daerah. Pendekatan analisis kebijakan banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik karena mampu menjelaskan proses implementasi kebijakan dalam konteks organisasi pemerintahan serta mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti [6], [7], [8], [9], [10].

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kasus di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Bantul merupakan pencetus dan pengembang tunggal inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL) yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul [11]. Inovasi ini merupakan transformasi dari program "Paket Sari" yang dikembangkan sejak tahun 2021 untuk mengintegrasikan pendampingan perizinan berbasis OSS-RBA sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 [12]. Selain itu, struktur perekonomian Kabupaten Bantul didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga menjadikan daerah ini relevan untuk mengkaji hubungan antara digitalisasi layanan perizinan, formalisasi usaha, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian memanfaatkan data periode 2021–2026, yaitu sejak implementasi OSS-RBA hingga perkembangan terkini Program GAMPIL, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan dan implikasinya terhadap pengelolaan fiskal daerah [13].

2.2 Subjek atau Objek dan Instrumen Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Program GAMPIL sebagai inovasi pelayanan perizinan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta keterkaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis penelitian difokuskan pada mekanisme pelayanan perizinan, karakteristik pelaku usaha, perkembangan legalitas usaha, struktur penerimaan daerah, serta keterkaitan antara layanan perizinan dengan potensi peningkatan penerimaan daerah. Data penelitian diperoleh dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, dokumen APBD, Satu Data Bantul, *Dashboard OSS-*

RBA, serta regulasi nasional terkait pelayanan perizinan dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman telaah dokumen dan lembar pencatatan data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan implementasi Program GAMPIL. Selain itu, informasi pendukung diperoleh melalui observasi dan diskusi dalam kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) bersama perangkat daerah terkait. Validitas data dijaga melalui proses triangulasi teknik (metode), yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui telaah dokumen, observasi lapangan, dan diskusi, guna memastikan konsistensi temuan antar metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, triangulasi sumber juga dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi dan data statistik untuk memperkuat keakuratan data sekunder yang digunakan.

2.3 Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan implementasi Program GAMPIL dan keterkaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul melalui studi literatur dan telaah dokumen kebijakan. Tahap kedua dilakukan melalui kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan digital melalui observasi, pemaparan program, dan diskusi dengan perangkat daerah terkait. Tahap ketiga dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti publikasi BPS, *Dashboard* OSS-RBA, laporan DPMPTSP Kabupaten Bantul, dokumen APBD, Satu Data Bantul, regulasi, dan literatur ilmiah. Selain itu, peneliti melakukan permintaan data pendukung kepada DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk melengkapi informasi terkait implementasi Program GAMPIL. Tahap akhir mencakup proses analisis data, penyusunan *policy paper*, serta validasi hasil kajian melalui seminar bersama Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan rekomendasi kebijakan.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*) dan analisis isi (*content analysis*). Data statistik mengenai Pendapatan Asli Daerah dan retribusi daerah bersumber dari Satu Data Bantul, sedangkan data jumlah pelaku usaha dan distribusi sektor usaha bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul serta *dashboard Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 4 Agustus 2021-9 Maret 2026. Data implementasi OSS-RBA turut diperoleh dari sumber yang sama. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi empiris Kabupaten Bantul. Selanjutnya dilakukan identifikasi kesenjangan implementasi kebijakan, faktor penyebab permasalahan, serta alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan karakteristik daerah. Untuk memilih alternatif kebijakan yang direkomendasikan, peneliti melakukan evaluasi pada setiap alternatif kebijakan menggunakan lima kriteria penilaian; efektivitas fiskal, kelayakan implementasi, keberlanjutan, inklusivitas dan konsistensi regulasi.

Proses pengolahan data dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* untuk tabulasi data, penghitungan sederhana, dan visualisasi grafik, sedangkan *Microsoft Word* digunakan untuk penyusunan naskah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kajian mengenai evaluasi inovasi GAMPIL dalam mendukung digitalisasi layanan perizinan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Hasil kajian disajikan melalui uraian naratif, tabel, serta interpretasi terhadap data pelaku usaha, struktur usaha, dan kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Pembahasan diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara peningkatan layanan perizinan, formalisasi usaha, kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan penguatan integrasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

3.1 Hasil

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa GAMPIL telah berkontribusi dalam memperluas akses layanan perizinan dan mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha formal di Kabupaten Bantul. Data pelaku usaha menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha terdaftar, khususnya pada periode awal implementasi sistem perizinan digital. Namun demikian, peningkatan jumlah pelaku usaha berizin belum diikuti oleh peningkatan kontribusi fiskal dari sektor perizinan secara proporsional. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *output* administratif berupa jumlah izin yang diterbitkan dan *outcome* fiskal berupa peningkatan penerimaan daerah. Dengan demikian, keberhasilan GAMPIL tidak dapat hanya dinilai dari banyaknya izin yang diterbitkan, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana data perizinan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis ekonomi dan penerimaan daerah.

Data pelaku usaha menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha tercatat sebanyak 2.774 unit dan meningkat menjadi 10.318 unit pada tahun 2022. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 24.594 unit. Setelah itu, jumlah pelaku usaha menunjukkan penurunan menjadi 20.728 unit pada tahun 2024, 14.154 unit pada tahun 2025, dan 2.863 unit pada awal tahun 2026. Penurunan pada tahun 2026 perlu ditafsirkan secara hati-hati karena data tersebut belum mencakup satu tahun penuh.

Tabel 1. Tren Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Pelaku Usaha
1	2021	2.774
2	2022	10.318
3	2023	24.594
4	2024	20.728
5	2025	14.154
6	2026*	2.863

Keterangan: Data tahun 2026 merupakan data sementara hingga Maret 2026.

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah.

Selain tren jumlah pelaku usaha, hasil kajian juga menunjukkan bahwa struktur usaha di Kabupaten Bantul sangat didominasi oleh usaha mikro. Dari total 82.352 unit usaha, sebanyak 79.898 unit atau sekitar 97% merupakan usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil hanya berjumlah 1.868 unit, usaha menengah sebanyak 190 unit, dan usaha besar sebanyak 389 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem formal cukup besar, sebagian besar di antaranya memiliki kapasitas ekonomi dan kontribusi fiskal yang relatif terbatas.

Tabel 2. Distribusi Pelaku Usaha Berdasarkan Skala Usaha di Kabupaten Bantul

No	Skala Usaha	Jumlah Usaha
1	Usaha Mikro	79.898
2	Usaha Kecil	1.868
3	Usaha Menengah	190
4	Usaha Besar	389
	Total	82.352

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah.

Dari sisi fiskal, hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi perizinan terhadap PAD masih relatif terbatas. Pada periode 2021–2023, total retribusi daerah berada pada kisaran Rp27,7 miliar hingga Rp42,3 miliar, sedangkan retribusi perizinan tertentu hanya berada pada kisaran Rp1,9–2,0 miliar per tahun [14]. Pada tahun 2024, total retribusi daerah meningkat tajam menjadi sekitar Rp307,0 miliar. Namun, peningkatan tersebut terutama berasal dari retribusi jasa umum, bukan dari retribusi perizinan. Retribusi perizinan pada tahun 2024 tetap relatif kecil, yaitu sekitar Rp2,3 miliar. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah izin belum secara otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan daerah dari sektor perizinan [15].

Tabel 3. Ringkasan Retribusi Daerah dan Retribusi Perizinan Kabupaten Bantul

No	Tahun	Total Retribusi Daerah	Retribusi Perizinan
1	2021	Rp27,7 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
2	2022	Rp42,1 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
3	2023	Rp42,3 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
4	2024	Rp307,0 miliar	Rp2,3 miliar

Sumber: Data BPS Kabupaten Bantul, diolah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan data atau rendahnya jumlah usaha yang terdaftar, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan data perizinan sebagai dasar penguatan basis penerimaan daerah. Data pelaku usaha sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara terintegrasi lintas OPD. Oleh karena itu, perizinan belum berfungsi secara optimal sebagai pintu masuk untuk pembinaan usaha, pemetaan potensi fiskal, monitoring kepatuhan, dan penguatan PAD.

3.2 Pembahasan

Peningkatan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul sejak 2021 hingga mencapai puncaknya pada 2023 menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perizinan melalui GAMPIL dan sistem OSS telah berperan dalam memperluas akses pelaku usaha terhadap legalitas formal. Secara administratif, pola tersebut dapat dimaknai sebagai capaian positif karena semakin banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem perizinan daerah. Dalam kerangka teori formalisasi usaha, legalitas formal merupakan tahap awal yang memungkinkan pelaku usaha tercatat dalam sistem administrasi pemerintah. Namun, legalitas tersebut tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kontribusi ekonomi maupun fiskal apabila tidak diikuti oleh kapasitas usaha yang memadai, insentif kepatuhan, integrasi data, dan pengawasan pasca-izin. Hal ini sejalan dengan penelitian [16] yang menunjukkan bahwa intervensi pemerintah untuk mendorong formalisasi usaha kecil tidak selalu efektif apabila hanya bertumpu pada penyediaan informasi atau pengurangan biaya administratif. Dengan demikian, peningkatan jumlah usaha berizin melalui GAMPIL perlu dipahami sebagai capaian administratif yang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin peningkatan PAD secara langsung. Keterbatasan dampak fiskal tersebut juga terlihat dari rendahnya kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Meskipun jumlah pelaku usaha berizin meningkat, data retribusi menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perizinan masih relatif kecil dibandingkan total PAD maupun total retribusi daerah. Bahkan ketika total retribusi daerah meningkat secara signifikan pada tahun 2024, peningkatan tersebut lebih banyak berasal dari retribusi jasa umum, bukan dari retribusi perizinan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara output kebijakan berupa peningkatan jumlah izin dan *outcome* fiskal berupa peningkatan penerimaan daerah. Hasil ini sejalan dengan [17], yang menemukan bahwa peningkatan status formal usaha tidak otomatis meningkatkan pendapatan, keuntungan, maupun penerimaan pajak. Dalam konteks Kabupaten Bantul, data pelaku usaha memang telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai basis aktif untuk pemetaan potensi pajak, retribusi, dan kepatuhan fiskal. Oleh karena itu, perizinan baru akan memberikan kontribusi fiskal yang lebih kuat apabila data yang dihasilkan dapat dihubungkan dengan sistem penerimaan daerah secara lebih sistematis.

Hubungan antara formalisasi dan penerimaan daerah dalam kasus GAMPIL memperlihatkan bahwa dampak fiskal dari perizinan bersifat tidak langsung. Perizinan dapat memperluas jumlah usaha yang tercatat secara administratif, tetapi kontribusinya terhadap PAD bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti data tersebut ke dalam sistem fiskal dan pembinaan usaha. Hal ini sejalan dengan [18] yang menunjukkan bahwa penurunan biaya formalitas dapat mendorong sebagian

usaha informal masuk ke sektor formal, tetapi dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak selalu positif. Artinya, keberhasilan perizinan tidak cukup diukur dari peningkatan jumlah pelaku usaha berizin, tetapi juga dari sejauh mana data perizinan digunakan untuk monitoring kepatuhan, pemetaan potensi fiskal, dan koordinasi lintas OPD. Dalam konteks GAMPIL, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan perlu dilengkapi dengan mekanisme lanjutan agar data yang dihasilkan tidak berhenti pada proses penerbitan izin. Struktur pelaku usaha di Kabupaten Bantul yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil turut menjelaskan mengapa peningkatan jumlah izin belum menghasilkan peningkatan PAD yang proporsional. Dalam teori heterogenitas sektor informal dan usaha kecil, setiap pelaku usaha memiliki kapasitas yang berbeda dalam hal produktivitas, omzet, kemampuan tumbuh, serta kesanggupan memenuhi kewajiban administratif dan fiskal. [19] menegaskan bahwa sektor informal dan usaha mikro bersifat heterogen, sehingga dampak formalisasi sangat bergantung pada karakteristik dan kapasitas masing-masing unit usaha. Dengan dominasi usaha mikro, peningkatan jumlah izin di Bantul lebih banyak mencerminkan perluasan cakupan administrasi dibandingkan dengan perluasan basis fiskal yang kuat. Oleh sebab itu, keterbatasan kontribusi retribusi perizinan tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan kinerja layanan perizinan, tetapi juga sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh unit usaha berskala kecil.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh [20], yang menunjukkan bahwa manfaat formalisasi cenderung lebih besar pada usaha yang relatif lebih mapan, sedangkan dampaknya terhadap usaha yang sangat kecil lebih terbatas. Dalam konteks Kabupaten Bantul, sebagian besar pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem perizinan berada pada skala mikro, sehingga kontribusi langsungnya terhadap PAD relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD tidak cukup dilakukan melalui perluasan jumlah izin atau peningkatan pungutan retribusi. Strategi tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas, produktivitas, dan skala usaha. Dengan kata lain, GAMPIL perlu ditempatkan bukan hanya sebagai instrumen penerbitan izin, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi kebijakan pembinaan usaha yang lebih terarah. Kebutuhan untuk menghubungkan perizinan dengan pembinaan usaha juga didukung oleh penelitian [21], yang menunjukkan bahwa intervensi untuk mengurangi informalitas memiliki hasil yang beragam, bergantung pada desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan konteks kelembagaan. Sejalan dengan itu, [22], menekankan bahwa manfaat formalisasi cenderung lebih kuat apabila didukung oleh kebijakan pendamping, seperti pelatihan, layanan pengembangan usaha, dan dukungan peningkatan kapasitas. Dalam konteks GAMPIL, hal ini menunjukkan bahwa perizinan tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen peningkatan PAD. Legalitas formal perlu ditindaklanjuti melalui pembinaan pasca izin, akses pembiayaan, sertifikasi produk, perluasan pasar, dan monitoring kepatuhan agar formalisasi dapat berkembang menjadi peningkatan kapasitas ekonomi dan kontribusi fiskal.

Selain berkaitan dengan formalisasi usaha, hasil kajian ini juga dapat dipahami melalui teori transformasi digital sektor publik. Digitalisasi layanan perizinan melalui GAMPIL telah membantu memperluas akses pelayanan dan mempercepat proses administrasi perizinan. Namun, efektivitas digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya platform layanan, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut untuk mengubah proses kerja, memperkuat koordinasi, dan menghubungkan data antarlembaga. [23], menjelaskan bahwa transformasi digital sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses organisasi, pola kerja birokrasi, dan hubungan antaraktor dalam pelayanan publik. Dengan demikian, GAMPIL tidak cukup hanya dinilai sebagai inovasi teknologi, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari perubahan tata kelola perizinan daerah. Dalam konteks Kabupaten Bantul, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan data perizinan sebagai dasar koordinasi kebijakan lintas OPD. Data yang dihasilkan melalui proses perizinan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan layanan perizinan, pembinaan usaha, dan pengelolaan penerimaan daerah. Hal ini sejalan dengan [24], yang menunjukkan bahwa hambatan dalam *digital government* sering kali bersifat struktural dan kultural, bukan semata-mata teknis. Artinya, tantangan GAMPIL tidak hanya terletak pada sistem digitalnya, tetapi juga pada pola koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme pemanfaatan data antarinstitusi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pelaku usaha berizin belum secara otomatis bertransformasi menjadi perluasan basis fiskal apabila tidak didukung oleh integrasi proses dan koordinasi kelembagaan yang kuat.

Pengembangan GAMPIL juga perlu diarahkan pada penciptaan nilai publik yang lebih luas. [25], menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik dapat menghasilkan nilai publik apabila melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian layanan. Dalam konteks Bantul, nilai publik dari GAMPIL tidak hanya terletak pada

percepatan penerbitan izin, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjadi basis data bagi pembinaan usaha, monitoring kepatuhan, dan penguatan sistem penerimaan daerah. Dengan demikian, digitalisasi perizinan perlu diarahkan melampaui efisiensi administratif menuju penciptaan manfaat kebijakan yang lebih luas, terutama dalam mendukung formalisasi usaha, pengembangan UMKM, dan penguatan basis penerimaan daerah. Kesenjangan antara peningkatan jumlah pelaku usaha berizin dan rendahnya kontribusi retribusi perizinan juga perlu dibaca dalam konteks regulasi fiskal daerah. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), ruang optimalisasi retribusi perizinan menjadi semakin terbatas [26]. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor perizinan tidak lagi dapat diperluas secara bebas dan lebih banyak berkaitan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak cukup ditempuh melalui optimalisasi retribusi perizinan semata. Pemerintah daerah perlu mengarahkan pemanfaatan data perizinan untuk memperluas basis penerimaan secara tidak langsung, misalnya melalui pemetaan sektor usaha potensial, penguatan kepatuhan, dan pembinaan usaha agar skala ekonomi pelaku usaha meningkat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, rendahnya kontribusi retribusi perizinan tidak semata-mata mencerminkan lemahnya kinerja GAMPIL. Kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi bahwa formalisasi usaha melalui perizinan perlu diikuti oleh integrasi data, pembinaan pasca-izin, serta penguatan monitoring kepatuhan secara lebih sistematis. Peran GAMPIL tidak hanya dapat dibatasi pada penyediaan layanan administrasi perizinan, tetapi perlu diperluas sebagai instrumen yang mendukung keterhubungan antara formalisasi usaha, pemanfaatan data perizinan, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan basis penerimaan daerah. Dalam konteks tersebut, pengembangan GAMPIL ke arah sistem yang lebih integratif menjadi penting agar data dan proses perizinan tidak berhenti pada tahap penerbitan izin, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui monitoring kepatuhan, koordinasi lintas OPD, dan perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih terarah.

3.3 Implikasi Penelitian

Secara praktis, temuan kajian ini memberikan implikasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan tata kelola perizinan yang lebih terintegrasi. GAMPIL tidak hanya dapat diposisikan sebagai instrumen pelayanan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kebijakan yang mendukung pembinaan pelaku usaha dan penguatan basis penerimaan daerah. Dalam konteks tersebut, data perizinan yang dihasilkan melalui GAMPIL perlu dimanfaatkan secara lebih strategis, antara lain untuk memetakan karakteristik pelaku usaha, mengidentifikasi sektor ekonomi prioritas, memantau kepatuhan pasca-izin, serta menghubungkan pelaku usaha dengan program pembinaan, akses pembiayaan, sertifikasi produk, dan perluasan pasar. Implikasi tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan GAMPIL. Optimalisasi dampak ekonomi dan fiskal dari perizinan tidak dapat hanya bertumpu pada DPMPTSP sebagai penyelenggara layanan perizinan. DPMPTSP dapat berperan sebagai pengelola data dan simpul awal formalisasi usaha, sementara Bapenda berperan dalam pemanfaatan data untuk penguatan basis pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM dapat mengarahkan data tersebut untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha, sedangkan Dinas Kominfo mendukung integrasi sistem digital dan interoperabilitas data. Dengan demikian, integrasi yang dimaksud tidak selalu harus dimaknai sebagai penyatuan anggaran, tetapi dapat diwujudkan melalui integrasi data, koordinasi program, pembagian peran kelembagaan, serta penyusunan indikator kinerja bersama.

Namun demikian, pengembangan pendekatan integratif perlu dirancang secara bertahap dan realistis. Tantangan koordinasi kelembagaan, kapasitas fiskal, ketersediaan anggaran, serta kesiapan sumber daya manusia perlu menjadi bagian dari pertimbangan agar rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks transformasi digital sektor publik, [23], menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga menuntut perubahan proses organisasi, pola kerja birokrasi, serta mekanisme koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, penguatan GAMPIL sebagai sistem integratif perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanfaatan data yang telah tersedia, pemetaan potensi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), identifikasi sektor usaha prioritas, serta pembentukan forum koordinasi lintas OPD. Tahap berikutnya dapat diarahkan pada pengembangan sistem integrasi data, penguatan mekanisme monitoring kepatuhan, dan pelaksanaan program pembinaan usaha berbasis data perizinan. Pendekatan bertahap tersebut sejalan dengan [27], yang menekankan pentingnya kapasitas dinamis sektor publik dalam merancang, menyesuaikan, dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. [28] juga menunjukkan bahwa kapasitas

sektor publik mencakup kemampuan untuk beradaptasi, belajar, mengelola data dan platform digital, serta menyelaraskan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan integratif tidak hanya menjadi gagasan normatif, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam agenda kebijakan yang lebih operasional dan sesuai dengan kapasitas daerah. Secara teoretis, kajian ini memperkuat literatur mengenai digitalisasi pelayanan publik, formalisasi usaha, dan desentralisasi fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan daerah apabila tidak didukung oleh integrasi kelembagaan dan keterhubungan dengan sistem fiskal. [24] menunjukkan bahwa hambatan *digital government* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur organisasi, budaya birokrasi, dan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks fiskal, [29] menunjukkan bahwa inovasi teknologi dalam administrasi pajak dapat meningkatkan penerimaan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada respons wajib pajak dan kapasitas administrasi. [30] juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat mengurangi biaya kepatuhan dan peluang korupsi, tetapi dampaknya sangat bergantung pada desain implementasi dan kesiapan institusi. Oleh karena itu, kontribusi GAMPIL terhadap penguatan PAD perlu dipahami sebagai proses kelembagaan yang membutuhkan integrasi data, monitoring kepatuhan, dan koordinasi lintas OPD secara berkelanjutan.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis yang digunakan masih bersifat deskriptif sehingga belum dapat mengukur dampak kausal GAMPIL terhadap peningkatan PAD. Kedua, data tahun 2026 belum mencakup satu tahun penuh, sehingga interpretasi terhadap perubahan jumlah pelaku usaha pada tahun tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, kajian ini belum menganalisis data pada level pelaku usaha secara lebih rinci, seperti omzet, status kepatuhan pajak, pembaruan izin, keterlibatan dalam program pembinaan, serta kontribusi masing-masing usaha terhadap penerimaan daerah. Keempat, analisis fiskal masih berfokus pada hubungan antara perizinan, retribusi, dan PAD, sehingga belum sepenuhnya menangkap dampak tidak langsung dari formalisasi usaha terhadap sumber penerimaan daerah lainnya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, kajian lanjutan disarankan untuk menggunakan data mikro pelaku usaha agar hubungan antara status perizinan, skala usaha, kepatuhan fiskal, dan kontribusi terhadap PAD dapat dianalisis secara lebih mendalam. Kajian berikutnya juga dapat mengembangkan evaluasi berbasis wilayah dengan membandingkan kapanewon yang memiliki konsentrasi usaha tinggi, seperti Banguntapan, Kasihan, dan Sewon, dengan wilayah yang memiliki tingkat formalisasi lebih rendah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas *pilot project* integrasi data dan pembinaan usaha pasca izin untuk menilai sejauh mana pendekatan integratif mampu meningkatkan kepatuhan, produktivitas usaha, dan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan GAMPIL berkontribusi untuk memperluas akses pelayanan perizinan dan mendorong formalisasi usaha di Kabupaten Bantul. Jumlah pelaku usaha meningkat dari 2.774 unit pada 2021 hingga 2023 menjadi 24.594 unit. Namun, kenaikan jumlah usaha tersebut belum diikuti oleh kenaikan penerimaan daerah secara proporsional. Struktur usaha di Bantul didominasi oleh kelompok usaha mikro, yakni 79.898 unit dari 89.352 unit usaha atau sekitar 97 persen. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa jumlah izin yang meningkat belum secara langsung meningkatkan PAD secara signifikan. Retribusi perizinan masih relatif kecil, yaitu kisaran Rp 1,9 sampai 2,3 miliar per tahun. Setelah berlakunya UU HKPD, ruang optimalisasi retribusi perizinan juga semakin terbatas, sehingga potensi penerimaan perlu diarahkan pada PBG dan pemanfaatan data perizinan untuk memperkuat basis penerimaan daerah.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa GAMPIL perlu dikembangkan sebagai tata kelola ekonomi daerah, bukan hanya sebagai layanan administrasi perizinan. Data perizinan dapat dimanfaatkan untuk pemetaan potensi usaha, pembinaan pascaizin usaha, monitoring kepatuhan, dan koordinasi OPD dalam memperkuat basis penerimaan daerah. Namun, pendekatan integratif perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kelembagaan, prioritas pembangunan daerah, kapasitas fiskal, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini masih terbatas pada analisis dan belum mengukur dampak kausal GAMPIL terhadap PAD karena data tidak tersedia lengkap dan konsisten. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan menggunakan data mikro pelaku usaha agar hubungan antar perizinan, skala usaha, kepatuhan fiskal, dan kontribusi terhadap PAD dapat dianalisis lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan dan dukungan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) dalam penelitian ini melalui kunjungan lapangan ke pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul atas kerja sama dan izin akses data yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.

REFERENSI

- [1] C. Piza *dkk.*, “The impact of business support services for small and medium enterprises on firm performance in low-and middle-income countries.” [Daring]. Tersedia pada: www.campbellcollaboration.org/lib/
- [2] M. Bruhn dan D. McKenzie, “Entry Regulation and the Formalization of Microenterprises in Developing Countries,” *World Bank Res. Obs.*, vol. 29, no. 2, hlm. 186–201, Agu 2014, doi: 10.1093/wbro/lku002.
- [3] A. Floridi, B. A. Demena, dan N. Wagner, “Shedding light on the shadows of informality: A meta-analysis of formalization interventions targeted at informal firms,” *Labour Econ.*, vol. 67, Des 2020, doi: 10.1016/j.labeco.2020.101925.
- [4] Ika Wulandari dan Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 2, hlm. 386–394, Apr 2022, doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205.
- [5] C. Yasmin, F. Gunawan, P. E. Purnamaningsih, dan K. Winaya, “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Badung,” Online. [Daring]. Tersedia pada: <https://lgdpublishing.org/index.php/birev>
- [6] A. Omar, V. Weerakkody, dan A. Daoud, “Studying Transformational Government: A review of the existing methodological approaches and future outlook,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 37, no. 2, hlm. 101458, Apr 2020, doi: 10.1016/j.giq.2020.101458.
- [7] N. K. Kayesa dan M. Shung-King, “The role of document analysis in health policy analysis studies in low and middle-income countries: Lessons for HPA researchers from a qualitative systematic review,” *Health Policy Open*, vol. 2, hlm. 100024, Des 2021, doi: 10.1016/j.hpopen.2020.100024.
- [8] B. Van Haelter, D. Vos, dan J. Voets, “Drivers of reform implementation in local government: a qualitative comparative analysis,” *Public Money & Management*, vol. 43, no. 2, hlm. 174–182, Feb 2023, doi: 10.1080/09540962.2021.1959714.
- [9] D. Polman dan G. Alons, “Reap what you sow: implementing agencies as strategic actors in policy feedback dynamics,” *Policy Sci.*, vol. 54, no. 4, hlm. 823–848, Des 2021, doi: 10.1007/s11077-021-09436-0.
- [10] H. L. Bullock, J. N. Lavis, M. G. Wilson, G. Mulvale, dan A. Miatello, “Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis,” *Implementation Science*, vol. 16, no. 1, hlm. 18, Des 2021, doi: 10.1186/s13012-021-01082-7.
- [11] D. P. M. dan P. T. S. P. K. Bantul, “Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bantul Tahun 2023,” DPMPTSP Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, 2023.
- [12] P. R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021.

- [13] D. P. M. dan P. T. S. P. K. Bantul, “Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029,” DPMPTSP Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, 2025.
- [14] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, “Data pelaku usaha Kabupaten Bantul tahun 2021–2026,” Bantul, 2026.
- [15] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bantul menurut jenis pendapatan (ribu rupiah), 2021–2024,” Bantul, 2024.
- [16] G. H. de Andrade, M. Bruhn, dan D. McKenzie, “A Helping Hand or the Long Arm of the Law? Experimental Evidence on What Governments Can Do to Formalize Firms,” *World Bank Econ. Rev.*, hlm. lhu008, Okt 2014, doi: 10.1093/wber/lhu008.
- [17] N. Benhassine, D. McKenzie, V. Pouliquen, dan M. Santini, “Does inducing informal firms to formalize make sense? Experimental evidence from Benin,” *J. Public Econ.*, vol. 157, hlm. 1–14, Jan 2018, doi: 10.1016/j.jpubeco.2017.11.004.
- [18] R. Rocha, G. Ulyssea, dan L. Rachter, “Do lower taxes reduce informality? Evidence from Brazil,” *J. Dev. Econ.*, vol. 134, hlm. 28–49, Sep 2018, doi: 10.1016/j.jdeveco.2018.04.003.
- [19] G. Ulyssea, “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil,” *American Economic Review*, vol. 108, no. 8, hlm. 2015–2047, Agu 2018, doi: 10.1257/aer.20141745.
- [20] A. Demenet, M. Razafindrakoto, dan F. Roubaud, “Do Informal Businesses Gain From Registration and How? Panel Data Evidence from Vietnam,” *World Dev.*, vol. 84, hlm. 326–341, Agu 2016, doi: 10.1016/j.worlddev.2015.09.002.
- [21] J. Jessen dan J. Kluve, “The effectiveness of interventions to reduce informality in low- and middle-income countries,” *World Dev.*, vol. 138, hlm. 105256, Feb 2021, doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105256.
- [22] A. Floridi, B. A. Demena, dan N. Wagner, “The bright side of formalization policies! Meta-analysis of the benefits of policy-induced versus self-induced formalization,” *Appl. Econ. Lett.*, vol. 28, no. 20, hlm. 1807–1812, Nov 2021, doi: 10.1080/13504851.2020.1870919.
- [23] I. Mergel, N. Edelmann, dan N. Haug, “Defining digital transformation: Results from expert interviews,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 36, no. 4, hlm. 101385, Okt 2019, doi: 10.1016/j.giq.2019.06.002.
- [24] C. Wilson dan I. Mergel, “Overcoming barriers to digital government: mapping the strategies of digital champions,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 2, hlm. 101681, Apr 2022, doi: 10.1016/j.giq.2022.101681.
- [25] A. Scupola dan I. Mergel, “Co-production in digital transformation of public administration and public value creation: The case of Denmark,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 1, hlm. 101650, Jan 2022, doi: 10.1016/j.giq.2021.101650.
- [26] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2022.
- [27] R. Kattel dan M. Mazzucato, “Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities in the public sector,” *Industrial and Corporate Change*, vol. 27, no. 5, hlm. 787–801, Okt 2018, doi: 10.1093/icc/dty032.
- [28] M. Mazzucato dan R. Kattel, “COVID-19 and public-sector capacity,” *Oxf. Rev. Econ. Policy*, vol. 36, no. Supplement_1, hlm. S256–S269, Sep 2020, doi: 10.1093/oxrep/graa031.
- [29] G. Mascagni, A. T. Mengistu, dan F. B. Woldeyes, “Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia,” *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 189, hlm. 172–193, Sep 2021, doi: 10.1016/j.jebo.2021.06.007.
- [30] O. Okunogbe dan V. Pouliquen, “Technology, Taxation, and Corruption: Evidence from the Introduction of Electronic Tax Filing,” *Am. Econ. J. Econ. Policy*, vol. 14, no. 1, hlm. 341–372, Feb 2022, doi: 10.1257/pol.20200123.

BIODATA PENULIS

Nama : Shaula Rizky Sarlita
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 28 Oktober 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Kementerian Perhubungan
 Alamat : Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung
 HP/WA : 081379345460
 Email : shaularizkysarlita@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Hafifuddin
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 02 April 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gajah Mada
 Alamat : Sumenep, Jawa Timur
 HP/WA : 085142521348
 Email : hafifuddin@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Fikran Hadi Azryan
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 9 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : MEP FEB UGM
 Alamat : Jl Pogung Lor
 HP/WA : 08126739444
 Email : fikranhadiarzryan@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Firdausa Kumala Sari
 Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 25 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : S1 Ekonomi Syariah UIN Suka
 Instansi : -
 Alamat : Nulisan, Sumberagung, Moyudan, Sleman, DIY
 HP/WA : 089668619832
 Email : firdausakumalasari@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Joevana Putri
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : -
 Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Gorontalo
 HP/WA : 085242611315
 Email : joevanaputri@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Ilfa Fauzia Asra
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Bonai Aur, 20 Januari 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Jetis RT003 RW035 Tirtomartani, Kalasan, Sleman, DIY
 HP/WA : 082284731271
 Email : ilfafauziaasra@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Wina Nurfaidah
Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 10 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah
Mada
Instansi : -
Alamat : Padang Guci Hulu, Kaur, Bengkulu
HP/WA : 082377408076
Email : winanurfaidah551972@mail.ugm.ac.id
Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani
Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Bantul



Bantul

Jurnal Riset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Bantul

ISSN : 1412-8519 (media cetak)

ISSN : 2829-2227 (media online)

JRD

Komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa Sebagai Souvenir: Studi Kasus Ghriya Ukir Kulit Sagio

Abimanyu Putra Pratama¹✉

¹Pengkajian Seni, Pascasarjana Institut Seni Indonesia, Yogyakarta

✉abimanyusagio@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Submitted : July 2026

Revised : Augst 2026

Published : Sept 2026

KEYWORDS

Komodifikasi Budaya

Wayang Kulit Cina Jawa

Souvenir Budaya

Warisan Budaya

Pariwisata Budaya

ABSTRAK

Pariwisata budaya mendorong transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi kreatif tanpa menghilangkan identitas budayanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) sebagai produk souvenir di Ghriya Ukir Kulit Sagio, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian diuji menggunakan triangulasi teknik serta dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komodifikasi Wacinwa berlangsung melalui transformasi visual, transformasi fungsi, reproduksi budaya, serta negosiasi antara tradisi dan pasar. Transformasi visual dilakukan dengan memperkecil ukuran wayang dari sekitar 40 cm menjadi sekitar 17 cm tanpa mengubah penggunaan kulit perkamen, tangkai berbahan tanduk, maupun teknik tatah sungging tradisional. Fungsi Wacinwa bergeser dari media pertunjukan dan artefak museum menjadi souvenir, koleksi, dan elemen dekoratif, sementara reproduksi budaya dilakukan dengan menjadikan koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sebagai acuan visual. Temuan ini menunjukkan bahwa komodifikasi tidak menyebabkan degradasi nilai budaya, tetapi menjadi strategi pelestarian melalui adaptasi selektif yang tetap mempertahankan autentisitas dalam mendukung pariwisata budaya dan ekonomi kreatif.

ABSTRACT

Cultural tourism has encouraged the transformation of cultural heritage into creative economic products while maintaining their cultural identity. This study aims to analyze the commodification process of Chinese-Javanese Shadow Puppets (Wayang Kulit Cina Jawa/Wacinwa) as cultural souvenirs produced by Ghriya Ukir Kulit Sagio in Bantul, Special Region of Yogyakarta. A qualitative approach with a single case study design was employed. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, validated using technique triangulation, and analyzed through the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that the commodification of Wacinwa involves visual transformation, functional transformation, cultural reproduction, and negotiation between tradition and market demands. Visual transformation is achieved

by reducing the puppet size from approximately 40 cm to 17 cm while preserving the use of parchment leather, buffalo horn handles, and the traditional tatak sungging technique. Wacinwa has shifted from a performance medium and museum artifact into a souvenir, collectible, and decorative object, while cultural reproduction is maintained by using the Sonobudoyo Museum collection as the primary visual reference. The study concludes that commodification does not necessarily degrade cultural values but instead functions as a preservation strategy through selective adaptation that maintains authenticity while supporting cultural tourism and the creative economy.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap warisan budaya dalam konteks pariwisata dan industri kreatif mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan ini ditandai oleh semakin banyaknya penelitian yang menempatkan produk budaya, khususnya kerajinan tradisional dan souvenir, bukan lagi sekadar sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai media representasi identitas budaya, pelestarian pengetahuan lokal, serta penghubung antara masyarakat, wisatawan, dan suatu tempat. Duan dan kawan-kawan [1] menunjukkan bahwa souvenir berbasis kerajinan tradisional mampu membangun keterikatan antara manusia, benda, dan tempat (*souvenir-person-place bonding*) sehingga berkontribusi terhadap keberlanjutan warisan budaya. Temuan tersebut diperkuat oleh He dan Timothy [2] yang menjelaskan bahwa wisatawan tidak hanya mempertimbangkan nilai fungsional suatu souvenir, tetapi juga mengaitkannya dengan representasi tempat, kreativitas, estetika, kualitas, dan makna simbolik yang dikandungnya. Bahkan, penelitian Chiengkul dan Kumjorn [3] membuktikan bahwa autentisitas budaya merupakan atribut yang paling berpengaruh dalam membentuk identitas budaya suatu souvenir sekaligus meningkatkan niat wisatawan untuk membeli dan kembali mengunjungi destinasi tersebut. Dengan demikian, souvenir budaya kini dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat citra destinasi sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal melalui mekanisme ekonomi kreatif.

Di sisi lain, meningkatnya perhatian terhadap souvenir budaya juga diikuti oleh kesadaran bahwa keberhasilan pelestarian warisan budaya sangat bergantung pada keberlangsungan kerajinan tradisional yang menjadi fondasi utama pembentuk identitas budaya suatu daerah. Yang dan kawan-kawan [4] menjelaskan bahwa berbagai negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan keberlanjutan kerajinan tradisional akibat berkurangnya regenerasi perajin, meningkatnya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, serta perubahan preferensi pasar. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk inovasi agar produk kriya tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Namun demikian, inovasi pada produk kerajinan tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus tetap mempertahankan autentisitas budaya yang melekat pada material, teknik produksi, motif, maupun nilai-nilai tradisional yang dikandungnya. Penelitian Ariffin dan kawan-kawan [5] menunjukkan bahwa inovasi dalam kerajinan tradisional dapat dilakukan melalui adaptasi bentuk, fungsi, material, teknik, maupun pemanfaatannya, selama perubahan tersebut tetap menjaga identitas budaya yang menjadi ciri khas produk. Dalam konteks yang lebih luas, Patel [6] juga menempatkan kerajinan tradisional sebagai bagian penting dari industri kreatif yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya, keterampilan lokal, dan keberlanjutan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, pengembangan produk kriya saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan sebagai proses negosiasi antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar.

Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya peran pariwisata budaya sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah. Arumugam dan kawan-kawan [7] menjelaskan bahwa pengembangan *heritage tourism* sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu destinasi dalam membangun identitas budaya, reputasi destinasi, pengalaman wisatawan, serta strategi pemasaran berbasis warisan budaya. Dalam konteks tersebut, souvenir budaya berfungsi sebagai representasi nyata yang memungkinkan wisatawan membawa pulang sebagian pengalaman budaya yang mereka peroleh selama berkunjung. Park dan kawan-kawan [8] bahkan menunjukkan bahwa persepsi autentisitas memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan dan loyalitas wisatawan terhadap destinasi warisan budaya. Sejalan dengan itu, Zhang dan kawan-kawan [9] menemukan bahwa produk warisan budaya

takbenda yang diproduksi secara *handmade* memiliki nilai kelangkaan yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan minat beli konsumen, terutama ketika didukung oleh identitas budaya dan pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya, keberlanjutan kerajinan tradisional, dan pengembangan pariwisata budaya bukan merupakan tiga bidang yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk ekosistem ekonomi kreatif berbasis warisan budaya.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, keterkaitan antara warisan budaya, kerajinan tradisional, dan pariwisata budaya tampak berkembang secara nyata. Yogyakarta dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa yang memiliki kekayaan seni tradisi, baik dalam bentuk seni pertunjukan maupun seni kriya. Keberadaan berbagai produk budaya yang berakar dari tradisi Keraton Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya masyarakat, tetapi juga menjadi modal budaya yang mendukung perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Salah satu bentuk warisan budaya tersebut adalah wayang kulit yang telah diakui UNESCO sebagai *Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity* karena nilai historis, artistik, filosofis, dan budayanya. Dalam perkembangannya, wayang tidak hanya dipahami sebagai media pertunjukan, tetapi juga mengalami berbagai bentuk transformasi fungsi mengikuti dinamika masyarakat kontemporer. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa), yaitu hasil akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa yang mengadaptasi kisah-kisah klasik Tiongkok ke dalam medium wayang kulit Jawa melalui penggunaan teknik tatah sungging, bentuk visual, serta sistem pertunjukan yang khas. Kehadiran Wacinwa menunjukkan bahwa seni tradisi mampu berkembang melalui dialog budaya yang panjang sehingga menghasilkan bentuk ekspresi budaya baru yang memperkaya khazanah seni pertunjukan maupun seni kriya di Yogyakarta.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa souvenir budaya berperan penting dalam mendukung pelestarian warisan budaya, penguatan identitas destinasi, dan keberlanjutan industri kreatif, fenomena tersebut masih menyisakan persoalan ketika diterapkan pada objek budaya yang memiliki nilai historis, material, dan identitas visual yang kuat seperti Wacinwa. Dalam perkembangannya, Wacinwa tidak lagi hanya hadir sebagai media pertunjukan maupun artefak koleksi museum, tetapi juga mulai diproduksi sebagai souvenir budaya oleh Ghriya Ukir Kulit Sagio di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Produk tersebut mereproduksi figur-figur Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo ke dalam ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dibawa wisatawan sebagai cendera mata, namun tetap mempertahankan penggunaan kulit perkamen sebagai material utama, tangkai berbahan tanduk, serta teknik tatah sungging tradisional yang menjadi identitas visualnya. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi fungsi Wacinwa dari artefak budaya menjadi produk ekonomi kreatif yang dipasarkan dalam industri pariwisata. Di satu sisi, transformasi tersebut membuka peluang baru bagi pelestarian Wacinwa melalui mekanisme ekonomi kreatif, memperluas akses masyarakat terhadap objek budaya yang sebelumnya hanya dapat dijumpai dalam ruang museum, serta mendukung keberlanjutan praktik kriya tradisional. Di sisi lain, perubahan tersebut juga memunculkan persoalan mengenai bagaimana proses komodifikasi berlangsung tanpa menghilangkan karakter budaya yang melekat pada Wacinwa, khususnya terkait fungsi, makna, material, teknik produksi, dan identitas visualnya. Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji karena hingga kini belum banyak diketahui bagaimana pelaku kriya menegosiasikan kepentingan ekonomi dengan upaya mempertahankan autentisitas budaya ketika suatu artefak warisan budaya direproduksi menjadi souvenir wisata.

Sejauh ini, penelitian mengenai Wacinwa lebih banyak diarahkan pada pembahasan sejarah kemunculannya, proses akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa, karakteristik visual, maupun fungsinya sebagai seni pertunjukan [10], [11], [12], [13], [14], [15]. Sementara itu, kajian mengenai komodifikasi budaya umumnya membahas transformasi seni tradisional, festival budaya, maupun produk kerajinan dalam konteks pariwisata secara luas, tanpa menjelaskan secara spesifik bagaimana proses komodifikasi berlangsung pada objek budaya yang memiliki keterkaitan langsung dengan koleksi museum serta tetap mempertahankan material dan teknik produksi tradisionalnya [16], [17], [18]. Kajian mengenai souvenir budaya dan kerajinan tradisional juga lebih banyak menyoroti aspek autentisitas, inovasi, perilaku konsumen, dan keberlanjutan kerajinan [1], [3], [4], [5], [19], sehingga masih terdapat celah keilmuan mengenai bagaimana sebuah artefak budaya direproduksi menjadi souvenir tanpa melepaskan identitas visual, material, dan nilai budaya yang menjadi penanda autentisitasnya.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis proses komodifikasi Wacinwa sebagai produk souvenir budaya di Ghriya Ukir Kulit Sagio melalui perspektif komodifikasi budaya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan bahwa komodifikasi tidak selalu berimplikasi pada

degradasi nilai budaya, melainkan dapat menjadi ruang negosiasi antara pelestarian tradisi dan kebutuhan pasar melalui upaya mempertahankan material kulit perkamen, penggunaan tangkai berbahan tanduk, teknik tatah sunging tradisional, serta kemiripan karakter visual dengan artefak Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo. Berdasarkan celah keilmuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komodifikasi Wacinwa sebagai produk souvenir di Ghriya Ukir Kulit Sagio serta menjelaskan bagaimana transformasi fungsi, bentuk, material, dan teknik produksinya berlangsung dalam konteks pariwisata budaya. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk negosiasi yang dilakukan perajin dalam mempertahankan identitas budaya Wacinwa di tengah tuntutan pasar wisata. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai komodifikasi budaya pada bidang seni kriya, khususnya yang berkaitan dengan transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi kreatif tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat padanya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perajin, pelaku industri kriya, pengelola museum, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan pariwisata budaya dalam mengembangkan produk souvenir berbasis warisan budaya yang mampu menjaga autentisitas sekaligus memiliki daya saing dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus [20], [21]. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) sebagai produk souvenir wisata serta menafsirkan perubahan fungsi, makna, dan praktik produksi yang terjadi di Ghriya Ukir Kulit Sagio Bantul. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik yang memiliki karakteristik unik, yaitu produksi souvenir Wacinwa yang tetap mempertahankan material dan teknik tradisional di tengah tuntutan pasar wisata [21]. Penelitian dilaksanakan di Ghriya Ukir Kulit Sagio yang terletak di Dusun Gendeng RT 04, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu unit usaha kriya yang secara aktif memproduksi replika Wacinwa sebagai souvenir wisata, sehingga dinilai dapat memberikan informasi yang kaya dan relevan terkait fenomena yang diteliti. Selain memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, lokasi ini juga memungkinkan peneliti mengamati proses produksi, penggunaan material, serta praktik pemasaran produk secara langsung di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni tahun 2026.

Objek penelitian ini adalah komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) sebagai produk souvenir yang diproduksi dan dipasarkan oleh Ghriya Ukir Kulit Sagio. Fokus penelitian diarahkan pada proses perubahan fungsi Wacinwa dari artefak budaya dan media pertunjukan menjadi komoditas yang berorientasi pada kebutuhan pasar wisata, yang ditandai oleh berbagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan konsumen tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas budaya yang melekat pada produk. Analisis juga mencakup perubahan ukuran, pemilihan material, penerapan teknik tatah sunging, serta upaya mempertahankan karakter visual Wacinwa dalam proses reproduksi sebagai souvenir. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena penelitian ini memerlukan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung terhadap keseluruhan proses produksi maupun pemasaran souvenir Wacinwa [22]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menetapkan Sagio selaku pemilik Ghriya Ukir Kulit sebagai informan utama. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan key informant dimungkinkan apabila informan memiliki penguasaan yang mendalam, kewenangan pengambilan keputusan, serta keterlibatan langsung terhadap keseluruhan fenomena yang diteliti [22], [23]. Pemilihan owner didasarkan pada perannya sebagai pengambil keputusan utama yang menentukan desain produk, pemilihan material, teknik produksi, strategi pemasaran, hingga arah pengembangan souvenir Wacinwa. Selain itu, proses produksi yang dilakukan oleh para perajin pada Ghriya Ukir Kulit dilaksanakan berdasarkan arahan dan standar kerja yang telah ditetapkan oleh owner, sehingga informasi mengenai keseluruhan proses komodifikasi dapat diperoleh secara komprehensif melalui informan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang produksi souvenir Wacinwa, pertimbangan desain, pemilihan material, strategi pemasaran, serta pandangan *owner* mengenai pelestarian nilai budaya dalam proses produksi. Menurut Creswell dan Creswell [23] wawancara semi-terstruktur memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam tanpa kehilangan fokus

penelitian. Observasi dilakukan secara langsung pada aktivitas produksi di Ghriya Ukir Kulit untuk mengamati penggunaan material, tahapan pengerjaan, teknik tatah sungging, serta karakteristik visual produk yang dihasilkan. Dokumentasi digunakan untuk merekam bentuk produk, proses produksi, alat dan bahan, serta lingkungan kerja yang mendukung interpretasi hasil penelitian. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data dapat saling melengkapi dan memverifikasi temuan penelitian sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono [22].

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan secara sistematis. Tahap pertama dilakukan melalui studi pustaka mengenai Wacinwa, komodifikasi budaya, kriya tradisional, dan pariwisata budaya sebagai landasan konseptual penelitian. Selanjutnya dilakukan observasi pendahuluan ke Ghriya Ukir Kulit untuk memahami kondisi lapangan sekaligus mengenali proses produksi souvenir Wacinwa. Tahap berikutnya berupa pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan utama, observasi langsung terhadap aktivitas produksi, dan dokumentasi visual. Seluruh data kemudian diorganisasikan, diklasifikasikan, dan dipersiapkan untuk proses analisis sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai komodifikasi Wacinwa sebagai produk souvenir. Tahapan penelitian ini mengikuti prinsip penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell dan Creswell [23], yaitu pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berlangsung secara fleksibel sesuai dinamika di lapangan.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña [24] yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, serta dikelompokkan sesuai fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan temuan ke dalam kategori-kategori yang memudahkan identifikasi hubungan antardata. Selanjutnya, data diinterpretasikan menggunakan teori komodifikasi budaya untuk menjelaskan transformasi Wacinwa dari artefak budaya menjadi produk souvenir dalam konteks industri pariwisata. Analisis dilakukan berdasarkan indikator komodifikasi budaya yang meliputi perubahan fungsi budaya menjadi fungsi ekonomi, adaptasi produk terhadap kebutuhan pasar, reproduksi budaya dalam sistem produksi, pergeseran makna budaya, serta negosiasi antara tradisi dan pasar sebagaimana dirumuskan oleh Irianto [16].

Proses pengelolaan data dilakukan secara manual melalui teknik pengkodean (*coding*) dan kategorisasi terhadap hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumentasi visual. Seluruh data ditranskripsikan kemudian dianalisis secara berulang untuk mengidentifikasi kode-kode awal yang selanjutnya dikembangkan menjadi tema-tema penelitian. Menurut Saldaña [25], proses *coding* merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti menemukan pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data empiris. Tema-tema tersebut kemudian dipetakan berdasarkan indikator komodifikasi budaya sebagai kerangka interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara praktik produksi, perubahan fungsi, strategi pemasaran, serta upaya mempertahankan identitas budaya Wacinwa sebagai satu kesatuan proses komodifikasi. Dengan demikian, analisis tidak hanya mendeskripsikan fakta empiris, tetapi juga menjelaskan dinamika transformasi Wacinwa dalam konteks industri kriya dan pariwisata budaya di Bantul.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan data lapangan yang diperoleh secara komprehensif mengenai fenomena komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) di Ghriya Ukir Kulit Sagio, yang dilanjutkan dengan analisis kritis menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penyajian hasil temuan ini dibagi ke dalam dua lini utama, yaitu pemaparan data deskriptif-objektif mengenai profil unit usaha kriya dan karakteristik produk, serta pembahasan analitis yang menginterpretasikan transformasi fungsi, bentuk visual, dan dinamika reproduksi budaya objek dalam logika pasar pariwisata. Melalui kerangka indikator teori komodifikasi budaya, seluruh data yang bersumber dari wawancara semi-terstruktur bersama informan kunci, observasi langsung terhadap aktivitas tatah sungging, serta dokumentasi visual akan ditafsirkan secara mendalam. Pendekatan interaktif ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan realitas fisik produk kriya yang dihasilkan, melainkan mengungkap ruang negosiasi strategis yang dilakukan oleh produsen dalam menjaga keseimbangan antara idealisme pelestarian nilai tradisi dan tuntutan ekonomi pasar wisata kontemporer.

3.1 Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Ghriya Ukir Kulit Sagio yang berlokasi di Dusun Gendeng, RT 04, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ghriya Ukir Kulit merupakan salah satu bengkel kriya yang telah beroperasi sejak awal tahun 1960-an dan memproduksi berbagai jenis wayang kulit Gagrak Yogyakarta beserta produk kriya berbahan kulit. Lokasi penelitian berada di Dusun Gendeng yang dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan tatah sungging di Kabupaten Bantul. Tradisi pembuatan wayang kulit di wilayah ini telah berkembang sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga membentuk komunitas perajin yang masih bertahan hingga saat ini. Selain memproduksi wayang untuk kebutuhan pertunjukan dan koleksi, para perajin juga mengembangkan berbagai produk kriya berbasis wayang sesuai kebutuhan pasar.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama mengenai proses komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) sebagai produk souvenir di Ghriya Ukir Kulit Sagio. Temuan-temuan tersebut meliputi transformasi visual produk, perubahan fungsi budaya menjadi produk souvenir, proses reproduksi budaya melalui praktik produksi kriya, serta bentuk negosiasi antara pelestarian tradisi dan kebutuhan pasar. Keempat aspek tersebut disajikan pada subbagian berikut. Berdasarkan hasil observasi, Ghriya Ukir Kulit tidak hanya memproduksi wayang kulit ukuran pertunjukan, tetapi juga berbagai produk kriya berbahan kulit seperti lukisan kulit, gantungan kunci, pembatas buku, miniatur wayang, serta souvenir wisata. Salah satu produk yang dikembangkan adalah souvenir Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa). Produk tersebut diproduksi menggunakan kulit perkamen sebagai media utama dan tanduk kerbau pada bagian gapit. Seluruh proses pengerjaan masih dilakukan secara manual melalui teknik tatah sungging tradisional. Pada tahap pewarnaan, pemilik menyediakan contoh visual tokoh sebagai acuan sehingga karakter visual setiap produk tetap seragam sesuai desain yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sagio selaku pemilik Ghriya Ukir Kulit, ide memproduksi souvenir Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) mulai muncul sekitar tahun 2019 ketika terdapat upaya untuk memperkenalkan ragam koleksi wayang yang dimiliki kepada pengunjung. Menurut informan, figur Wacinwa dipilih karena memiliki karakter visual yang berbeda dibandingkan wayang kulit Jawa yang lebih umum dijumpai di pasaran. Pada tahap awal, souvenir diproduksi dalam jumlah terbatas sebagai produk pelengkap yang dipajang di ruang pamer bersama produk wayang lainnya. Seiring meningkatnya minat konsumen, produksi kemudian dilakukan secara berkelanjutan sebagai salah satu varian souvenir yang dipasarkan oleh Ghriya Ukir Kulit. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa fungsi Wacinwa mengalami perubahan setelah diproduksi sebagai souvenir. Apabila figur Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo lebih berfungsi sebagai artefak budaya yang disimpan dan dipamerkan, maka souvenir Wacinwa diproduksi untuk berbagai kebutuhan konsumen. Menurut Sagio, produk tersebut banyak dimanfaatkan sebagai benda koleksi pribadi, elemen dekorasi interior, cendera mata (souvenir), maupun buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Meskipun demikian, mekanisme persendian pada kedua lengan tetap dipertahankan sehingga souvenir masih dapat digerakkan sebagaimana wayang kulit ukuran pertunjukan.

Selain digunakan oleh wisatawan, hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen souvenir Wacinwa juga berasal dari kalangan kolektor, masyarakat keturunan Tionghoa, pelaku usaha, serta pembeli dari luar daerah yang tertarik terhadap karakter visual maupun latar belakang budaya Wacinwa. Menurut informan, beberapa pelanggan melakukan pemesanan secara berulang sehingga produk tersebut menjadi salah satu varian souvenir yang memiliki pangsa pasar tersendiri dibandingkan jenis wayang lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, proses pembuatan souvenir Wacinwa diawali dengan menentukan figur yang akan diproduksi menggunakan referensi visual koleksi Wayang Kulit Cina Jawa yang terdapat di Museum Negeri Sonobudoyo. Referensi tersebut digunakan sebagai acuan untuk menjaga kesesuaian bentuk tokoh, atribut busana, komposisi warna, dan karakter visual pada setiap produk yang dihasilkan.

Seluruh proses produksi dilakukan secara manual menggunakan teknik tatah sungging tradisional. Berdasarkan hasil observasi, pemilik menyediakan contoh visual setiap tokoh kepada perajin sebagai pedoman selama proses penataan maupun pewarnaan. Dengan adanya contoh tersebut, setiap souvenir yang diproduksi memiliki karakter visual yang seragam serta tetap mengacu pada figur Wacinwa yang menjadi referensi. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa reproduksi yang dilakukan tidak mengubah karakter dasar tokoh Wacinwa. Bentuk wajah, atribut busana, ornamen, komposisi warna, serta struktur visual tetap dipertahankan mengikuti referensi yang digunakan. Perubahan yang dilakukan hanya berupa

pengecilan ukuran agar produk lebih sesuai dengan kebutuhan souvenir, sedangkan identitas visual tokoh tidak mengalami perubahan yang berarti.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penyesuaian utama yang dilakukan dalam produksi souvenir Wacinwa terletak pada ukuran produk. Wayang yang semula diproduksi dalam ukuran pertunjukan dibuat dalam ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah dibawa, dikemas, dan dipasarkan sebagai souvenir wisata. Menurut Sagio, ukuran yang lebih ringkas memudahkan konsumen membawa produk ke luar daerah maupun ke luar negeri menggunakan koper tanpa memerlukan ruang penyimpanan yang besar.

Meskipun ukuran produk mengalami perubahan, hasil observasi menunjukkan bahwa material utama yang digunakan tetap berupa kulit perkamen sebagai media utama dan tanduk kerbau pada bagian gapit. Seluruh proses pengerjaan juga masih menggunakan teknik tatah sungging tradisional secara manual tanpa mengganti metode produksi dengan teknik yang lebih sederhana. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan hanya terbatas pada dimensi fisik produk, sedangkan bahan dan teknik produksi tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil wawancara, pengecilan ukuran juga berpengaruh terhadap harga jual produk. Souvenir Wacinwa dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan wayang kulit ukuran pertunjukan sehingga lebih mudah dijangkau oleh wisatawan. Menurut informan, pertimbangan tersebut dilakukan agar produk dapat berfungsi sebagai buah tangan yang praktis tanpa mengurangi kualitas pengerjaan maupun karakter visual yang menjadi ciri khas Wacinwa.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) sebagai produk souvenir tidak hanya berkaitan dengan perubahan fungsi ekonomi, tetapi juga melibatkan transformasi visual, reproduksi budaya, serta berbagai bentuk negosiasi antara pelestarian tradisi dan kebutuhan pasar. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa proses komodifikasi berlangsung secara kompleks karena setiap perubahan yang dilakukan terhadap produk tetap mempertimbangkan identitas budaya yang melekat pada Wacinwa sebagai warisan budaya hasil akulturasi Jawa dan Tionghoa. Oleh karena itu, pembahasan ini disusun ke dalam beberapa aspek utama yang meliputi transformasi visual, transformasi fungsi, reproduksi budaya, negosiasi antara tradisi dan pasar, serta implikasinya terhadap pelestarian warisan budaya.

3.2.1 Transformasi Visual Wacinwa Menjadi Souvenir

Perubahan fungsi Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) menjadi produk souvenir turut diikuti oleh proses transformasi visual yang memungkinkan objek budaya tersebut menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar tanpa kehilangan identitas utamanya. Transformasi visual tidak hanya berkaitan dengan perubahan ukuran fisik, tetapi juga menyangkut keputusan mengenai material, teknik produksi, struktur bentuk, serta karakter estetis yang dipertahankan maupun diadaptasi selama proses reproduksi. Oleh karena itu, pembahasan pada subbab ini difokuskan untuk menjelaskan bagaimana Ghriya Ukir Kulit Sagio mentransformasikan Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo menjadi produk souvenir yang tetap merepresentasikan identitas visual aslinya, meskipun diproduksi dalam konteks industri pariwisata budaya.

Gambar 1 memperlihatkan perbandingan antara figur Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo dengan souvenir Wacinwa yang diproduksi oleh Ghriya Ukir Kulit Sagio yang terletak pada

Gambar 2. Perbandingan tersebut menunjukkan unsur-unsur visual yang dipertahankan maupun bentuk adaptasi yang dilakukan selama proses reproduksi menjadi produk souvenir.



Gambar 1. Wacinwa Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Hasil observasi menunjukkan bahwa souvenir Wacinwa yang diproduksi oleh Ghriya Ukir Kulit Sagio memiliki tingkat kemiripan visual yang tinggi dengan figur Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo. Kemiripan tersebut tampak pada proporsi anatomi tokoh, bentuk wajah, atribut busana, ornamen, komposisi warna, serta penerapan teknik tatah sungging yang tetap mengacu pada karakter visual artefak aslinya. Material utama yang digunakan juga tidak mengalami perubahan, yaitu kulit perkamen sebagai media utama serta tanduk kerbau pada bagian gapit. Dengan demikian, proses reproduksi tidak diarahkan untuk menciptakan desain baru, melainkan merepresentasikan kembali karakter visual Wacinwa ke dalam format yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar souvenir.

Perubahan paling menonjol ditemukan pada aspek ukuran. Berdasarkan hasil pengukuran, figur Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo memiliki tinggi sekitar 40 cm, sedangkan versi souvenir diproduksi dengan tinggi sekitar 17 cm atau sekitar 27 cm apabila dihitung bersama gapit. Meskipun mengalami miniaturisasi, sistem persendian pada kedua lengan tetap dipertahankan sehingga souvenir masih dapat dimainkan sebagaimana wayang kulit berukuran standar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sagio selaku pemilik Ghriya Ukir Kulit, pengecilan ukuran dilakukan agar produk lebih mudah dibawa wisatawan, lebih efisien dalam proses pengemasan dan distribusi, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan wayang pertunjukan. Dengan demikian, adaptasi visual yang dilakukan lebih diarahkan pada efisiensi penggunaan tanpa mengubah karakter visual yang menjadi identitas utama Wacinwa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi visual pada souvenir Wacinwa berlangsung secara selektif. Adaptasi hanya dilakukan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan praktis konsumen, sedangkan unsur-unsur yang dianggap merepresentasikan identitas budaya tetap dipertahankan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa proses reproduksi budaya tidak selalu menghasilkan perubahan bentuk secara menyeluruh, melainkan dapat berupa proses penyederhanaan skala yang tetap mempertahankan karakter visual, material, dan teknik produksi tradisional. Dalam konteks ini, miniaturisasi berfungsi sebagai strategi adaptasi terhadap kebutuhan pasar tanpa menghilangkan keterkaitan visual antara souvenir dengan artefak budaya yang menjadi referensinya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yang dan kawan-kawan [4] yang menjelaskan bahwa pelestarian kerajinan tradisional di negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari kemampuan perajin dalam menyesuaikan produk dengan perkembangan pasar. Menurut Yang dan kawan-kawan, inovasi diperlukan agar kerajinan tradisional tetap memiliki nilai ekonomi dan mampu bertahan di tengah perubahan preferensi konsumen. Namun demikian, inovasi tersebut harus tetap menjaga kesinambungan keterampilan tradisional, penggunaan material yang sesuai, serta pewarisan pengetahuan budaya antargenerasi. Pada kasus Wacinwa di Ghriya Ukir Kulit Sagio, prinsip tersebut

diwujudkan melalui keputusan untuk hanya mengubah ukuran produk tanpa mengubah material kulit perkamen, penggunaan tangkai berbahan tanduk, maupun teknik tatah sungging yang menjadi identitas utama proses produksinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi adaptasi pasar tidak selalu diwujudkan melalui perubahan desain secara radikal, melainkan dapat dilakukan melalui perubahan skala yang tetap mempertahankan autentisitas visual dan teknis produk budaya.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Ariffin dan kawan-kawan [5] mengenai inovasi kerajinan tradisional di Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inovasi pada produk kerajinan dapat dilakukan melalui perubahan bentuk, fungsi, material, teknik, motif, maupun pemanfaatannya selama perubahan tersebut tidak menghilangkan autentisitas budaya yang melekat pada produk. Akan tetapi, kasus Wacinwa menunjukkan karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan temuan Ariffin dan kawan-kawan. Alih-alih mengembangkan motif atau menciptakan bentuk visual baru, Ghriya Ukir Kulit justru mempertahankan hampir seluruh karakter visual figur Wacinwa koleksi museum dan hanya melakukan miniaturisasi ukuran. Dengan kata lain, inovasi yang dilakukan bukan berupa penciptaan desain baru, melainkan reproduksi visual yang berorientasi pada pelestarian identitas budaya sekaligus penyesuaian terhadap kebutuhan pasar wisata.

Lebih lanjut, Patel [26] menjelaskan bahwa kerajinan tradisional merupakan bagian penting dari industri kreatif karena tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai media transmisi identitas budaya, keterampilan lokal, dan pengetahuan tradisional. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa souvenir Wacinwa tidak diposisikan semata-mata sebagai barang dagangan, tetapi juga sebagai representasi visual warisan budaya Jawa–Tionghoa. Penggunaan material tradisional, teknik tatah sungging yang diwariskan secara turun-temurun, serta upaya mempertahankan karakter visual figur Wacinwa menunjukkan bahwa nilai budaya tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses produksi. Dengan demikian, transformasi visual pada souvenir Wacinwa tidak hanya menghasilkan produk ekonomi kreatif, tetapi juga menjadi media yang memperluas akses masyarakat terhadap representasi budaya yang sebelumnya lebih banyak hadir dalam ruang museum maupun pertunjukan.

Secara keseluruhan, transformasi visual Wacinwa menjadi souvenir menunjukkan bahwa proses komodifikasi pada tahap awal tidak diwujudkan melalui perubahan identitas visual objek budaya, melainkan melalui adaptasi yang bersifat fungsional terhadap kebutuhan pasar. Miniaturisasi ukuran menjadi bentuk inovasi utama, sedangkan material, teknik tatah sungging, struktur visual, dan karakter estetis tetap dipertahankan sebagai penanda autentisitas Wacinwa. Temuan ini memperlihatkan bahwa reproduksi artefak budaya ke dalam bentuk souvenir dapat berlangsung melalui mekanisme adaptasi yang tetap menjaga kontinuitas identitas budaya, sehingga transformasi visual tidak identik dengan hilangnya nilai tradisional, tetapi justru menjadi strategi untuk memperluas keberlanjutan warisan budaya dalam konteks industri pariwisata dan ekonomi kreatif.



Gambar 2. Wacinwa souvenir karya Ghriya Ukir Kulit

3.2.2 Transformasi Fungsi Wacinwa dari Artefak Budaya menjadi Souvenir

Transformasi fungsi merupakan salah satu bentuk perubahan paling nyata yang ditemukan pada souvenir Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) di Ghriya Ukir Kulit Sagio. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sagio selaku pemilik Ghriya Ukir Kulit, Wacinwa yang semula dikenal sebagai artefak budaya dan media pertunjukan kemudian direproduksi menjadi produk souvenir sejak sekitar tahun 2019 sebagai respons terhadap munculnya peluang pasar wisata. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan ukuran produk, tetapi juga mengubah fungsi sosial Wacinwa. Jika sebelumnya Wacinwa lebih banyak hadir sebagai media pertunjukan ataupun koleksi museum yang hanya dapat diamati oleh pengunjung, maka dalam bentuk souvenir Wacinwa dapat dimiliki secara pribadi, dijadikan koleksi, dekorasi interior, maupun buah tangan bagi wisatawan. Berdasarkan hasil observasi, produk souvenir tersebut tetap mempertahankan mekanisme gerak pada bagian lengan sehingga masih memungkinkan untuk dimainkan sebagaimana wayang kulit pada umumnya, meskipun fungsi utamanya telah bergeser menjadi produk kriya yang diperjualbelikan.

Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Wacinwa mengalami perluasan makna dari objek budaya menjadi objek ekonomi. Namun demikian, transformasi tersebut tidak menghilangkan seluruh fungsi budaya yang melekat pada Wacinwa. Berdasarkan hasil wawancara, setiap konsumen yang membeli souvenir Wacinwa umumnya memperoleh penjelasan mengenai asal-usul tokoh, keterkaitannya dengan koleksi Museum Negeri Sonobudoyo, serta latar belakang budaya Tionghoa-Jawa yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, proses transaksi tidak hanya menghasilkan pertukaran ekonomi, tetapi juga menjadi media penyampaian informasi budaya kepada konsumen.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep komodifikasi budaya yang dikemukakan oleh Cohen [27]. Cohen menjelaskan bahwa perkembangan industri pariwisata menyebabkan berbagai ekspresi budaya mengalami transformasi menjadi komoditas yang dapat diproduksi, dipasarkan, dan dikonsumsi oleh wisatawan tanpa harus kehilangan seluruh nilai budayanya. Dalam pandangan Cohen, komodifikasi tidak selalu identik dengan hilangnya autentisitas budaya karena masyarakat lokal masih memiliki ruang untuk menentukan unsur-unsur budaya yang dipertahankan maupun yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar [27]. Kondisi tersebut tampak pada kasus Wacinwa di Ghriya Ukir Kulit Sagio. Adaptasi memang dilakukan melalui pengecilan ukuran dan perubahan orientasi penggunaan menjadi souvenir, tetapi karakter visual, material kulit perkamen, tangkai berbahan tanduk, serta teknik tatah sungging tetap dipertahankan sehingga identitas budaya Wacinwa tidak mengalami perubahan secara mendasar.

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Irianto [16] yang menyatakan bahwa komodifikasi budaya merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam perkembangan ekonomi global dan industri pariwisata. Menurut Irianto, seni tradisional pada era pariwisata tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari mekanisme pasar karena keberadaannya juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat pendukungnya. Namun demikian, komodifikasi tidak selalu berarti eksploitasi budaya apabila pelaku budaya mampu membangun strategi yang menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan pelestarian identitas budaya. Strategi tersebut tampak pada Ghriya Ukir Kulit Sagio yang memilih mempertahankan teknik produksi tradisional dan karakter visual Wacinwa meskipun produk tersebut dipasarkan sebagai souvenir wisata. Dengan demikian, orientasi ekonomi dalam kasus ini justru menjadi salah satu cara untuk memperluas keberlanjutan produksi Wacinwa melalui pasar pariwisata.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian Ulum [17] mengenai komodifikasi kesenian jaranan. Ulum menemukan bahwa komodifikasi menyebabkan terjadinya pergeseran makna dari fungsi magis-religius menuju fungsi hiburan dan ekonomi sehingga unsur-unsur sakral mengalami reduksi akibat tuntutan industri pariwisata. Pada kasus Wacinwa, perubahan fungsi menuju produk ekonomi memang juga terjadi. Akan tetapi, Wacinwa sejak awal lebih dikenal sebagai media pertunjukan dan karya seni kriya daripada sebagai objek ritual yang bersifat sakral. Oleh karena itu, transformasi fungsi yang ditemukan dalam penelitian ini lebih banyak berupa perubahan konteks penggunaan dari media pertunjukan menjadi produk koleksi dan souvenir, bukan perubahan dari fungsi sakral menuju fungsi profan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dampak komodifikasi sangat dipengaruhi oleh karakter budaya dari objek yang dikomodifikasi.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Febriyanto, Riawanti, dan Gunawan [28] mengenai komodifikasi mitos rambut gimbal di Dataran Tinggi Dieng. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komodifikasi budaya tidak selalu menghapus identitas budaya, melainkan justru dapat memperkuat identitas tersebut melalui proses representasi dalam aktivitas pariwisata. Pada kasus Wacinwa, souvenir berfungsi sebagai media representasi budaya Tionghoa-Jawa kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal keberadaan Wacinwa. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian konsumen

baru mengetahui sejarah dan karakteristik Wacinwa setelah melihat produk yang dipajang di showroom Ghriya Ukir Kulit dan memperoleh penjelasan dari pemilik. Dengan demikian, souvenir tidak hanya menjadi produk ekonomi, tetapi juga menjadi media interpretasi budaya yang memperkenalkan kembali warisan Wayang Kulit Cina Jawa kepada publik yang lebih luas.

Berdasarkan dialog dengan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa transformasi fungsi Wacinwa merupakan bentuk komodifikasi budaya yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan berbagai kasus komodifikasi seni tradisional lainnya. Pada kasus ini, orientasi ekonomi tidak diwujudkan melalui perubahan substansi budaya, melainkan melalui perubahan konteks pemanfaatan objek budaya. Wacinwa tidak lagi hanya berfungsi sebagai media pertunjukan maupun artefak museum, tetapi berkembang menjadi souvenir budaya yang dapat dimiliki, dibawa pulang, dan dipajang oleh wisatawan. Meskipun demikian, unsur-unsur utama yang membentuk identitas budaya Wacinwa tetap dipertahankan sehingga komodifikasi yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar daripada sebagai bentuk degradasi nilai budaya.



Gambar 3. Display souvenir Wacinwa karya Ghriya Ukir Kulit

3.2.3 Reproduksi Budaya melalui Souvenir

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa proses produksi souvenir Wacinwa di Ghriya Ukir Kulit Sagio tidak dilakukan melalui penciptaan desain baru, melainkan melalui reproduksi visual terhadap figur Wayang Kulit Cina Jawa yang telah menjadi koleksi Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, figur-figur Wacinwa yang diproduksi sebagai souvenir memiliki kemiripan yang tinggi dengan koleksi museum, baik pada bentuk tokoh, atribut busana, komposisi warna, maupun karakter visual setiap figur. Seluruh proses produksi diawali dengan penyediaan contoh visual oleh pemilik Ghriya Ukir Kulit yang kemudian dijadikan acuan oleh perajin selama proses penataan maupun pewarnaan. Dengan demikian, reproduksi yang dilakukan tidak bertujuan menciptakan interpretasi visual baru, tetapi mempertahankan identitas visual Wacinwa sebagaimana direpresentasikan pada koleksi museum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sagio, referensi utama yang digunakan dalam proses produksi berasal dari dokumentasi figur Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo. Setiap tahap produksi, mulai dari penentuan pola, penataan, hingga pewarnaan dilakukan dengan mengacu pada contoh visual tersebut agar karakter setiap tokoh tetap sesuai dengan bentuk aslinya. Bahkan pada proses pewarnaan, pemilik secara langsung memberikan contoh gambar kepada perajin sehingga warna, motif busana, dan detail ornamen yang dihasilkan memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. Adaptasi yang dilakukan hanya terbatas pada pengecilan ukuran produk agar sesuai dengan kebutuhan souvenir, sedangkan struktur visual tokoh, penggunaan kulit perkamen, tangkai berbahan tanduk, serta teknik tatah sungging tetap dipertahankan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa reproduksi budaya pada souvenir Wacinwa tidak dilakukan melalui proses penyederhanaan identitas budaya, melainkan melalui reproduksi representasi visual artefak budaya ke dalam skala yang lebih kecil. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi bersifat dimensional, bukan konseptual. Souvenir yang dihasilkan tetap membawa identitas visual Wayang Kulit Cina Jawa sehingga fungsi reproduksi dalam penelitian ini tidak sekadar menggandakan bentuk fisik suatu objek, tetapi juga mempertahankan kontinuitas representasi budaya yang melekat pada artefak aslinya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Larkin [29] yang menjelaskan bahwa souvenir museum bukan hanya berfungsi sebagai produk komersial, melainkan sebagai media representasi budaya yang memperpanjang pengalaman pengunjung setelah meninggalkan museum. Menurut Larkin, museum shop merupakan titik temu antara warisan budaya, pendidikan, dan aktivitas ekonomi karena produk yang dijual mampu membawa representasi koleksi museum ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada kasus Wacinwa, fungsi tersebut tampak melalui proses reproduksi figur-figur koleksi Museum Negeri Sonobudoyo ke dalam bentuk souvenir yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, souvenir tidak sekadar menjadi benda yang diperjualbelikan, tetapi juga menjadi medium yang memperluas akses publik terhadap representasi visual koleksi museum tanpa harus berinteraksi langsung dengan artefak aslinya.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara temuan penelitian ini dengan konteks yang dijelaskan oleh Larkin [29]. Larkin lebih banyak membahas souvenir yang diproduksi dan dipasarkan secara langsung melalui museum shop sebagai bagian dari strategi interpretasi museum. Sebaliknya, souvenir Wacinwa dalam penelitian ini diproduksi oleh bengkel kriya independen di luar institusi museum. Meskipun demikian, proses produksinya tetap menjadikan koleksi museum sebagai referensi utama sehingga museum tetap berperan sebagai sumber legitimasi visual, sedangkan Ghriya Ukir Kulit berperan sebagai pihak yang mereproduksi dan mendistribusikan representasi budaya tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. Temuan ini menunjukkan bahwa reproduksi budaya tidak selalu harus berlangsung di dalam institusi museum, tetapi juga dapat dilakukan oleh pelaku industri kriya melalui reproduksi visual yang bertanggung jawab terhadap sumber budayanya.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Toepler [30] mengenai komersialisasi museum. Toepler menjelaskan bahwa aktivitas komersial yang berkaitan dengan koleksi museum tidak selalu bertentangan dengan fungsi pelestarian budaya. Sebaliknya, reproduksi artefak dalam bentuk merchandise dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas pemanfaatan koleksi museum sekaligus meningkatkan keberlanjutan ekonomi budaya. Temuan penelitian ini memperlihatkan kondisi yang serupa. Reproduksi Wacinwa dalam bentuk souvenir tidak mengurangi keberadaan artefak asli yang tersimpan di Museum Negeri Sonobudoyo, tetapi justru memperluas eksistensi visual Wacinwa kepada masyarakat yang sebelumnya belum mengenalnya. Berdasarkan hasil wawancara, tidak sedikit konsumen yang baru mengetahui keberadaan Wayang Kulit Cina Jawa setelah melihat souvenir yang dipajang di showroom Ghriya Ukir Kulit, kemudian memperoleh penjelasan mengenai sejarah serta koleksi museum yang menjadi rujukan pembuatannya.

Meskipun demikian, reproduksi budaya pada penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep museum merchandising yang dijelaskan Toepler [30]. Dalam kasus Metropolitan Museum of Art, aktivitas komersial berkembang sebagai bagian dari strategi institusi museum dalam memperoleh sumber pendanaan. Sebaliknya, pada kasus Wacinwa, proses reproduksi dilakukan oleh pelaku kriya lokal yang memanfaatkan koleksi museum sebagai sumber referensi visual untuk mempertahankan keberlanjutan produksi seni tradisional. Dengan demikian, orientasi ekonomi yang muncul bukan diarahkan untuk kepentingan institusi museum, melainkan menjadi bagian dari keberlanjutan praktik kriya tradisional yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, reproduksi budaya yang terjadi pada souvenir Wacinwa menunjukkan bahwa proses komodifikasi dalam penelitian ini tidak dilakukan melalui penciptaan bentuk baru ataupun penyederhanaan identitas budaya, melainkan melalui reproduksi visual yang tetap mempertahankan karakter artefak aslinya. Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo berfungsi sebagai referensi utama dalam menjaga konsistensi bentuk visual, sedangkan Ghriya Ukir Kulit berperan sebagai agen yang mentransformasikan representasi budaya tersebut ke dalam produk souvenir yang lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, reproduksi budaya pada Wacinwa tidak hanya memperluas distribusi objek budaya, tetapi juga memperpanjang keberadaan representasi budaya Jawa-Tionghoa di luar ruang museum melalui media souvenir.

3.2.4 Negosiasi Tradisi dan Pasar

Transformasi Wacinwa menjadi produk souvenir menunjukkan bahwa proses komodifikasi tidak selalu diikuti oleh perubahan menyeluruh terhadap karakter budaya suatu objek. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penyesuaian yang dilakukan Ghriya Ukir Kulit Sagio terhadap kebutuhan pasar hanya terbatas pada aspek ukuran produk. Wayang yang semula memiliki tinggi sekitar 40 cm direproduksi menjadi souvenir berukuran sekitar 17 cm agar lebih mudah dibawa, dikemas, dipajang, dan memiliki harga yang lebih terjangkau bagi wisatawan. Namun demikian, berbagai unsur yang dianggap

merepresentasikan identitas Wacinwa tetap dipertahankan. Material utama masih menggunakan kulit perkamen, tangkai tetap dibuat dari tanduk kerbau, teknik tatah sungging masih dikerjakan secara manual, sedangkan bentuk tokoh, atribut busana, motif ornamen, serta komposisi warna tetap mengacu pada figur Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo. Dengan demikian, adaptasi terhadap pasar dilakukan secara selektif tanpa mengubah karakter budaya yang menjadi identitas utama produk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sagio, keputusan untuk mempertahankan material dan teknik tradisional dilakukan secara sadar karena kedua aspek tersebut dipandang sebagai ciri utama yang membedakan Wacinwa dengan produk souvenir lainnya. Menurutnya, penggunaan material sintetis atau penyederhanaan teknik produksi memang dapat menekan biaya produksi, tetapi akan mengurangi kualitas artistik sekaligus nilai budaya yang melekat pada produk. Oleh karena itu, perubahan diarahkan pada aspek yang tidak memengaruhi identitas visual maupun kualitas kriya, yaitu ukuran produk. Strategi tersebut memungkinkan Ghriya Ukir Kulit tetap memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa menghilangkan karakter tradisional yang menjadi daya tarik utama Wacinwa.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses komodifikasi pada Wacinwa berlangsung melalui mekanisme negosiasi antara dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, terdapat tuntutan pasar wisata yang menghendaki produk berukuran lebih kecil, mudah dibawa, praktis disimpan, dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Di sisi lain, terdapat komitmen perajin untuk mempertahankan autentisitas produk melalui penggunaan material tradisional, teknik tatah sungging, dan karakter visual yang sesuai dengan artefak aslinya. Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukan merupakan bentuk penggantian nilai budaya oleh nilai ekonomi, melainkan proses kompromi yang memungkinkan keduanya berjalan secara bersamaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yang dan kawan-kawan [4] yang menjelaskan bahwa keberlanjutan kerajinan tradisional sangat bergantung pada kemampuan perajin dalam menyesuaikan produknya terhadap perubahan pasar tanpa menghilangkan identitas budaya yang dimiliki. Yang dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa berbagai sentra kerajinan tradisional menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya produksi, terbatasnya regenerasi perajin, perubahan preferensi konsumen, serta persaingan dengan produk industri. Dalam kondisi tersebut, inovasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari agar kerajinan tetap memiliki nilai ekonomi. Temuan pada Ghriya Ukir Kulit Sagio memperlihatkan kondisi yang serupa. Adaptasi dilakukan melalui pengecilan ukuran dan penyesuaian fungsi produk menjadi souvenir, tetapi inovasi tersebut tidak diarahkan pada perubahan material maupun teknik produksi sehingga keberlanjutan ekonomi tetap berjalan seiring dengan pelestarian identitas budaya.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini sangat sejalan dengan penelitian Ariffin dan kawan-kawan [5] yang menyatakan bahwa inovasi pada kerajinan tradisional tidak selalu berarti menciptakan bentuk baru, melainkan dapat berupa penyesuaian terhadap fungsi, ukuran, maupun pemanfaatan produk selama identitas budaya yang menjadi karakter utamanya tetap dipertahankan. Ariffin dan rekan-rekannya menekankan bahwa keberhasilan inovasi pada produk kriya bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan kebutuhan konsumen kontemporer. Kondisi tersebut terlihat secara nyata pada produksi souvenir Wacinwa. Perubahan ukuran dilakukan sebagai bentuk inovasi agar produk sesuai dengan kebutuhan wisatawan, sedangkan bentuk visual, teknik tatah sungging, material kulit perkamen, serta tangkai berbahan tanduk tetap dipertahankan sebagai elemen utama yang merepresentasikan identitas budaya Wacinwa. Dengan demikian, inovasi pada penelitian ini bersifat adaptif, bukan transformasional.

Temuan penelitian ini juga mendukung pandangan Patel [26] yang menempatkan kerajinan tradisional sebagai bagian penting dari industri kreatif berbasis budaya. Patel menjelaskan bahwa produk kriya tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga membawa pengetahuan tradisional, keterampilan lokal, identitas budaya, serta memori kolektif masyarakat pembuatnya. Oleh karena itu, pengembangan produk kriya perlu diarahkan pada model yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi dengan keberlanjutan budaya. Pada kasus Wacinwa, integrasi tersebut tampak melalui keputusan Ghriya Ukir Kulit untuk tetap mempertahankan proses produksi manual, penggunaan material tradisional, dan standar estetika tatah sungging meskipun produk yang dihasilkan dipasarkan sebagai souvenir wisata. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak menggantikan fungsi budaya Wacinwa, tetapi justru menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan praktik kriya tradisional di tengah berkembangnya industri pariwisata.

Jika dibandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai komodifikasi budaya yang umumnya menyoroiti terjadinya penyederhanaan bentuk, penggunaan material alternatif, maupun hilangnya unsur tradisional akibat tekanan pasar, temuan penelitian ini menunjukkan karakteristik yang berbeda. Pada kasus Wacinwa, orientasi pasar tidak mendorong perubahan terhadap unsur-unsur utama yang membentuk identitas budaya, tetapi hanya memengaruhi aspek-aspek yang bersifat praktis bagi konsumen, seperti ukuran, kemudahan distribusi, dan keterjangkauan harga. Hal tersebut menunjukkan bahwa negosiasi antara tradisi dan pasar tidak selalu menghasilkan dominasi salah satu pihak, melainkan dapat melahirkan bentuk adaptasi yang tetap menghormati nilai-nilai budaya sekaligus menjawab kebutuhan pasar wisata.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa strategi yang diterapkan Ghriya Ukir Kulit Sagio merupakan bentuk negosiasi budaya yang menempatkan tradisi dan pasar sebagai dua unsur yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Tradisi dipertahankan melalui konsistensi material, teknik, dan representasi visual Wacinwa, sedangkan pasar diakomodasi melalui penyesuaian ukuran, fungsi, dan harga produk. Model negosiasi seperti ini memperlihatkan bahwa komodifikasi budaya tidak selalu identik dengan degradasi nilai budaya, tetapi dapat menjadi mekanisme adaptif yang memungkinkan warisan budaya tetap hidup, diproduksi, dan diapresiasi oleh masyarakat kontemporer.



Gambar 4. Display Wacinwa Koleksi Museum Sonobudoyo

3.2.5. Implikasi terhadap Pelestarian Warisan Budaya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa produksi souvenir Wacinwa di Ghriya Ukir Kulit Sagio tidak hanya menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap warisan budaya yang sebelumnya hanya dapat dijumpai dalam ruang pertunjukan maupun koleksi museum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar konsumen mengenal Wacinwa setelah melihat produk yang dipajang di ruang pamer Ghriya Ukir Kulit. Setelah memperoleh penjelasan mengenai sejarah singkat Wacinwa dan keterkaitannya dengan koleksi Museum Negeri Sonobudoyo, konsumen kemudian membeli souvenir tersebut sebagai bentuk kenang-kenangan sekaligus representasi identitas budaya yang mereka temui selama berkunjung. Temuan ini menunjukkan bahwa souvenir berfungsi sebagai media yang memperluas distribusi pengetahuan budaya kepada masyarakat di luar lingkungan museum.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Petrelli dan kawan-kawan [31] yang menjelaskan bahwa souvenir museum bukan sekadar benda koleksi, melainkan media yang menghubungkan pengalaman seseorang selama mengunjungi suatu situs budaya dengan ingatan yang terus dibawa setelah kunjungan berakhir. Menurut Petrelli dan kawan-kawan [31], souvenir berperan sebagai *bridge* antara pengalaman fisik dengan memori budaya sehingga nilai budaya suatu objek tetap dapat diingat dan diakses kembali meskipun pengunjung telah meninggalkan lokasi. Pada penelitian ini, fungsi tersebut juga terlihat pada souvenir Wacinwa. Produk yang dibawa pulang tidak hanya menjadi hiasan rumah, tetapi juga menjadi pengingat terhadap pengalaman mengenal Wacinwa sebagai hasil akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa di Yogyakarta.

Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Kang dan kawan-kawan [32] mengenai *hybrid tangible museum souvenirs*. Kang dan koleganya menunjukkan bahwa souvenir mampu membangun hubungan jangka panjang antara pengunjung dengan pengalaman budaya melalui proses personalisasi dan interaksi terhadap objek koleksi museum. Walaupun penelitian ini tidak menggunakan teknologi Augmented Reality sebagaimana dikembangkan Kang dan kawan-kawan [32], keduanya menunjukkan kesamaan pada fungsi souvenir sebagai media yang memperpanjang pengalaman budaya setelah kunjungan selesai. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Jika Kang dan kawan-kawan mengembangkan pengalaman digital, maka Ghriya Ukir Kulit justru mempertahankan pendekatan kriya tradisional melalui penggunaan kulit perkamen, tanduk, serta teknik tatah sungging sehingga hubungan antara pengunjung dan warisan budaya dibangun melalui kehadiran benda fisik yang autentik.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Trabskaia dan kawan-kawan [33] yang menyatakan bahwa souvenir museum dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat identitas budaya sekaligus membangun citra suatu daerah (*city branding*). Menurut Trabskaia dan kawan-kawan [33], produk souvenir yang memiliki keterkaitan kuat dengan koleksi museum mampu memperluas representasi budaya kepada masyarakat karena wisatawan membawa pulang sebagian identitas tempat yang dikunjunginya. Kondisi serupa ditemukan pada souvenir Wacinwa. Meskipun diproduksi oleh perajin di luar museum, desain visualnya tetap mengacu pada figur Wacinwa koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sehingga keberadaan souvenir tersebut secara tidak langsung memperluas representasi koleksi museum ke ruang-ruang domestik masyarakat. Dengan demikian, fungsi museum tidak berhenti sebagai tempat penyimpanan artefak, tetapi juga berlanjut melalui reproduksi budaya yang dilakukan oleh perajin lokal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komodifikasi Wacinwa melalui produk souvenir tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi bagi perajin, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pelestarian warisan budaya melalui penyebaran pengetahuan, perluasan akses masyarakat terhadap artefak budaya, serta penguatan identitas budaya lokal. Dalam konteks ini, souvenir tidak lagi dipahami sebagai produk pelengkap kegiatan wisata, melainkan sebagai media representasi budaya yang memungkinkan warisan budaya tetap hadir, dikenali, dan diapresiasi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3.3 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis bagi pengembangan industri kriya budaya, khususnya di Ghriya Ukir Kulit Sagio. Temuan mengenai komodifikasi Wacinwa menunjukkan bahwa figur wayang yang sebelumnya lebih dikenal sebagai artefak budaya dan koleksi museum memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk souvenir yang mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Bagi Ghriya Ukir Kulit, temuan ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan lini produk Wacinwa secara lebih sistematis, baik dari aspek produksi, pemasaran, maupun pengemasan narasi budaya yang menyertainya. Kehadiran souvenir Wacinwa juga memperkuat identitas Ghriya Ukir Kulit sebagai produsen kriya wayang yang tidak hanya memproduksi wayang kulit klasik Jawa, tetapi juga mengembangkan warisan budaya hibrida yang merepresentasikan pertemuan budaya Jawa dan Tionghoa. Selain itu, karakter historis dan visual yang dimiliki Wacinwa membuka peluang bagi pengembangan pasar wisata budaya yang tidak hanya menawarkan produk kerajinan, tetapi juga pengalaman edukatif mengenai sejarah dan keberagaman budaya di Yogyakarta.

Bagi perajin, produksi souvenir Wacinwa memberikan peluang diversifikasi produk di tengah perubahan kebutuhan pasar yang semakin dinamis. Keberadaan produk ini memungkinkan perajin untuk mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki tanpa harus meninggalkan teknik tradisional tatah sungging yang selama ini menjadi ciri khas kerajinan wayang kulit. Dengan tetap menggunakan material kulit perkamen, tangkai tanduk, serta teknik pewarnaan tradisional, proses produksi souvenir Wacinwa secara tidak langsung turut menjaga keberlangsungan pengetahuan dan keterampilan kriya yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, produksi souvenir juga berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat menopang keberlanjutan usaha perajin, terutama ketika permintaan terhadap wayang kulit pertunjukan mengalami fluktuasi.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa souvenir Wacinwa memiliki potensi untuk memperkaya ragam produk wisata budaya yang berasal dari Bantul. Kehadiran produk tersebut dapat memperkuat citra Bantul sebagai salah satu sentra kriya wayang yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri pariwisata kontemporer. Selain berfungsi sebagai cendera mata, souvenir Wacinwa juga berpotensi menjadi media

yang menghubungkan berbagai elemen ekosistem budaya, mulai dari museum sebagai ruang pelestarian artefak, sentra kriya sebagai ruang produksi budaya, hingga destinasi wisata sebagai ruang distribusi dan apresiasi budaya. Melalui hubungan tersebut, Wacinwa tidak hanya hadir sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai medium yang memperpanjang narasi sejarah dan kebudayaan kepada masyarakat yang lebih luas secara berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa komodifikasi budaya tidak selalu identik dengan degradasi nilai budaya. Temuan menunjukkan bahwa proses komodifikasi dapat berlangsung melalui mekanisme negosiasi yang memungkinkan unsur-unsur autentik tetap dipertahankan. Dalam kasus Wacinwa, adaptasi dilakukan pada aspek ukuran untuk memenuhi kebutuhan pasar, sedangkan material, teknik produksi, dan karakter visual tetap dipertahankan sebagai representasi identitas budaya. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian komodifikasi budaya dengan menunjukkan bahwa hubungan antara tradisi dan pasar tidak selalu bersifat antagonistik, melainkan dapat menghasilkan bentuk adaptasi yang relatif seimbang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil dan ruang lingkup temuan yang diperoleh. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Ghriya Ukir Kulit Sagio, sehingga hasil penelitian lebih merepresentasikan kondisi dan praktik komodifikasi Wacinwa yang terjadi pada konteks tersebut dan belum dapat menggambarkan fenomena yang lebih luas. Kedua, sumber data utama penelitian berfokus pada pemilik usaha dan perajin yang terlibat dalam proses produksi, sehingga sudut pandang yang diperoleh lebih banyak berasal dari pihak produsen. Ketiga, penelitian ini belum melibatkan konsumen atau wisatawan sebagai informan secara langsung, sehingga pemahaman mengenai persepsi, pengalaman, dan motivasi pembelian souvenir Wacinwa masih diperoleh secara tidak langsung melalui pengamatan dan pengalaman yang disampaikan oleh pemilik usaha. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan produsen Wacinwa lainnya karena keterbatasan akses dan minimnya informasi mengenai keberadaan produsen yang secara khusus memproduksi Wacinwa sebagai souvenir. Penelitian ini juga belum mengukur persepsi wisatawan secara sistematis terhadap aspek autentisitas, nilai budaya, maupun daya tarik visual produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai kajian yang berfokus pada proses komodifikasi Wacinwa dari perspektif produsen dalam konteks studi kasus tunggal.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan masih memiliki peluang yang luas untuk mengembangkan kajian mengenai Wacinwa dalam berbagai perspektif. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada persepsi wisatawan terhadap autentisitas souvenir Wacinwa guna memahami bagaimana produk tersebut diterima dan dimaknai oleh konsumen sebagai representasi budaya. Kajian mengenai strategi pemasaran Wacinwa dalam industri pariwisata budaya Yogyakarta juga menarik dilakukan untuk melihat bagaimana narasi sejarah, identitas budaya, dan keunikan visual dimanfaatkan dalam membangun nilai jual produk. Selain itu, penelitian komparatif antara souvenir Wacinwa dan souvenir wayang klasik Jawa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan strategi komodifikasi dan preferensi pasar terhadap kedua jenis produk tersebut. Dari perspektif ekonomi kreatif, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis kontribusi produksi Wacinwa terhadap keberlanjutan usaha kriya dan kesejahteraan perajin. Kajian mengenai jaringan distribusi, pasar kolektor, dan pola konsumsi Wacinwa di luar Yogyakarta juga berpotensi memperluas pemahaman mengenai peredaran produk budaya dalam konteks yang lebih luas. Di samping itu, penelitian mengenai peran souvenir sebagai media edukasi budaya juga penting dilakukan untuk melihat sejauh mana produk Wacinwa dapat berfungsi sebagai sarana pengenalan sejarah, identitas, dan keberagaman budaya kepada masyarakat maupun wisatawan. Dengan demikian, penelitian tentang Wacinwa tidak hanya berhenti pada persoalan komodifikasi budaya, tetapi juga dapat berkembang ke arah kajian pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan pendidikan budaya secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa (Wacinwa) sebagai produk souvenir di Ghriya Ukir Kulit Sagio berlangsung melalui proses adaptasi yang tetap mempertahankan identitas budaya. Transformasi dilakukan dengan mengubah ukuran figur dari sekitar 40 cm menjadi sekitar 17 cm (± 27 cm termasuk tangkai) sehingga lebih praktis sebagai produk wisata, sementara material kulit perkamen, tangkai berbahan tanduk, mekanisme persendian, serta teknik tatah sungging tradisional tetap dipertahankan. Selain mengalami perubahan visual, Wacinwa juga mengalami transformasi fungsi dari artefak budaya dan media pertunjukan menjadi benda dekoratif, koleksi, dan souvenir budaya. Temuan ini menunjukkan bahwa proses komodifikasi tidak dilakukan melalui

perubahan menyeluruh terhadap objek budaya, melainkan melalui adaptasi selektif yang mempertahankan unsur-unsur utama sebagai penanda autentisitas sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar pariwisata.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa komodifikasi budaya tidak selalu berimplikasi pada degradasi nilai budaya, tetapi dapat menjadi ruang negosiasi antara pelestarian tradisi dan kebutuhan pasar melalui strategi adaptasi yang tetap mempertahankan material, teknik produksi, dan karakter visual warisan budaya. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi referensi bagi perajin, museum, dan pengelola pariwisata budaya dalam mengembangkan souvenir berbasis warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai edukatif. Penelitian ini terbatas pada studi kasus tunggal di Ghriya Ukir Kulit Sagio sehingga belum merepresentasikan praktik komodifikasi Wacinwa secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji persepsi wisatawan terhadap autentisitas souvenir Wacinwa, efektivitasnya sebagai media edukasi budaya, serta strategi pengembangannya dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sagio selaku pemilik (*owner*) Ghriya Ukir Kulit Sagio Wayang yang berlokasi di Dusun Gendeng, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, atas kebaikan, kerja sama, bimbingan, serta izin akses data lapangan yang diberikan secara penuh selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh jajaran perajin di Ghriya Ukir Kulit Sagio yang telah meluangkan waktu dan membagikan pengetahuan serta pengalamannya berharga terkait proses pengerjaan tatah sungging Wacinwa, sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] Z. Duan, S. Tan, and S. W. Choon, "Crafting a Place-Based Souvenir for Sustaining Cultural Heritage," *Heliyon*, vol. 9, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e19308.
- [2] L. He and D. J. Timothy, "Tourists' Perceptions of Cultural and Creative Souvenir Products and Their Relationship with Place," *J. Tour. Cult. Chang.*, vol. 22, no. 2, pp. 143–163, 2024, doi: 10.1080/14766825.2023.2293287.
- [3] W. Chiengkul and P. Kumjorn, "Cultural Souvenir Attributes and Identity-Based Intentions in Heritage Tourism: Scale Development and Validation," *J. Qual. Assur. Hosp. & Tour.*, pp. 1–21, 2026, doi: 10.1080/1528008X.2026.2634775.
- [4] Y. Yang, M. Shafi, X. Song, and R. Yang, "Preservation of Cultural Heritage Embodied in Traditional Crafts in the Developing Countries: A Case Study of Pakistani Handicraft Industry," *Sustainability*, vol. 10, no. 5, p. 1336, 2018, doi: 10.3390/su10051336.
- [5] W. J. Ariffin, S. Shahfiq, F. Ahmad, A. Ibrahim, and F. S. Ghazalli, "Handicraft Innovations: A Strategic Approach to Preserving Intangible Cultural Heritage of Malaysia," *ISVS e-Journal*, vol. 10, no. 7, pp. 137–146, 2023.
- [6] D. Ashton and K. Patel, "'People don't buy art, they buy artists': Robot artists – work, identity, and expertise," *Convergence*, vol. 30, no. 2, pp. 790–806, 2024, doi: 10.1177/13548565231220310.
- [7] A. Arumugam, S. Nakkeeran, and R. Subramaniam, "Exploring the Factors Influencing Heritage Tourism Development: A Model Development," *Sustainability*, vol. 15, no. 15, p. 11986, 2023, doi: 10.3390/su151511986.
- [8] E. Park, B.-K. Choi, and T. J. Lee, "The Role and Dimensions of Authenticity in Heritage Tourism," *Tour. Manag.*, vol. 74, pp. 99–109, 2019, doi: 10.1016/j.tourman.2019.03.001.
- [9] M. Zhang, X. Guo, X. Guo, and A. Jolibert, "Consumer Purchase Intention of Intangible Cultural Heritage Products (ICHP): Effects of Cultural Identity, Consumer Knowledge and Manufacture Type," *Asia Pacific J. Mark. Logist.*, vol. 35, no. 3, pp. 726–744, 2023, doi: 10.1108/APJML-11-2021-0831.
- [10] Soelarto B and I. Albiladiyah, *Yogyakarta Wayang Cina-Jawa*. DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN . DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 1980.
- [11] H. B. Prasetya, "Khai So Bun Lena," Yogyakarta, 2021.
- [12] H. B. Prasetya, "The Head Iconography of the Chinese - Javanese Shadow Puppet (Wacinwa)

- Collection of the Sonobudoyo State Museum of Yogyakarta , Indonesia,” no. Iconarties 2019, pp. 308–313, 2020, doi: 10.5220/0008764003080313.
- [13] H. B. Prasetya, “Reconstruction of Chinese-Japanese shadow puppet Theatre,” 2014.
 - [14] F. Ferdiani, *Wayang Cina-Jawa: Sie Djin Koei Tjeng Tang*. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
 - [15] H. Kurniawan, N. Supriatna, A. Mulyana, and L. Yulifar, “Public History of Chinese-Japanese Harmony in Yogyakarta for History Learning with Diversity Insights,” vol. 33, no. 1, pp. 139–149, 2023.
 - [16] A. M. Irianto, “Komodifikasi Budaya di Era Ekonomi Global terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Eksistensi Industri Pariwisata dan Kesenian Tradisional di Jawa Tengah,” *J. Theol.*, vol. 27, no. 1, pp. 212–236, 2016, doi: 10.21580/teo.2016.27.1.935.
 - [17] M. S. Ulum, “Kesenian Tradisional di Era Komodifikasi Budaya: Pergeseran Makna Magis-Religius dalam Kesenian Jaranan,” *Empirisma J. Pemikir. dan Kebud. Islam*, vol. 29, no. 2, pp. 87–102, 2020, doi: 10.30762/empirisma.v29i2.169.
 - [18] F. Saptodewo, “Kajian Karakter Wayang Jabang Tetuka melalui Metode Penelitian Artistik,” *J. Desain*, vol. 4, no. 03, pp. 184–197, 2017, doi: 10.30998/jurnal desain.v4i03.1133.
 - [19] L. He and D. J. Timothy, “Souvenirs and place: suppliers’ perspectives,” *Curr. Issues Tour.*, vol. 27, no. 24, 2024, doi: 10.1080/13683500.2023.2277391.
 - [20] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 2016.
 - [21] R. K. Yin, *Case study research and applications: Design and methods*, 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 2018.
 - [22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2023.
 - [23] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 2018.
 - [24] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 2014.
 - [25] J. Saldaña, *The coding manual for qualitative researchers*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 2021.
 - [26] K. Patel, *Craft as a Creative Industry*, 1st ed. London: Routledge, 2024. doi: 10.4324/9781003301714.
 - [27] E. Cohen, “Authenticity and Commoditization in Tourism,” *Ann. Tour. Res.*, vol. 15, no. 3, pp. 371–386, 1988.
 - [28] A. Febriyanto, S. Riawanti, and B. Gunawan, “Mitos Rambut Gimbal: Identitas Budaya dan Komodifikasi di Dataran Tinggi Dieng,” *Umbara Indones. J. Anthropol.*, vol. 2, no. 1, 2017, doi: 10.24198/umbara.v2i1.15670.
 - [29] J. Larkin, ““All Museums Will Become Department Stores”: The Development and Implications of Retailing at Museums and Heritage Sites,” *Archaeol. Int.*, vol. 19, no. 1, pp. 109–121, 2016, doi: 10.5334/ai.1917.
 - [30] S. Toepler, “Caveat Venditor? Museum Merchandising, Nonprofit Commercialization, and the Case of the Metropolitan Museum in New York,” *Volunt. Int. J. Volunt. Nonprofit Organ.*, vol. 17, no. 2, pp. 99–113, 2006, doi: 10.1007/s11266-006-9012-6.
 - [31] D. Petrelli, M. T. Marshall, S. O’Brien, and others, “Tangible Data Souvenirs as a Bridge Between a Physical Museum Visit and Online Digital Experience,” *Pers. Ubiquitous Comput.*, vol. 21, no. 2, pp. 281–295, 2017, doi: 10.1007/s00779-016-0993-x.
 - [32] Y. Kang, Z. Zhang, M. Zhao, X. Yang, and X. Yang, “Tie Memories to E-souvenirs: Hybrid Tangible AR Souvenirs in the Museum,” in *Adjunct Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, in UIST ’22 Adjunct. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022. doi: 10.1145/3526114.3558722.
 - [33] I. Trabskaia, I. Shuliateva, R. Abushena, V. Gordin, and M. Dedova, “City Branding and Museum Souvenirs: Towards Improving the St. Petersburg City Brand: Do Museums Sell Souvenirs or Do Souvenirs Sell Museums?,” *J. Place Manag. Dev.*, vol. 12, no. 4, pp. 529–544, 2019, doi: 10.1108/JPMD-06-2017-0049.

BIODATA PENULIS

Nama : Abimanyu Putra Pratama, S.Sn
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 15 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Riwayat Pendidikan : S1 Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Mahasiswa S2 Program Pascasarjana, Pengkajian
Seni, Pascasarjana Institut Seni Indonesia,
Yogyakarta
Instansi : -
Alamat : Mundon RT 06, Babadan, Kelurahan Bantul,
Kapanewon Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta
HP/WA : 081904272174
Email : abimanyusagio@gmail.com
Judul Artikel : Komodifikasi Wayang Kulit Cina Jawa Sebagai
Souvenir: Studi Kasus Ghriya Ukir Kulit Sagio



Bantul

Jurnal Riset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Bantul

ISSN : 1412-8519 (media cetak)

ISSN : 2829-2227 (media online)

JRD

Strategi *Mix Level* melalui *Peer Assistant* di Kelas Bahasa Inggris SMP Islam Terpadu LHI

Fourzia Yunisa Dewi¹✉¹SMP Islam Terpadu LHI Banguntapan Bantul

✉fourziayunisa@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Submitted : July 2026

Revised : Augst 2026

Published : Sept 2026

KEYWORDS

Academic

Learning

Mix level

Peer assistant

ABSTRAK

Adanya perbedaan kemampuan belajar yang signifikan di antara siswa, ditambah dengan karakteristik emosional remaja yang kompleks, menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Idealnya, ketika belajar di sekolah guru bisa mengakomodasi permasalahan tersebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun, pada praktiknya guru masih belum bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dikarenakan berbagai macam kendala diantaranya kendala waktu, metode, dan kesiapan guru itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi yang bisa membantu menjembatani besarnya gap kemampuan antar siswa agar setiap individu bisa berkembang lebih optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana sekolah meningkatkan pembelajaran melalui keterampilan sosial, salah satunya melalui strategi *mix level* dengan pendampingan teman sebaya (*peer assistant*). Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di SMP Islam Terpadu LHI, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada guru, asisten guru (*Peer Assistant*), siswa *full-day*, siswa asrama, dan duta bahasa. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis data lapangan Miles dan Huberman. Validitas data dipastikan melalui triangulasi teknik dan sumber. Berdasarkan hasil penelitian, strategi *mix level* melalui *peer assistant* menunjukkan implikasi positif dalam peningkatan potensi akademik maupun non akademik. Disamping itu, strategi ini sebagai sarana intervensi sosial untuk mengurangi kultur individualis remaja, meningkatkan *self esteem* dan percaya diri juga untuk menciptakan ruang belajar yang nyaman secara sosial.

ABSTRACT

The significant differences in learning abilities among students, coupled with the complex emotional characteristics of adolescents, pose a challenge for teachers in facilitating learning. Ideally, when learning in school, teachers can accommodate these problems with differentiated learning. However, in practice, teachers are still unable to implement differentiated learning according to student needs due to various constraints, including time constraints, methods, and teacher readiness. Therefore, a strategy is needed to help bridge the large ability gap between students so that each individual can develop more optimally. The purpose of this study is to explore how schools improve learning through social skills, one of which is through a mixed-level

strategy with peer assistance. This research is a case study conducted at LHI Integrated Islamic Junior High School, with data collection through interviews and observations. Interviews were conducted with teachers, teacher assistants, full-day students, boarding students, and language ambassadors. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman field data analysis model. Data validity was ensured through triangulation of techniques and sources. Based on the research results, the mixed-level strategy through peer assistants has positive implications for improving both academic and non-academic potential. Furthermore, this strategy serves as a social intervention to reduce adolescent individualism, increase self-esteem and self-confidence, and create a socially comfortable learning environment.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengembangkan potensi setiap individu. Pada kenyataannya, kemampuan setiap siswa sangat heterogen baik kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Idealnya, ketika belajar di sekolah guru bisa mengakomodasi permasalahan tersebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun, pada praktiknya guru masih belum bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dikarenakan berbagai macam kendala diantaranya kendala waktu, metode, dan kesiapan guru itu sendiri. Apabila guru mengikuti kelompok bawah maka siswa yang mempunyai kemampuan diatas rata-rata akan tidak belajar hal baru sedangkan jika guru mengikuti kelompok atas maka kelompok bawah juga tidak belajar apapun karena kesulitan pemahaman. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi yang bisa membantu menjembatani besarnya *gap* kemampuan antar siswa agar setiap individu bisa berkembang lebih optimal. Secara umum di institusi pendidikan banyak menggunakan strategi pengelompokan kemampuan dengan mengkategorikan siswa menjadi tiga level yaitu level rendah, sedang dan tinggi atau *same level grouping* untuk memudahkan menyampaikan materi dan melakukan pendampingan. Hal yang sama dilakukan oleh peneliti Pratama ketika mengimplementasikan pendekatan saintifik setting kooperatif membagi siswa menjadi kelompok yang terdiri dari tiga siswa dengan kemampuan yang sama [1]. Begitu juga jurnal yang ditulis oleh Ningsih dkk merekomendasikan untuk kegiatan kelompok dengan kemampuan homogen untuk meningkatkan motivasi dan belajar siswa [2]. Namun, di sisi lain banyak peneliti saat juga merekomendasikan *mix level* dalam pengelompokan. Diatara penelitian yang dilakukan oleh Muchiri dan Njenga. Muchiri membandingkan hasil performa empat macam pengelompokan siswa yaitu pengelompokan secara random tanpa ada kriteria khusus, pengelompokan hasil pilihan siswa, pengelompokan dengan kesamaan level akademik dan pengelompokan dengan kemampuan akademik campuran. Siswa dikelompokkan dengan level yang sama dengan kemampuan diatas rata-rata akan saling tertantang dalam menyelesaikan soal namun siswa kelompok level bawah butuh kerja keras dan waktu penyelesaian lebih lama. Menurut Muchiri pengelompokan homogen akan efektif untuk siswa dengan level kemampuan yang tinggi tapi tidak untuk siswa dengan level kemampuan yang rendah. Sedangkan pengelompokan secara heterogen atau *mix level grouping* menunjukkan mayoritas siswa mendapat skor diatas rata-rata [3].

Meskipun strategi pembelajaran menggunakan pengelompokan heterogen (*mix level*) sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dari penelitian yang ada penerapan strategi ini masih belum banyak memperhatikan dan menyentuh sisi psiko-sosial siswa, dimana siswa mempunyai hambatan-hambatan ketika berinteraksi dikarenakan beberapa hal diantaranya sifat rendah diri, individualisme, dan sekat-sekat pertemanan antar mereka yang membuat *mix level* ini kurang berjalan secara optimal. Strategi *mix level* dengan *peer assistant* yang dilaksnakan di SMPIT LHI tidak sekedar penerapan kelompok secara kaku namun memperhatikan bagaimana interaksi dan intervensi sosial dilakukan. Strategi ini juga memberikan ruang siswa untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi teknis *mix level* melalui *peer assistant* mampu

memfasilitasi kelompok-kelompok kecil, menjaga aspek emosional, dan mengasah kepekaan sosial tanpa mengesampingkan pencapaian akademik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi strategi implementasi *mix level* melalui peran *peer assistant* di kelas Bahasa Inggris di SMP Islam Terpadu LHI, implikasi program *peer assistant* baik dari sisi akademik maupun non akademik serta mendalami kendala teknis, hambatan psikologis serta sosial dan bagaimana taktik manajemen konflik oleh *peer assistant* selama implementasi strategi tersebut berlangsung.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Desain Penelitian

Peneliti menggunakan studi kasus (*case study*). Metode penelitian *case study* adalah pendekatan penelitian yang memfasilitasi peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan sesuai konteks menggunakan berbagai sumber data. Eksplorasi permasalahan tidak hanya menggunakan satu lensa kaca mata namun dari berbagai lensa untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap fenomena yang dihadapi [4]. Menurut Robert K. Yin, studi kasus memungkinkan peneliti memahami mengapa dan bagaimana suatu peristiwa, situasi kontemporer itu terjadi. Mengapa sebuah keputusan diambil dan bagaimana implementasinya [5]. Penelitian dilakukan di SMPIT LHI Banguntapan Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

2.2 Subjek atau Objek dan Instrumen Penelitian

Wawancara dan observasi dilakukan kepada guru Bahasa Inggris, delapan siswa putra dan putri secara acak yang mewakili semua kelas 9, juga observasi kegiatan belajar siswa LHI. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengeksplorasi program kelas berupa *peer assistant* sehingga menghasilkan temuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman yaitu model pengumpulan data yang dilakukan secara interaktif, langsung, dan terus menerus sampai tuntas sehingga pengumpulan data mengalami kejenuhan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Tahapan dalam analisa data tersebut adalah pengumpulan data (*data collection*). Pada aktivitas ini peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga peneliti mendapatkan data yang banyak dan bervariasi. Selanjutnya reduksi data (*data reduction*), dimana peneliti akan menganalisa data dengan merangkum dan mengelompokkan data dan melakukan pengkodean. Kemudian, peneliti melakukan penyajian data (*data display*) peneliti menyajikan hasil reduksi data dan tematisasi dalam bentuk uraian singkat. Dan kemudian penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan temuan baru dari analisa data lapangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Secara umum, implimentasi strategi *mix level* melalui keterlibatan *Peer Assistant* (TA) di kelas Bahasa Inggris menunjukkan pola interaksi yang dinamis dan memberi dampak yang signifikan pada aspek peningkatan akademik maupun psikologis-sosial siswa. Pembagaian kelompok yang heterogen menciptakan ruang-rung semi privat yang memungkinkan siswa untuk lebih leluasa dan terbuka dalam mengkomunikasikan kesulitan belajar mereka. Di sisi lain pelibatan *assistant* memicu peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab kepemimpinan pada tutor itu sendiri. Meskipun begitu, data lapangan juga memperlihatkan adanya residu dinamika sosial berupa resistensi awal dan kecemburuan antar-kelompok remaja yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kelas heterogen ini. Secara umum program ini tidak sekedar sebagai alat bantu dalam pembelajaran namun juga bentuk intervensi sosial.

3.2. Pembahasan

Dari hasil pengamatan dan wawancara terkait implementasi *Strategi mix level* melalui *peer assistant* dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris didapatkan data berikut:

Strategi Implementasi *Mix Level* Melalui Keterlibatan *Peer Assistant*

1. Kualifikasi dan kriteria *peer assistant*

Assistant dipilih berdasarkan kriteria akademik. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Anggorowati bahwa assistant kelas dipilih oleh guru dengan kriteria diantaranya siswa mempunyai kemampuan Bahasa Inggris yang baik dan melebihi teman-teman yang lain [6]. Namun di SMP Islam Terpadu LHI, *assistant* dipilih tidak hanya sekedar nilai akademik yang melebihi rata-rata siswa di kelas namun juga siswa bisa membantu teman yang lain untuk belajar. Selain itu guru juga melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam menentukan *assistant* lainnya. Apabila akan ada penambahan *assistant* maka guru akan mengusulkan nama kepada *assistant* yang lain. Selain capaian akademik bagus, *assistant* yang dipilih adalah yang bersedia membantu teman mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh beberapa informan berikut ini:

“Karena syaratnya *assistant* itu kan dua, pertama akademik dan kedua bersedia bantu” (informan: 5, line: 404-406). Informan 5 juga menyampaikan terkait penambahan selama program berlangsung karena selama kegiatan belajar ada siswa yang menunjukkan kemampuan untuk menjadi *assistant*, “Kan akhirnya saya ngobrol sama teman-temannya. “Chesta bagus amat “. “Iya ust dia itu juga sering ngobrol terus pakai bahasa Inggris” gitu. Gimana kalau kita jadikan TA biar kalian mengampu kelompoknya bisa lebih kecil. Dan mereka setuju. Akhirnya kita nambah *assistant*, Chesta masuk jadi *assistant*” (informan: 5, line: 396-397).

Di kesempatan lain salah satu *assistant* menyampaikan bahwa dia ditambahkan sebagai *assistant* setelah ada diskusi antar guru dan *assistant* lain di kelasnya. “Aku ditambahin karena udah didiskusin sama *assistant* yang lain eee katanya yang apa, Kak Kei itu apa yang paling memasuki kriteria” (informan: 1, line: 17-18). Pada penelitian sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemilihan tutor berdasarkan siswa yang mempunyai prestasi belajar yang baik dan kemampuan memberikan motivasi serta mampu membimbing teman sebayanya [7]; [8]. Dalam menentukan *assisten* dalam *peer assistant* perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya selain kemampuan akademik juga memperhatikan kemampuan *soft skill* yang lain seperti kemampuan membimbing teman. Tidak semua siswa yang punya kemampuan akademik bagus akan sekaligus bisa membimbing. Di sisi lain, guru juga memperhatikan berjalannya aktivitas *peer assistant* ini sehingga ketika ada kelompok yang tidak berjalan dengan baik maka guru bisa ikut terlibat [9].

2. Peran dan tanggungjawab *peer assistant*

Peer assistant mempunyai peran dalam menangani kelas besar maupun kelompok –kelompok kecil. Kelas besar diantaranya membuka kelas, memberikan instruksi ataupun yang lainnya. Hal ini disampaikan oleh salah satu *assistant*: “Kadang satu *assistant* itu handle semua kelas, kadang *assistant* handle kelompok-kelompok kecil gitu” (informan 2, line: 93-94). Pernyataan ini didukung oleh pernyataan siswa anggota kelompok:” ...biasanya per kelompok gitu terus kayak model presentasi-presentasi gitu nanti kita dibagi beberapa kelompok nanti dijelaskan itu yang bakal ngedampingin berkelompok Itu” (informan: 6, line:440-442). *Assistant* yang lain juga menyampaikan bahwa ketika pendampingan kelompok maka harus bisa mengarahkan teman-teman kepada tujuan kegiatan kelompok. Biasanya aku ikut gabung dulu (dengan pembicaraan mereka) bentar, habis itu langsung alihin topik. Ini eh ini ini nomor ini tuh ini gimana kerjaan kalian dah beres belum akhirnya baru mereka ikutan. Jadi harus ikut gabung dulu” (informan 1, line: 57-62).

Assistant menghidupkan interaksi kelompok yang mereka fasilitasi dengan proaktif menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh teman-temannya terutama kepada teman yang sukanya lebih cenderung diam di kelompok agar bisa lebih terlibat forum mereka: “Kan ada yang diem-diem tapi ada yang over banget ada yang suka berisik suka ngomong omong lebih enakan yang ngomong karena mereka kalau nggak ngerti beneran langsung tanya gitu tapi kalau yang diem-diem tuh kayak.. kayak ya udah disimpan gitu harus ditanya dulu udah ngerti atau belum baru bilang” (informan 1, line: 45-48). Selama pendampingan kelompok, *assistant* membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran. “kayak misalnya guru kasih penjelasan terus nanti ada yang enggak ngerti dia kan bantu. Jadi teman-teman yang lain bisa tanya, tapi jika masih susah jelasin juga baru tanya ke guru” (informan 3, line: 123-125). Peran

Peer Assistant secara umum adalah menjadi fasilitator dan perpanjangan guru dalam mendampingi teman mereka belajar. Mereka dapat menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan diterima teman atau yang mereka bimbing [10].

Walaupun *assistant* mempunyai peran yang besar dalam kegiatan belajar di kelas, namun *assistant* tidak selalu dilibatkan dalam peran mendampingi teman. Apabila dibutuhkan untuk melakukan pendampingan maka guru akan mengkoordinasikan dengan *assistants* di kelas tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut data yang diperoleh dari wawancara guru: “Tapi ketika belajar itu tidak selalu harus pakai *assistant* karena capek juga mereka. Kadang mereka juga, anak itu memang jadi sebuah kebanggaan kalau bisa ngemong (memfasilitasi) teman tapi kadang mereka juga butuh... butuh di mong (difasilitasi) intensitas sesuai kebutuhan” (informan: 5, line: 336-339).

3. Fleksibilitas pengelompokan

Dasar pengelompokan untuk pembagian siswa untuk pendampingan *assistant* dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pengelompokan kadang sesuai dengan level yang sama dan lebih sering dilakukan pengelompokan dengan level yang berbeda sesuai hasil diskusi para-*assistant* dengan guru. Hal ini disampaikan oleh informan 5:

Jadi, situasi tidak selalu monoton dan kadang juga berbasis dengan kesanggupan *assistant* saja. Misal dalam sebuah aktivitas kelompok A berani mix, sedang kelompok B tidak berani mix “Ust aku nggak bisa kalau sama anak” itu berdasarkan kemampuan misalnya “Menurutku aku tidak cukup sanggup untuk *handle* dengan *mix* karena kalau kayaknya sih aku sama dia kemampuan kita hampir sama Ust” gitu. Gimana teman-teman? Oh, ya sudah berarti anak yang apa namanya kelompok yang *high level* maka akan diampun oleh *assistant* yang memang paling, yang paling tinggi kemampuannya. Kadang saya biarkan secara natural mau gimana yang penting *a group of five* dan salah satunya adalah TA gitu. Cuman ya itu kalau terlalu dibiarkan milih sendiri, di beberapa kelas tertentu ya misalnya 9C itu pasti ada lima anak yang itu ditinggalkan tidak dipilih oleh siapapun (informan: 5, line: 308-316).

Pernyataan informan 5 sesuai dengan apa yang disampaikan anggota kelompok berikut ini: “Biasanya kelompoknya acak, enggak tergantung dari gurunya. Gurunya mau kelompoknya tergantung kayak misal ada tergantung dari kemampuan ada acak gitu. Tapi lebih baik sih kelompoknya acak aja. Soalnya biar kalau misalnya setiap kali ganti TA ya makin inilah... misal yang satu ada masih kurang kalau acak lagi kelompoknya bisa eh ... kenal sama yang lain “ (informan 3, line: 127-131). Dan juga disampaikan oleh informan 2 sebagai *assistant*: “... mungkin biar misalnya kalau dalam satu grup itu ada orang yang bahasa Inggrisnya dikatakan kurang itu bisa diseimbangkanlah sama ada di dalam satu kelompok ada orang-orang yang mungkin Bahasa Inggrisnya lebih *advance* jadi bisa kayak diseimbangkan gitu kalau itu pendapat saya sih “ (informan 2, line: 87-90).

Beberapa peneliti menyampaikan bahwa pengelompokan siswa dengan kemampuan yang berbeda akan lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar. Bekiryazıcıa menyampaikan bahwa dalam kelas bahasa diperlukan kerja kelompok dengan komunikasi dan interaksi antar siswa yang bisa difasilitasi teman sebaya sehingga mereka bisa mencapai *zone of proximal development* (ZPD) mereka dan akhirnya menjadi pembelajar yang mandiri [11], selain itu di penelitian sebelumnya juga disampaikan bahwa kegiatan belajar secara kolaboratif akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling belajar. Siswa yang percaya diri akan menjadi model bagi siswa yang masih perlu usaha untuk berjuang dengan aktivitas belajar mereka [12].

Implikasi Program *Peer Assistant* dari Sisi Akademik maupun Non Akademik Siswa

1. Peningkatan kompetensi akademik *assistant*

Kegiatan pendampingan kelompok oleh teman sebaya atau *peer assistant* menunjukkan hal positif tidak hanya untuk siswa yang didampingi tetapi juga untuk *assistant* baik di ranah akademik maupun non akademik. Peningkatan untuk bidang akademik diantaranya *assistant* menyampaikan bahwa dengan menjadi kemampuan bahasa Inggris dan komunikasi mereka semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ketika mereka harus mendampingi kelompok maka mau tidak mau mereka harus menyiapkan materi yang harus disampaikan. Mereka juga harus mempelajari terlebih dahulu. Apa yang disampaikan *assistant* dalam wawancara berikut ini menunjukkan kenaikan keterampilan bahasa Inggris setelah menjadi TA:

Nah itu semenjak itu saya merasa kalau bahasa Inggris saya mulai naik dikit-dikit walaupun sedikit tapi naik terus ya karena karena saya ngajarin ke orang lain saya juga jadi lebih mendalami ilmu yang sama kan. Kalau saya ngajar sama temen-temen itu misal saya lagi belajar tuh

grammar, nah itu waktu saya jelaskan ke teman kok saya tiba-tiba paham juga sama materinya baru awalnya sebelumnya saya enggak paham tapi kok ketika jelasin sama teman lain kok saya bisa paham juga misalnya gitu (informan 2, line:107-115).

Peningkatan secara akademik disampaikan juga oleh *assistant* yang lain: “Kecenderungan Nabila dalam eee apa namanya berbicara terus melihat soal bahasa Inggris itu lebih sering lebih pede, lebih apa ya lebih fasih gitu heeh cara berbicaranya. Terus juga apa namanya eee kayak tenses jadi kayak tahu gitu kan lebih paham karena seiring kita mengajari teman-teman jadi membantu mendampingi teman-teman kita juga dapat ilmunya gitu loh “(informan: 7, line: 540-544). Menurut studi literatur bahwa kegiatan *peer assistant* akan memberi manfaat akademik kepada tutornya juga karena dengan mendampingi teman maka mereka akan lebih banyak mengingat dan juga dapat meningkatkan kesadaran metakognitif mereka (Hartinah & Hendriani, 2022; Mustika & Royanto, 2018). Selain itu pada penelitian terdahulu juga disebutkan bahwa kegiatan tersebut dapat menunjukkan peningkatan akademik [8][7]; Jacobs, 2004).

2. Peningkatan kemampuan non akademik *assistant*

Keuntungan program bagi *assistant* selain kemampuan akademik meningkat tapi juga menunjukkan kemampuan non akademik. Diantaranya, meningkatnya *self-esteem*, menjadi lebih rajin dan disiplin, lebih peka dan rendah hati, berempati dan memahami cara belajar teman, lebih bersabar, lebih bertanggung jawab dan keterampilan manajemen kelompok [12]. Buch dan Butera dalam jurnalnya menyampaikan bahwa: “... teachers’ willingness to prepare their learners for cooperation when structuring cooperative learning and promote innovative cooperative learning situations that would sustain long-term social and cognitive growth in the classroom” [16]. *Self-esteem* terlihat dari pengakuan siswa bahwa mereka menjadi lebih yakin dengan kemampuan dirinya dalam keterampilan Bahasa Inggris. Berikut beberapa data yang menunjukkan peningkatan siswa: “Jadi merasa lebih yakin karena ternyata aku bisa gitu. Yakin kalau misalnya aku mampu buat bisa memahami, buat nguasain materinya sama aku jadi lebih banyak dapat ilmu, gitu” (informan: 9, line 775-776). Berikut informan lain juga menyampaikan terkait peningkatan percaya dirinya: “Jadi itu manfaatnya juga cukup banyak selain juga mendapatkan Alhamdulillah pahala gitu kan kalau kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan juga mem-*booster* Nabila dalam kepercayaan diri juga” (informan: 7, line: 536-538). Siswa merasa bangga dan merasa dipercaya karena bisa terpilih menjadi *assistant* terlihat dari apa yang disampaikan salah satu informan siswa: “Gimana ya...seneng tapi ya punya beban gitu. Seneng karena menjadi anggota terpilih, bangga...” (informan 1, line: 27). informan 5 juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama: “Suatu saat saya pernah bertanya begitu dan mereka menjawab “Ust aku sangat tidak menyangka jadi *assistant*, terima kasih sudah percaya. Aku tidak percaya kalau aku tuh apa namanya dipercaya itu loh... *being trusted*” (informan: 5, line:417-420).

Pengalaman *assistant* setelah menjalankan perannya menjadi lebih rajin dan disiplin belajar: “Aku jadi lebih rajin, lebih disiplin belajar biar bisa kalau misalkan ada temennya nanti bertanya” (informan 1, line: 30-31). Dari guru juga disampaikan bahwa kegiatan *peer assistant* ini membuat para-*assistant* peka terhadap teman-temannya dan tumbuh kepedulian: “Nah di sini kita itu ngajak eh... apa namanya ... anak-anak yang pintar itu yang lebih cepat perkembangannya itu untuk lebih aware dan kemudian eee menumbuhkan kepedulian apa yang bisa saya lakukan untuk sekitar saya. Jadi, eee... apa namanya slogan kita adalah pinter bareng-bareng gitu” (informan: 5, line: 248-250).

Peer assistant melatih siswa untuk lebih menghargai, lebih peka dengan teman mereka dan lebih *humble*: “Nah di sini kita itu ngajak eh... apa namanya ... anak-anak yang pintar itu yang lebih cepat perkembangannya itu untuk lebih *aware* dan kemudian eee menumbuhkan kepedulian apa yang bisa saya lakukan untuk sekitar saya. Jadi, eee... apa namanya slogan kita adalah pinter bareng-bareng gitu” (informan: 5, line: 244-250). Informan juga menyampaikan:” Jadi untuk pentingnya jadi apa namanya aspek sosial dari teman-teman yang dibantu maupun teman-teman yang membantu itu semuanya terasa. Teman-teman yang membantu, dia jadi lebih peka dan kita belajar untuk tetap bisa *humble*” (informan: 5, line: 27-281). Informan 1 menyampaikan bahwa dia menjadi lebih mengerti bagaimana gaya belajar teman-temannya sehingga dia bisa menyesuaikan. “Ya aku jadi ngerti kalau ini lebih enak kalau orang ini dia cara belajarnya gimana ini cara belajarnya gimana terus aku menyesuaikan” (informan 1, line: 54). Beberapa studi menunjukkan hal serupa bahwa terdapat peningkatan baik akademik maupun non akademik diantaranya keterampilan sosial [10]. Foster menyampaikan selain akademik juga melatih empati [17].

3. Peningkatan kompetensi akademik untuk siswa non *assistant*

Apabila dilihat dari siswa yang menjadi anggota kelompok pendampingan, maka akan terlihat beberapa keuntungannya yaitu siswa akan menjadi lebih paham dalam proses pembelajaran karena bahasa yang digunakan teman sebaya dalam membimbing lebih mudah dipahami mereka. Ini sejalan dengan pernyataan siswa berikut: “Bahasa anak muda sama guru kan ada ...yang apa kadang kan beda. Jadinya, kalau misalnya teman itu bisa jadi apa lebih mudah pahamnya lebih cepat juga pahamnya”(informan 3, line: 160-161) dan hal yang sama juga pada penelitian yang dilakukan oleh Munthe [9].

4. Peningkatan ruang belajar yang nyaman secara emosional untuk siswa

Aktifitas kelompok kecil dengan pendampingan teman sebaya juga membuat siswa lebih nyaman, lebih fokus dan tidak canggung ketika bertanya sehingga bisa terlibat aktif dalam proses belajar. Siswa yang didampingi lebih mengenal kebutuhannya dan menyampaikan kepada *assistant*. Beberapa siswa anggota kelompok menyampaikan terkait hal ini:

... dibagi beberapa kelompok itu mereka jadi lebih ngerti juga kan. Soalnya kalau misalkan di kelas besar itu kayak ada yang enggak merhatiin nanti ada yang main sendiri apa-apa aja, tidur, tapi karena dikelompokin jadi lebih ngerti, enggak malu enggak malu tanya teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama ust Tika tuh ada yang takut ada yang malu terus kadang ada yang ngobrol sendiri enggak merhatiin (informan 1, line: 34-38).

Informan lain juga memberikan pendapatnya terkait atmosfer yang nyaman ketika aktivitas kelompok bersama *assistant*: “Ya cukup terbantu Ust, soalnya kan teman sendiri jadi nggak perlu kayak canggung banget lah kalau misalnya mau tanya tentang materi apa yang belum tahu” (informan 3, line: 133-134). Kenyamanan untuk berdiskusi dengan teman sebaya juga disampaikan oleh informan guru: “Ketika anak lebih mudah paham kalau yang ngajarin temennya. Dia merasa secure ketika nggak tahu itu lebih nyaman untuk bertanya dengan temannya dan itu membuka kesempatan lebih lebar bagi anak-anak yang masih low itu untuk bisa berani belajar dan menapaki tahap selanjutnya” (informan: 5, line: 251-253). Dari siswa sebagai *assistant* juga menyampaikan kondisi ini sebagai berikut: “Pemahaman konsep itu juga. Pemahaman konsep kalau kadang-kadang ada temen yang mungkin malu atau misalnya kurang percaya diri kalau misalnya nanya ke Ustadzah Tika ada yang nanya ke kita” (informan: 7, line: 502-504). Penerapan metode ini meningkatkan percaya diri siswa sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Nurhasanah [18].

Dengan adanya *peer assistant* ini secara umum membantu tercapainya tujuan belajar baik secara keterlibatan mereka maupun capaian mereka:

Tujuan belajar jadi lebih jadi tercapai saya bisa mengatakan *overall* tercapai. Misalnya belajar jenis teks jadi indikasinya adalah anak ngambil sebuah teks sudah langsung ngetik ini teksnya apa social structure-nya apa *social function*, structure sama language feature-nya apa kayak gitu. Partisipasi ya partisipasi dalam belajar jadi lebih aktif kan. Jadi lebih aktif kalau misalnya dalam kelas classical mungkin hanya satu dua anak saja yang bicara ketika ada kelompok kecil dalam satu waktu misalnya 5 atau mereka bisa saling kasih feedback jadi kelasnya saya merasa lebih hidup dibanding hanya dengan One Man show (informan: 5, line: 345-353).

Dinamika Kendala dan Hambatan di Lapangan

Karakteristik psikososial remaja usia SMP yang menunjukkan egosentris dan berbasis kelompok menjadi tantang pendidik dalam melakukan pendampingan belajar. Begitu pula dalam pelaksanaan program *peer assistant* mengalami beberapa kendala diantaranya:

1. Adanya kendala waktu koordinasi

Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi program ini adalah waktu luang untuk koordinasi dan evaluasi antara guru dengan *assistant*, terutama untuk *assistant* siswa program *fullday*. Anak-anak *fullday* di sekolah hanya ketika jam sekolah. Ketika jam sekolah selesai mereka pulang. Berbeda dengan siswa boarding yang waktu nya masih panjang setelah jam belajar selesai. Hal ini disampaikan oleh guru pengampu mapel. “Kalau anak *fullday* itu koordinasinya agak susah ngambil waktunya tapi kita punya grup *WhatsApp* aah..saya dengan 9C ada, saya dengan 9D ada” (Informan 5, line 322-326).

2. Hambatan sosial berupa resistensi lintas *circle* pertemanan

Di tingkat SMP, siswa sudah membentuk kelompok-kelompok pertemanan dimana mereka lebih nyaman untuk berbagi banyak hal di komunitas tersebut. Ketika guru membagi kelompok belajar dengan siswa yang lebih heterogen maka muncul resistensi sosial berupa rasa tidak nyaman, canggung dan lainnya. Beberapa kendala sosial baik dari *assistant* maupun dari siswa *non assistants* muncul.

Kendala tersebut diantaranya siswa anggota kelompok maupun *assistant* merasa tidak nyaman jika mendampingi atau didampingi oleh teman yang kurang cocok: “Tantangannya ya jika misalnya karena usia segitu kan kadang apa namanya circle-circle nah circle yang terlalu kuat. Jadi kalau *assistant* lintas *circle* itu di awal mungkin teman-teman ada resisten tapi kalau saya perhatikan semakin ke sini sudah semakin bisa blending meskipun tidak ..tidak *smooth* sekali” (informan: 5, line: 283-286). Informan lain dari siswa *non assistant* juga menyampaikan hal yang sama:” Kadang biasanya *assistant* agak malesan gitu suka males nganu dampingi temen-temennya... Terus kadang suka apa... enggak sesuai sama kelompoknya gitu. Kayak misal ada kayak *assistant* nya tuh misalnya eh tidak cocok sama si C terus dapat si C terus kayak enggak suka terus kayak enggak membantu si C-nya itu “(informan: 4, line: 208-211). Pernyataan siswa *non assistant* yang lain menguatkan pendapat sebelumnya: “... yang kurang dekat kan kadang juga masih ada malu lah Ust, terus ada rasa canggung gitu meskipun udah ya udah lama temenan Usth jadi tidak terlalu aktif” (informan 3, line: 154-155). Hal ini juga diakui oleh *assistant*:

Ya mungkin kalau dapat kelompok yang kurang sesuai sama apa yang diinginkan saya, saya agak kayak kurang aja sih usth. Contohnya, ya mungkin kalau masalah pribadi saya kan saya orangnya agak itu agak selektif orangnya sama orang lain kalau misalnya saya dikelompokkan sama satu orang yang itu duh enggak aku banget nih, enggak enggak apa ya kayak enggak sreg sama aku terus ya aku duluan aduh aku kayak putus asa duluan kok kayak ga mau mendampingi kelompok itu (informan 2, line: 96-101).

3. *Assistant* tidak bisa melayani semua pertanyaan teman karena keterbatasan pengetahuan

Kendala lain yang terjadi ketika *peer assistant* program sedang berjalan adalah *assistant* terkadang tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman yang dirasa sulit. Seperti apa yang disampaikan informan berikut: “Eee misalnya ehm dihadapkan dengan ada misalnya nih eee ...kayak soal rumit banget teman-teman itu kan kadang tuh kayak ini apa Nab, ini apa aku enggak ngerti langsung jelasin dong gitu kan tapi kadang kita sendiri juga kurang tahu akhirnya jelasinnya juga setengah-setengah gitu kan enggak sesuai yang kita tahu” (informan: 7, line: 521-524). Pendapat lain menyampiakan hal yang semisal yaitu:”.. kadang nggak enak nya kita kewalahan sama teman-teman. Kadang-kadang ada yang kayak nggak tahu gini gimana gitu kita harus tahan dulu semuanya karena kadang kita juga ga mengerti itu sama materinya. Jadi misalnya kita misalnya nanya ini gimana ini gimana gitu kita bisa jelaskan sebisa kita enggak yang sesempurna ust Tika kalau misalnya jelasin gitu” (informan: 9, line 762-769).

Untuk kelompok tertentu kadang perlu bantuan spesifik agar mereka dapat terlibat dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Beberapa siswa yang kemampuan di bawah rata-rata dan inisiatif kurang mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan siswa yang lain. Peran guru lebih banyak untuk mendampingi dan membimbing mereka. Hal ini disampaikan oleh guru Bahasa Inggris:” ... Mereka emang kebingungan nggak tahu bagaimana. Mereka memang *low level* dan secara inisiatif kurang dan enggak terlalu greget dengan sekolah ya akhirnya kita bikin kelompok sendiri ya. Kerjanya memang paling lambat dibanding yang lain” (informan: 5, line 319-322). Guru tersebut menambahkan:

Akhirnya di kelompok ini khusus saya temaninya lebih intensif kalau kelompok yang lain kan cuma tak cek oke aman, aman, aman. Nah saya duduk di sini nemenin mereka ngerjain terus bahkan misalnya *googling* nyari informasinya saya bantu cari kata kuncinya recount text SMP klik udah gimana coba ini dipilih nah yang diambil yang ini aja ini enggak usah kalau udah *copy paste* aja tapi kamu pelajari ya. Sedetail itu koordinasinya. (Informan 5, line 328-333).

4. Hambatan psikologis

Siswa yang ditunjuk sebagai *assistant* merasa ada beban mental karena menghruskan diri bisa selalu tampil lebih sempurna dari teman yang lainnya, harus lebih tahu dan takut salah. Beberapa informan menyampaikan hal tersebut. “Gimana ya..seneng tapi ya punya beban gitu. Seneng karena menjadi anggota terpilih, bangga. Bebannya karena kita harus bisa lebih dari yang lain, karena ngajarin”(informan 1, line: 27,28). Hal ini juga disampaikan informan 7 dalam kutipan berikut:” kayak soal rumit banget teman-teman itu kan kadang tuh kayak ini apa Nab, ini apa aku enggak ngerti langsung jelasin dong gitu kan tapi kadang kita sendiri juga kurang tahu akhirnya jelasinnya juga setengah-setengah gitu kan enggak sesuai yang kita tahu akhirnya dia gimana sih Nab, jadi kaya tertekan”.

Hambatan yang dialami dalam melibatkan *peer assistant* dalam *strategi mix level* pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya hambatan teknis waktu yang sulit untuk koordinasi namun juga ada hambatan sosial dan psikologis yang dialami baik *assistant* maupun anggota kelompok. Maka

peran guru di sini juga dipentingkan untuk mengatur kelompok dengan memperhatikan kondisi sosial siswa. Hal ini juga selaras dengan temuan dan apa yang disampaikan Wulandari dkk dalam jurnalnya bahwa guru perlu harus lebih peka terhadap kondisi sosial dan memberikan pendampingan pada kelompok yang kurang stabil [19].

Taktik Manajemen Konflik oleh *Peer Assistant*

Selama pelaksanaan program para *peer assistant* menghadapi dinamika kelompok di lapangan mulai dari teman yang tidak fokus, mengobrol di luar topik, hingga rasa canggung lintas *circle* pertemanan. “Kan ada yang diem-diam tapi ada yang over banget ada yang suka berisik suka ngomong omong lebih enakan yang ngomong karena mereka kalau nggak ngerti beneran langsung tanya gitu tapi kalau yang diem-diam tuh kayak.. kayak ya udah disimpan gitu harus ditanya dulu udah ngerti atau belum baru bilang”(informan 1, line: 45-48). *Peer assistant* tidak hanya diam dalam melakukan pendampingan tapi juga memperhatikan teman-teman di kelompoknya dan menanyakan langsung apabila ada teman yang terlihat kurang paham dengan pelajaran yang diberikan.

Ketika ada teman yang kurang fokus dan terdistraksi dengan tema tertentu dan cenderung lebih banyak mengobrol tema lain tidak mengerjakan tugas mereka maka *peer assistant* akan menggunakan taktik *balending and redirecting* atau ikut membaur dalam aktivitas kelompok tersebut dan tanpa sadar dia akan mengalihkan tema pembicaraan kembali ke tugas yang harus mereka kerjakan. Taktik ini berhasil mengatur teman kelompok mereka tanpa ada konflik yang terjadi. “Kalau misalkan tiba-tiba temen-temen langsung ribut langsung ngomong yang lain (di luar topik) tapi nggak belajar-belajar gitu kadang pengen marah gitu. Biasanya aku ikut gabung dulu (dengan pembicaraan mereka) bentar, habis itu langsung alihin topik. Ini eh ini ini nomor ini tuh ini gimana kerjaan kalian dah beres belum akhirnya baru mereka ikutan. Jadi harus ikut gabung dulu” (informan 1, line: 57-62).

Dalam mengatasi kecanggungan dalam komunikasi antar *peer assistant* dan teman kelompok yang diampu maka mereka sengaja menggunakan gaya bahasa keseharian sesuai dengan bahasa mereka dan asisten memposisikan diri mereka seperti teman bukan sebagai guru yang menggurui. Sehingga, mereka lebih nyaman dalam berkomunikasi. Hal ini disampaikan oleh informan 3, “Sama guru kan kadang ada yang kayak ada yang apa... canggung ada yang enggak. Ya...kalau sama teman sendiri jadinya enggak canggung lah kalau misalnya mau tanya tentang sesuatu” (responden 3, line: 136-138). Selain itu juga dari perkataan lain dari informan 3, bahas anak muda sama guru kan ada yang apa...kadang beda. Jadinya kalau misalnya teman itu bisa jadi apa lebih mudah pahamnya lebih cepet juga pahamnya” (informan 3, line: 157-161).

Dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi kekacauan atau miskomunikasi ketika pelaksanaan pendampingan maka dilakukan taktik preventif dengan koordinasi sebelum hari H pelaksanaan pendampingan. Guru mengumpulkan *assistant* untuk menyamakan persepsi dan koordinasi. “Misalnya hari ini ada kelas *story telling* nah waktu itu kita kayak sebelumnya itu udah di *briefing* dulu lah sama Ust Tika itu eh ya mau ngapain aja ini menurut ini harus gini harus gini nanti kriteria pertanyaannya Ini ..ini.. ini.. habis itu ya kurang lebih kalau tugas sama Ust Tika gitu” (informan 2, line: 75-83). Menurut salah satu informan kami yang juga seorang *assistant* menyampaikan bahwa sebelum aktifitas pendampingan guru bertemu dengan *assistant* untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan terkait agenda pendampingan yang akan dilaksanakan di hari berikutnya. Berikut kutipan dari wawancara kami: “Kita dipanggil malam-malam buat ngasih tahu ke teman-temannya besok eh... bahasa Inggrisnya ngapain, jadi udah nyiapin dulu dari malamnya terus tugasnya itu apa dampingi, bantuin kalau ada teman-teman kesusahan” (informan: 1, line: 13-15). Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh *assistant* yang lainnya: “Misalnya hari Senin tuh kita misalnya dibutuhin sama Ustazah Tika terus biasanya malam Senin di kita kayak dipanggil sama ust Tika disuruh kumpul di ruang meeting kita tuh kayak *briefing* sebelum kayak besok mau gimana soalnya itu eh hari Senin itu kayak ada kita handle kelas” (informan 2, line: 77-83).

Dalam berinteraksi dan berkomunikasi tentu saja akan ditemui konflik atau miskomunikasi. Namun, para *peer assistant* dapat mengatasi konflik dengan baik. Hal ini menunjukkan kecerdasan emosional siswa mulai terbangun. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa ditemukan korelasi yang signifikan antara kecerdasan emosional dan manajemen konflik [20].

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukkan latar belakang diimplementasikannya program *peer assistant* karena adanya kemampuan siswa yang berbeda-beda dan proses pembelajaran secara klasikal tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa. Maka, guru melakukan inisiatif untuk menggunakan strategi *mix level* atau level campuran dalam belajar kelompok. Hal ini dilakukan dengan menerapkan metode *peer assistant* dalam kegiatan belajar. Strategi *mix level* dilakukan dengan menentukan kualifikasi dan kriteria *peer assistant*. *Assistant* dipilih tidak hanya sekedar dari nilai akademik yang melebihi rata-rata siswa di kelas namun juga dipilih siswa yang bisa membantu teman lain untuk belajar. Selain itu, guru juga melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam menentukan *assistant* lainnya. Adapun peran *assistant* adalah menangani kelas besar maupun kelompok –kelompok kecil. Kelas besar diantaranya membuka kelas, memberikan instruksi ataupun yang lainnya. *Assistant* menghidupkan interaksi kelompok yang mereka fasilitasi dengan proaktif menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh teman-temannya terutama kepada teman yang sukanya lebih cenderung diam di kelompok agar bisa lebih terlibat forum mereka. Sementara untuk pengelompokan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran yang rata-rata kelompok ditentukan secara campuran. Adapun implikasi dari penerapan program ini diantaranya terdapat peningkatan kompetensi akademik maupun non akademik bagi *assistant* maupun anggota kelompok. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program ini dapat meningkatkan ruang belajar yang nyaman secara sosial. Disisi lain, dari hasil penelitian juga menunjukkan dinamika kendala dan hambatan yang dihadapi baik dari guru dan siswa. Kendala dan hambatan tersebut adalah keterbatasan waktu untuk *assistant* dan guru dalam menyiapkan program ruang berdiskusi juga evaluasi terutama untuk siswa *fullday* yang tidak mukim. Kendala lain berupa hambatan sosial yaitu resistensi antar *circle* pertemanan dimana baik *assistant* maupun anggota kelompok sering kurang nyaman satu dengan lainnya dikarenakan kurang cocok dan bukan dari *circle* mereka. Dalam penelitian ini juga didapati bahwa *assistant* terkadang tidak bisa melayani semua pertanyaan teman karena keterbatasan pengetahuan sehingga perlu keterlibatan guru untuk membantu. Hambatan psikologis dari *assistant* juga muncul dari penelitian ini. Mereka mempunyai beban moral karena harus lebih tahu dan lebih sempurna dari teman-teman yang didampinginya. Meskipun dalam penerapan program ini ada beberapa kendala namun berjalan kondusif dengan penerapan beberapa taktik manajemen konflik yang dilakukan oleh para *peer assistant*.

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi sekolah maupun guru untuk mengatasi celah atau *gab* kemampuan akademik yang tinggi dalam satu kelas. Strategi *mix level* melalui *peer assistant* juga direkomendasikan sekaligus sebagai sarana intervensi sosial untuk mengurangi kultur individualis remaja, meningkatkan *self esteem* dan percaya diri juga untuk menciptakan ruang belajar yang nyaman secara sosial. Namun, penelitian ini juga mempunyai keterbatasan pada ruang lingkup penelitian dan metode penelitian. Hasil penelitian dengan metode studi kasus yang dilakukan di SMP Islam Terpadu LHI tidak bisa digeneralisir di sekolah yang mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga belum mengukur hasil nilai belajar siswa secara kuantitatif. Maka, rekomendasi lebih lanjut untuk menggunakan metode penelitian campuran (*mix-methode*) sehingga bisa menyajikan hasil baik secara kualitatif maupun kuantitatif terkait *learning output* atau hasil belajar siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Nur Fida Etikasari, S.Pd., M. Sc, Gr. Selaku guru Bahasa Inggris Kelas IX SMP Islam Terpadu LHI yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberi akses untuk observasi kelas juga melakukan wawancara kepada siswa.

REFERENSI

- [1] L. D. Pratama, "Implementasi Pendekatan Saintifik Setting Kooperatif Tipe STAD Terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Matematika," vol. 9, no. 1, pp. 29–39, 2018.
- [2] W. Ningsih, Nyoto Suseno, and M. B. Salim, "Perbandingan Hasil Belajar dan Tingkat Kolaborasi Siswa Menggunakan Metode Diskusi Antar Kelompok Homogen dengan Kelompok Heterogen," pp. 18–27, 2023.
- [3] D. K. Muchiri and M. C. W. Njenga, "Investigating Various Grouping Strategies in Teaching and Learning of Mathematics," vol. 6, no. 3, pp. 227–232, 2020, doi: 10.31695/IJASRE.2020.33774.
- [4] P. Baxter and S. Jack, "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers," *Qual. Rep.*, no. January, 2015, doi: 10.46743/2160-3715/2008.1573.

- [5] R. Shaban, *Book review*, vol. 12, no. 2. 2009. doi: 10.1016/j.aenj.2009.01.005.
- [6] N. P. Anggorowati, “Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya pada Mata Pelajaran Sosiologi,” vol. 3, no. 1, pp. 103–120, 2011.
- [7] S. Milya and R. Indri, “Peningkatan Hasil Belajar Melalui Tutor Sebaya pada Materi Jaringan Peer to Peer X TKJ di SMKN 2 Gowa,” vol. 7, no. 3, pp. 109–114, 2024.
- [8] S. L. Ridwan, “Meningkatkan Kemampuan Berkolaborasi Melalui Pendekatan Tutor Sebaya dalam Pembelajaran Berdiferensiasi,” vol. 8, no. 2, pp. 585–606, 2024, doi: 10.26811/didaktika.v8i1.1278.
- [9] A. P. Munthe *et al.*, “Manfaat dan Kendala Penerapan Tutor Sebaya untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Lentera Harapan Mamit,” pp. 138–147, 2003.
- [10] R. Rikarde and L. Cahyani, “PEMBELAJARAN KOLABORATIF DI KELAS VII SMP : PENGARUH TUTOR SEBAYA TERHADAP NUMBER SENSE SISWA,” vol. 9, no. 2, pp. 56–63, 2024.
- [11] M. Bekiryazıcı, “Teaching Mixed-Level Classes with a Vygotskian Perspective,” *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 186, pp. 913–917, 2015, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.163.
- [12] T. Rohadi, I. Syekh, N. Cirebon, and T. Rohadi, “A Multi-Level Collaborative and Cooperative Writing Class in Inducing Character Building (A Model of An Integration Between Teaching Writing and Character Education) Syllabus of Writing,” vol. 3, no. 1, 2019.
- [13] S. Hartinah and W. Hendriani, “Strategi Mengoptimalkan Pendidikan Inklusi Melalui Peer Tutor pada Siswa Berkebutuhan Khusus : Literatur Review,” vol. 6, pp. 8164–8173, 2022.
- [14] R. Mustika and L. R. Royanto, “Reciprocal Teaching with Buddy to Improve Metacognitive Strategies of a High School Student with Reading Comprehension Difficulties Reciprocal Teaching with Buddy to Improve Metacognitive Strategies of High School Students with Reading Comprehension Diffi,” vol. 135, no. Iciap 2017, pp. 454–463, 2018.
- [15] G. Jacobs, “Jacobs , G . M . (2004 , September). Cooperative learning : Theory , principles , and techniques . . Paper presented at the First International Online Conference on Second and Foreign Language Teaching and Research .,” no. 1983, 2004.
- [16] C. Buchs and F. Butera, “Cooperative Learning and Social Skills Development,” pp. 201–217, 2015.
- [17] K. Foster, “Rowan Digital Works Using a peer buddy system to increase interaction between students with special needs and their peers,” 2011.
- [18] G. S. Nurhasanah Lisa, “Implementasi Pembelajaran Tutor Sebaya terhadap Hasil Belajar Siswa,” vol. 16, pp. 62–68, 2021.
- [19] S. Wulandari, E. Mulyana, and S. Nopharipaldi, “Peran Kelompok Sebaya dalam Mendorong Kerja Sama Sosial Siswa SMP pada Pembelajaran IPS,” vol. 15, no. 4, pp. 1496–1505, 2025.
- [20] A. S. Sri Dasweni, A. Muri Yusuf, “HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN MANAJEMEN KONFLIK PESERTA DIDIK,” vol. 6, no. 2, pp. 176–193, 2017.

BIODATA PENULIS

Nama : Fourzia Yunisa Dewi
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 13 Juni 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris UNY
S2 Magister Manajemen Pendidikan UAD
Instansi : SMP Islam Terpadu LHI
Alamat : Jl Karanglo Jogoragan, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta
HP/WA : 081578800080
Email : fourziayunisa@gmail.com
Judul Artikel : Strategi *Mix Level* melalui *Peer Assistant* di Kelas
Bahasa Inggris SMP Islam Terpadu LHI





Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebuah jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian dan issue-issue yang berkualitas dalam bidang Ekonomi, Pariwisata, Teknologi Informasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan. Namun tak terbatas secara implisit yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul (seluruhnya atau parsial).



Pendaftaran & Informasi

